

Arifuddin M. Arif

BUNGA RAMPAI PEMIKIRAN PENDIDIKAN ISLAM

Kajian Pendidikan Islam Perspektif Visi Profetik
Interkoneksitas Sains, Multikultural, Wasathiyah Islam,
Globalisasi, dan Historio-Kultural”.

 **MAN**
Publishing

BUNGA RAMPAI PEMIKIRAN PENDIDIKAN ISLAM

**Kajian Pendidikan Islam Perspektif Visi Profetik
Interkoneksi Sains, Multikultural, Wasathiyah Islam,
Globalisasi, dan Historio-Kultural**

Penulis: Arifuddin M. Arif

Editor: Abdul Hakim El Hamidy

Perwajahan Isi: Tim Oman Publishing

Perwajahan Sampul: Tim Oman Publishing

Diterbitkan oleh

CV. OMAN PUBLISHING

Kompleks Panghegar

Jln. Pasangrahan VI No. 1 RT 03 RW 10

Kel. Cipadung Kulon Kec. Panyileukan

Bandung 40614

Telp. 081319544445

e-mail: penerbitoman@gmail.com

Cetakan ke-1: Oktober 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

All Right Reserved

Arif, Arifuddin M.

Gaya dan Strategi Kepemimpinan Kepala Sekolah: Sebuah Upaya untuk
Meningkatkan Mutu Pendidikan/Arifuddin M. Arif,- Bandung: CV. Oman
Publishing, 2019

uk. 15.5 x 23 cm

hlm. vi + 150 hlm

ISBN:

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang Maha 'Alim, atas curahan rahmat Ilmu dan hidayah-Nya, penulis mendapat inspirasi untuk menorehkan gagasan-gagasan sederhana ini dan berikhtiar untuk menerbitkannya dalam bentuk buku yang diberi judul "*Bunga Rampai Pemikiran Pendidikan Islam:* ".

Buku ini, sesungguhnya adalah berisi dari naskah-naskah tematik pilihan Penulis yang telah dipresentasikan dalam forum-forum seminar ilmiah mengenai pendidikan Islam dalam berbagai perspektif. Tulisan-tulisan ini, sengaja menerbitkan dalam bentuk buku agar dapat terbaca secara luas oleh para *stakeholders* pendidikan Islam di tengah-tengah kuatnya pergulatan eksistensi nilai-nilai pendidikan Islam hari ini dari berbagai perubahan yang merupakan hasil dari pengaruh globalisasi.

Globalisasi dengan berbagai konsekuensinya sudah menjadi keharusan sejarah yang banyak memberikan tantangan (*threat*) juga peluang (*opportunity*) dalam dunia pendidikan Islam yang akan menggoyang tatanan kebudayaan, adat istiadat, dan nilai-nilai luhur ajaran Islam. Oleh karena itu menformat ulang teori dan praktik pendidikan harus segera dilakukan dan diseimbangkan, agar pendidikan Islam tidak pasif sebagai penonton bukan pemain, sebagai konsumen bukan produsen.

Pendidikan Islam juga harus melakukan dan memerankan diri sebagai *agent of change* sembari memperkuat identitas Islam. Agar terciptanya muslim yang tidak hanya menguasai ilmu agama tetapi juga unggul dalam pengetahuan sains dan teknologi. Posisi

pendidikan Islam wajib mempertahankan sikap selektif, kritis, dan terbuka terhadap munculnya arus globalisasi. Di samping itu, juga harus tetap konsisten terhadap sumber utama agama, yaitu al-Qur'an dan Hadis sambil memperluas wawasan dan pemahaman terhadap wasathiyah Islam, multikultural, modernitas, dan temuan sains dan teknologi.

Semoga kehadiran buku ini memberi manfaat dan memberikan kontribusi pemikiran dalam pemajuan pendidikan Islam, khususnya di Indonesia. Tulisan dan buku ini, tentu tidak lepas dari berbagai kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, Penulis terbuka menerima saran, masukan, dan kritikan konstruktif dari segenap pembaca, guna kesempurnaan gagasan dan sajian buku ini. Selamat membaca.

Palu, 20 Oktober 2019

Penulis,

Arifuddin M. Arif

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
1. Ontologi Pendidikan Islam: Perspektif Hadis Tarbawi	1
2. Guru Profetik, Guru Peradaban: Tinjauan Hadis Tarbawi	12
3. Interkoneksi Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Sains.....	35
4. Desain Kurikulum Berperspektif Multikultural....	55
5. Nalar Spiritual Pendidikan Islam: Refleksi Pemikiran Pendidikan KH. Abdurrahman Ambo Dalle dalam Memperkuat Peran Pendidikan Islam di Era Global	74
6. Reposisi Gerakan Dakwah Kultural Pondok Pesantren dalam Menyebarkan Nilai-nilai Islam Wasathiyah	93
7. Historisitas Pendidikan Islam di Kota Palu	111
8. Sejarah dan Perkembangan Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia.....	128
Tentang Penulis	149

ONTOLOGI PENDIDIKAN ISLAM: PERSPEKTIF HADIS TARBAWI

1

A. PENDAHULUAN

Secara sederhana, hadits atau as-sunnah merupakan jalan atau cara yang pernah dicontohkan Nabi Muhammad saw dalam perjalanan kehidupannya dalam melaksanakan syi'ar Islam. Contoh yang diberikan beliau dapat dibagi kepada tiga bagian. *Pertama, hadits qauliyah* yaitu yang berisikan ucapan, pernyataan, dan persetujuan Nabi saw. *Kedua, hadits fi'liyah* yaitu yang berisi tindakan dan perbuatan yang pernah dilakukan Nabi saw. *Ketiga, hadits taqririyah* yaitu yang merupakan persetujuan Nabi saw atas tindakan dan peristiwa yang terjadi (Fatchur Rahman, 1991:12).

Kesemua contoh yang telah ditunjukkan Nabi saw, merupakan sumber dan acuan yang dapat digunakan umat Islam dalam seluruh aktivitas kehidupannya, termasuk yang berkaitan dengan pendidikan. Dari sini, dapat dilihat bagaimana pentingnya posisi dan fungsi hadits Nabi saw sebagai sumber pendidikan (Islam) yang utama setelah al-Qur'an. Eksistensinya merupakan sumber inspirasi ilmu pengetahuan yang berisikan keputusan dan penjelasan Nabi saw dari pesan-pesan Ilahiyah yang tidak terdapat dalam al-Qur'an, maupun yang terdapat dalam al-Qur'an, tapi masih memerlukan penjelasan lebih lanjut secara terperinci.

Untuk memperkuat kedudukan hadits sebagai sumber inspirasi ilmu pengetahuan, dapat dilihat dari firman Allah Q.S. an-Nisa/4: 80 dan Q.S. al-Hasyr/59:7 sebagai berikut:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ... ﴿٨﴾

Terjemahnya:

Barang siapa yang taat kepada Rasul, sesungguhnya ia pun taat kepada Allah..... (QS.4:80).

﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾

Terjemahnya:

Apa yang diberikan Rasul kepadamu ambillah. Dan apa yang ia larang bagimu, tinggalkanlah....(QS. 59:7)

Dari ayat di atas, dapat dilihat dengan jelas, bahwa kedudukan hadits Nabi dalam konteks pendidikan merupakan dasar utama yang dapat dipergunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan pendidikan Islam.

Dalam dataran pendidikan Islam, acuan tersebut dapat dilihat dari dua bentuk, yaitu: *Pertama*, sebagai acuan syar'iyah, yang meliputi muatan-muatan pokok ajaran Islam secara teoriitis. *Kedua*, acuan operasional-aplikatif yang meliputi cara Nabi memainkan peranannya sebagai pendidik profesional, adil dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam. Proses yang ditunjukkan Nabi saw ini dapat dijadikan acuan dasar dalam pelaksanaan pendidikan Islam.

Proses pendidikan yang ditunjukkan Nabi Muhammad saw merupakan bentuk pelaksanaan pendidikan yang bersifat fleksibel dan universal, sesuai dengan potensi yang dimiliki peserta didik, relevan dengan kebutuhan aktual masyarakat, serta kondisi alam di mana proses pendidikan tersebut berlangsung dengan dibalut oleh pilar-pilar akidah Islamiyah. Sehubungan dengan ini, Robert L. Gullick sebagaimana dikutip oleh Jalaluddin Rahmat (1991:115), mengakui akan keberadaan Nabi saw sebagai seorang pendidik yang paling berhasil dalam membimbing manusia ke arah kebahagiaan kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat. Kesemua ini dapat dilihat lewat contoh dan keterangan-keterangan yang

diberikan Nabi, yang dapat dijadikan kerangka filosofis (ontologi, epistemologi, dan aksiologi), referensi ilmiah dan metodologis, maupun arah dan tujuan daripada pelaksanaan pendidikan Islam.

B. ANALISIS ONTOLOGIS PENDIDIKAN ISLAM

Ontologi, adalah bidang filsafat yang mempersoalkan hakikat keberadaan segala sesuatu yang ada (*ontology is the theory of being qua being*), menurut tata hubungan sistematis berdasarkan hukum sebab akibat (Dagobert D. Runes, 1963:219).

Pendidikan, ditinjau dari sisi ontologis berarti hakikat keberadaan pendidikan. Fakta menunjukkan bahwa pendidikan selalu ada dan berada dalam hubungannya dengan eksistensi kehidupan manusia. Oleh karena itu pembahasan pendidikan secara ontologis, juga selalu terkait dengan hakikat keberadaan manusia.

Secara ontologism, hakikat keberadaan manusia berada dalam tiga tingkatan, yaitu pada tingkat abstrak (*abstract essence*), tingkat potensial (*potencial essence*), dan tingkat konkrit (*concrete essence*). Ontolog pendidikan pun dapat dibahas pada tingkat-tingkat kesadaran itu.

Tingkat esensi abstrak pendidikan, adalah keberadaan pendidikan pada tingkat abstrak, bernilai universal. Artinya mutlak ada dan berlaku bagi manusia siapa pun, yang ada kapan dan di mana pun juga. Tanpa pendidikan manusia mustahil mampu bereksistensi dan mengembangkan kehidupannya. Dengan demikian, manusia mutlak (wajib) melakukan proses pendidikan secara terus menerus dalam kehidupannya yang berakar dari dan keberadaan manusia itu sendiri. Hal ini secara ontologis sesuai dengan hadis Nabi saw yang mewajibkan setiap muslim untuk melakukan proses penuntutan ilmu (proses pendidikan), sebagaimana hadits riwayat Ibnu Majah:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ
 شَنْظِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَوَاضِعُ الْعِلْمِ
 عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمَقْلَدِ الْخَنَازِيرِ الْجَوْهَرَ وَاللُّؤْلُؤَ وَالذَّهَبَ

Dengan proses transfer ilmu pengetahuan dan nilai-nilai terhadap diri manusia, manusia tersebut memiliki berbagai pengetahuan yang dapat mendukung tumbuh kembangnya potensi-potensi fitrah manusia, baik potensi spiritualitas, intelektual, skill, maupun emosionalnya. Potensi fisik jasmaniah, maupun potensi rohaniannya.

Nilai universal pendidikan secara ontologis pula, dapat dilihat pada orientasi pendidikan itu sendiri, yaitu sistem bimbingan dengan sasaran membangun karakter (*character building*) manusia yang manusiawi (pemanusiaan manusia yang manusiawi). Istilah manusia yang manusiawi adalah manusia dengan potensi akalnyanya mendapat bimbingan di dalam rentetan sistem pendidikan, untuk kemudian tumbuh kesadaran terhadap asal mula, eksistensi, dan tujuan hidupnya.

Pada tingkat hakikat (esensi) abstrak pula, pendidikan berfungsi menumbuhkembangkan kecerdasan spiritual. Yaitu kemampuan untuk menyadari bahwa kehidupan ini berasal mula dan bertujuan. Karena itu, kehidupan ini harus berlangsung menurut asal mula dan bernilai guna bagi tujuan. Dengan kecerdasan spiritual ini, manusia selalu terdorong untuk mengembangkan spirit kehidupan yang penuh dengan kearifan dan kejujuran. Oleh karena itu hakikat sistem pendidikan yang harus dibangun adalah sistem pendidikan yang kondusif tumbuh kembangnya potensi fitrah manusia yang *hanif* sebagai embrio

lahirnya kecerdasan spiritual dan emosional yang akan berkesadaran pada asal mula, eksistensi dan tujuan kehidupan. Ini terkandung pada konteks hadits Nabi saw tentang pentingnya mengkondisikan lingkungan dalam pendidikan anak. Seperti hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ مَوْلُودٍ
يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ أَوْ يمجِّسَانِهِ

Dalam perspektif pendidikan Islam, fitrah manusia dimaknai dengan sejumlah potensi yang menyangkut kekuatan-kekuatan manusia. Kekuatan tersebut meliputi kekuatan hidup dalam upaya mempertahankan dan melestarikan kehidupannya, kekuatan rasional (akal), dan kekuatan spiritual (agama) (Samsul Nizar, 2001: 135). Ketiga kekuatan ini bersifat dinamis dan terkait secara integral. Potensi tersebut masih berupa bentuk atau wadah yang dapat diisi dan dimodifikasi dengan berbagai sikap, kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan tertentu. Dengan potensi yang dimilikinya ini, menjadikan manusia sebagai makhluk Allah yang mulia dibanding dengan makhluk yang lainnya. Dengan potensi dan kemuliaannya inilah juga menjadikan manusia sebagai makhluk paedagogik.

Pada tingkat potensial pendidikan (*potecial essence*), pendidikan adalah suatu daya yang mampu membuat manusia berada di dalam kepribadiannya sebagai manusia, yaitu sebagai makhluk kreatif yang selalu berkreasi dan berinovasi dengan berbagai jenis kerangka dan model perubahan yang berguna bagi kelangsungan dan perkembangan hidupnya. Pada tingkat hakikat potensi ini, pendidikan cenderung menumbuhkembangkan “kecerdasan intelegensi” agar terbentuk kepribadian kreatif. yaitu, secara terus menerus meningkatkan latihan berpikir, menelaah dan

menerapkan ilmu pengetahuan, dan berlatih secara terus menerus. Kepribadian yang berinteleksi dan kreatif ini adalah sumber kemajuan hidup. Hal ini relevan petunjuk Nabi saw seperti di antara dalam sabdanya:

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا حَرِيزٌ عَنْ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ
 قَالَ كَانَ يُقَالُ تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَاتَّقُوا بِهِ وَلَا تَعْلَمُوهُ لِتَجَمَّلُوا بِهِ فَإِنَّهُ
 يُوشِكُ أَنْ يَطَالَ بِكُمْ عُمُرٌ أَنْ يَتَجَمَّلَ ذُو الْعِلْمِ بِعِلْمِهِ كَمَا يَتَجَمَّلُ ذُو
 الْبِرَّةِ بِبِرَّتِهِ

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ
 عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ
 سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أَلْجَمَهُ اللَّهُ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Kedua hadits di atas, memberikan signal arti pentingnya proses mengkaji dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kehidupan manusia, sebagai bagian hakikat pendidikan dalam kerangka aktualisasi potensi-potensi diri manusia secara utuh. Potensialitas manusia untuk menerima dan mentransfer serta mengaktualisasikan diri (mengembangkan) ilmu pengetahuan dan nilai-nilai inilah yang kemudian dikembangkan, diperkaya, dan diaktualisasikan secara nyata dalam perbuatan amaliah manusia sehari-hari, baik secara vertikal maupun horizontal.

Pada tingkat esensi konkrit pendidikan (*concrete essence*), pendidikan terkait secara langsung dengan manusia individual. Dalam hal ini pendidikan adalah daya yang mampu membuat setiap manusia individu berkesadaran utuh terhadap hakikat

keberadaannya berdasar pada nilai-nilai asal mula dan tujuan kehidupannya (cerdas spiritual). Di samping itu, pendidikan juga membuat setiap individu mampu merancang bangun teori-teori perubahan yang bernilai guna bagi kelangsungan dan perkembangan kehidupan individualnya (kecerdasan intelektual).

Berdasarkan kecerdasan spiritual dan intelektual itu, hakikat konkret pendidikan menekankan pada kecerdasan emosional. Yaitu kemampuan individu dalam mengendalikan perilakunya, agar senantiasa sesuai dengan dilai asal mula dan tujuan kehidupan. Jadi, persoalan pokok hakikat konkret pendidikan adalah kegiatan pendidikan dan pembelajaran dengan sasaran bagaimana menumbuhkembangkan potensi kecerdasan berperilaku (kecerdasan emosional) yang terkendali menurut dasar nilai kebaikan yang terbentuk pula dari kecerdasan intelektual dan spiritual yang berdasar pada hakikat asal mula, eksistensi dan tujuan kehidupan manusia itu sendiri. Inilah hakikat pendidikan secara ontologis yang terkandung sabda Nabi saw:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا
سَعِيدُ بْنُ عُمَارَةَ أَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ النُّعْمَانِ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ
يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَكْرَمُوا أَوْلَادَكُمْ
وَأَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ
عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ إِنَّمَا الْفَقِيهُ مَنْ يَخَافُ اللَّهَ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمِيدٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُخْتَارٍ حَدَّثَنَا عَنبَسَةُ بْنُ
الْأَزْهَرِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (إِنَّمَا يَخْشَى
اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ) قَالَ مَنْ خَشِيَ اللَّهَ فَهُوَ عَالِمٌ

Berdasarkan pada analisa terhadap konsep pendidikan secara ontologis yang dilihat dari perspektif hadits-hadits Nabi saw maka, pendidikan itu pada hakikatnya adalah suatu upaya pengembangan seluruh aspek dalam diri manusia secara berimbang, baik aspek intelektual, spiritual, moralitas, keilmiahan, kultural, dan keterampilan (*skill*) melalui proses transformasi ilmu pengetahuan (التعليم), pembentukan karakter dan skill (التأديب), dan internalisasi nilai *ilahiyyah* dan *insaniyyah* (التربية) agar menjadi manusia yang tumbuh dan berkembang sebagai makhluk yang memiliki kesadaran tentang asal mula, eksistensi dan tujuan kehidupan (Arifuddin Arif: 2008).

Bangunan karakter manusia yang memiliki kesadaran tinggi terhadap hakikat “kedirian” yang berasal mula untuk bereksistensi secara potensial-aktual dalam kehidupan dalam rangka menuju hakikat kehidupan yang abadi, harus dibangun diatas kesatuan konsep (integrasi) antara pendidikan *qalbiyyah*, *aqliyyah*, jasmani dan rohani, sehingga mampu menghasilkan manusia muslim yang cerdas secara intelektual, memiliki kedalaman spiritualitas, dan terpuji secara moralitas. Jika kedua komponen itu terpisah atau dipisahkan dalam proses pendidikan, maka manusia akan kehilangan keseimbangan dan tidak akan pernah menjadi pribadi-pribadi yang sempurna (*insan kamil*).

C. PENUTUP

Sebagai bagian akhir dari pengkajian ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Secara ontologis, pendidikan bagi manusia itu mutlak adanya. Oleh karena tanpa pendidikan manusia tidak dapat mengembangkan kehidupannya sesuai dengan hakikat asal mula, eksistensi, dan tujuan kehidupannya. Potensialitas manusia untuk mengembangkan kehidupannya ini, oleh karena manusia memiliki potensi dasar yakni "*fitrah*" untuk berkembang secara spiritual, intelektual, moralitas, dan personal skill. Potensi-potensi dasar manusia tersebut memerlukan beberapa upaya untuk merangsangnya untuk berkembang secara maksimal. Upaya tersebut adalah pendidikan.

2. Konsep dan semangat pengembangan potensi-potensi manusia melalui upaya pendidikan secara ontologis sangat banyak ditunjukkan oleh beberapa teks-teks hadits Nabi saw sebagaimana yang telah dikemukakan, dan hadits-hadits tersebut secara kualitas sanad dan matan dapat dijadikan sebagai *hujjah* dan motivasi untuk pengembangan pendidikan manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kerangka kehidupan yang tidak terlepas dari nilai-nilai *ilahiyah*.

Sebagai implikasi dari pada hasil pengkajian hadits tentang konsep ontologism pendidikan dari persfektif hadits Nabi saw, maka dengan ini disarankan agar para intelektual muslim, khususnya para ulama dan pakar pendidikan dapat terus mengkaji dan mengungkap konsep-konsep pendidikan dari hadits-hadits Nabi saw baik kajian dari perspektif ontologis, epistemologis, maupun aksiologis, dalam rangka memberikan referensi ilmiah dalam membangun pendidikan yang *profetik*.

Pendidikan profetik secara ontologis, pada hakikatnya adalah menumbuhkembangkan potensi-potensi manusia agar dapat berkesadaran tentang hakikat asal mula, eksistensi, dan tujuan kehidupan, maka dalam praktek pendidikan manusia harus dikembangkan potensi *aqliyah* dan *qalbiyah*, jasmani dan rohani secara seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Abrasy, Muhammad Athiyah. *al-Tarbiyah al-Islamiyah Wa Falasifatuha*. Beirut: Dar al-Fikr. Tth.
- Ahmad Ibn Hanbal, Abu Abdullah. *Musnad Ahmad bin Hambal*. Juz II. Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1398 H/1978 M.
- Al-Mu'jam al-Wasith, Kamus al-Arab*. Jakarta: Matbha' Angkasa, tth.
- Arif, Arifuddin . *Pengantar Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kultura. 2008.
- al-Bukhory, Muhammad Bin Ismail, *Shahih al-Bukhary*. Juz I. Singapura: Sulaiman Mar'e, tth.
- al-Darimiy, Abdullah bin bahr, Abi Muhammad. *Sunan al-Darimiy*. Juz I. Dar- Ihya' al-Sunnah al-Nabaiywah, tth.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: CV Toha Putra, 1989.
- Ensikloped Islam*. Jilid 2. Jakarta: Van Hoeve Ichtiar baru. 1977.
- Ensiklopedi Al-Qur'an. Kajian Kosakata dan Tafsirnya*. Jakarta: Yayasan Bimantara. 1997.
- Ibn Malik. *al-Muwattha'*. Juz II.
- Ibnu Manzur. *Qamus Lisan al-Arab*. Beirut: Dar al-Mishriyah. 1992.
- al-Ishfahany, al-Ragib. *Mu'jam Mufradat al-Fadz al-Qur'a*. Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- Ismail, Syuhudi. *Kaedah Kesahihan Sanad Hadits*. Jakarta. Bulan Bintang. 1988.
- al-Nawawiy, al-Imam. *Shahih Muslim Bisyarh al-Nawawiy*. Juz 16. BeirutL Dar al-Fikr, 1981

- Nizar, Samsul. *Pengantar Dasar-Dasar Pemikiran Pendidikan Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- al-Qazwayni, Muhammad bin Yazid. Ibn Abdillah. *Sunan Ibn Majah*. Juz I. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Rahman, Fatchur. *Ikhtishar Musthalahul Hadtis*. Bandung: PT Al-Ma'arif, 1991.
- Rahmat, Jalaluddin. *Islam Alternatif*. Bandung: Mizan, 1991
- Runes, Dagobert D. *Dictionary of Philosophy*. New Jersey: Litlefield Adams & Co Ltd., 1963. 219.
- al-Sajasytani, Asy'ats, Abu Sulaiman. *Sunan Abi Daud*. Juz II. Bandung: Dahlan tth.
- Sulaiman PL, Noor. *Antologi Ilmu Hadits*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2008.
- al-Turmudzy, Ibn Isa, Muhammad Bin Isya. *Sunan al-Turmudzy*. Juz 4. Beirut: Dar al-Fikr, tth).
- Wensinck, A.J. *al-Mu'jam al-Mufahras li alfadz al-Hadis al-Nabawiy*. Juz I, IV, V. Leiden: E.J. Brill, 1965.
- Ya'qub, Ali Mustafa. *Kritik hadits*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2004.

GURU PROFETIK, GURU PERADABAN: TINJAUAN HADIS TARBAWI

2

A. PENDAHULUAN

Secara sederhana, hadis atau *as-sunnah* merupakan jalan atau cara yang pernah dicontohkan Nabi Muhammad saw dalam perjalanan kehidupannya dalam melaksanakan syi'ar Islam. Contoh yang diberikan beliau dapat dibagi kepada tiga bagian. *Pertama, hadis qauliyah* yaitu yang berisikan ucapan, pernyataan, dan persetujuan Nabi saw. *Kedua, hadis fi'liyah*, yaitu berisi tindakan dan perbuatan yang pernah dilakukan Nabi saw. *Ketiga, hadis taqririyah* yaitu yang merupakan persetujuan Nabi saw atas tindakan dan peristiwa yang terjadi (Noor Sulaiman PL: 2008).

Semua contoh yang telah ditunjukkan Nabi saw, merupakan sumber dan acuan yang dapat digunakan umat Islam dalam seluruh aktivitas kehidupannya, termasuk yang berkaitan dengan pendidikan. Dari sini, dapat dilihat bagaimana pentingnya posisi dan fungsi hadis Nabi saw sebagai sumber pendidikan (Islam) yang utama setelah al-Qur'an. Eksistensinya merupakan sumber inspirasi ilmu pengetahuan yang berisikan keputusan dan penjelasan Nabi saw dari pesan-pesan *Ilahiyah* yang tidak terdapat dalam al-Qur'an, maupun yang terdapat dalam al-Qur'an, tapi masih memerlukan penjelasan lebih lanjut secara terperinci.

Posisi dan kedudukan hadis Nabi Saw tersebut dalam konteks pendidikan Islam, dapat dilihat dari dua bentuk, yaitu: *Pertama*, sebagai acuan *syar'iyah*, yang meliputi muatan-muatan pokok ajaran Islam secara teoritis. *Kedua*, acuan operasional-aplikatif yang meliputi cara Nabi memainkan peranannya sebagai

pendidik profesional, adil, dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam. Proses yang ditunjukkan Nabi saw. ini dapat dijadikan acuan dasar dalam pelaksanaan pendidikan Islam.

Proses pendidikan yang ditunjukkan Nabi Muhammad saw merupakan bentuk pelaksanaan pendidikan yang bersifat fleksibel dan universal, sesuai dengan potensi yang dimiliki peserta didik, relevan dengan kebutuhan aktual masyarakat, serta kondisi alam di mana proses pendidikan tersebut berlangsung dengan dibalut oleh pilar-pilar akidah Islamiyah. Sehubungan dengan ini, Robert L. Gullick sebagaimana dikutip oleh Jalaluddin Rahmat (1991: 115) mengakui eksistensi Nabi saw sebagai seorang pendidik yang paling berhasil dalam membimbing manusia ke arah kebahagiaan kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat.

Mengkaji profil Rasulullah Saw sebagai pendidik ideal merupakan momentum tepat untuk merekonstruksi dimensi teoritis, metodologis, arah, tujuan, dan bangunan pendidikan Islam, terutama komponen guru. Banyak pakar yang telah mengemukakan tentang konsep guru. Muhaimin, menyebutkan paling tidak ada enam sebutan istilah guru, yaitu: *ustadz*, *mu'allim*, *murabbi*, *mursyid*, *mudarris*, dan *mu'addib*.

B. TEKS DAN TERJEMAH HADITS TENTANG GURU

1. *Mu'allim*

Hadis yang menjadi kajian tentang *term* guru perspektif hadis dalam konteks “*mu'allim*” di sini, mengacu pada hadis riwayat *al-Turmudziy*, *al-Darimi*, dan *Ibnu Majah* sebagai berikut:

a. Hadis Riwayat *al-Turmudziy*

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنَعَائِيُّ حَدَّثَنَا سَلْمَةُ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ
بْنُ جَمِيلٍ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ ذَكَرَ

لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا عَابِدٌ وَالْآخَرُ عَالِمٌ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَّلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ
ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِينَ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ
الْحَيِّرِ.

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdul A'la Ash Shan'ani telah menceritakan kepada kami Salamah bin Raja` telah menceritakan kepada kami Al Walid bin Jamil telah menceritakan kepada kami Al Qashim Abu Abdurrahman dari Abu Umamah Al Bahili ia berkata; "Dua orang disebutkan di sisi Rasulullah Saw, salah seorang adalah ahli ibadah dan yang lain seorang yang berilmu, kemudian Rasulullah Saw. bersabda: "Keutamaan seorang alim dari seorang abid seperti keutamaanku dari orang yang paling rendah di antara kalian,"kemudian beliau melanjutkan sabdanya: "Sesungguhnya Allah, MalaikatNya serta penduduk langit dan bumi bahkan semut yang ada di dalam sarangnya sampai ikan paus, mereka akan mendoakan untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia". (H.R. al-Turmidziy).

b. Hadis Riwayat Al-Darimi

Terdapat dua konteks redaksi tentang *mu'allim* dalam riwayat al-Darimi yang dipilih dalam buku ini, yaitu:

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَسَدٍ أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عَبَثْرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِي
الدَّرْدَاءِ قَالَ مُعَلِّمُ الْخَيْرِ وَالْمُتَعَلِّمُ فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ وَلَيْسَ لِسَائِرِ النَّاسِ بَعْدُ
خَيْرٌ.

Artinya:

“Telah mengabarkan kepada kami Ahmad bin Asad Abu 'Ashim telah menceritakan kepada kami 'Abtsar dari Al A'masy dari Salim dari Abu Darda` radiallahu 'anhu ia berkata: "Orang yang mengajari kebaikan dan yang belajar terhadapnya mempunyai pahala sama, dan tidak ada lagi kebaikan setelah dua hal tersebut". (H.R. al-Darimiy).AS

Redaksi hadis yang lain dapat dilihat, sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَرِيدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعَمَ عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- مَرَّ بِمَجْلِسَيْنِ فِي مَسْجِدِهِ فَقَالَ : كِلَاهُمَا عَلَى خَيْرٍ وَأَحَدُهُمَا أَفْضَلُ
مَنْ صَاحِبِهِ أَمَّا هَؤُلَاءِ فَيَدْعُونَ اللَّهَ وَيُرْغَبُونَ إِلَيْهِ فَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُمْ
وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُمْ وَأَمَّا هَؤُلَاءِ فَيَتَعَلَّمُونَ الْفِتْهَ وَالْعِلْمَ وَيُعَلِّمُونَ الْجَاهِلَ
فَهُمْ أَفْضَلُ وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا قَالَ : ثُمَّ جَلَسَ فِيهِمْ

Artinya:

“Menceritakan kepada kami 'abdullah bin yazid, menceritakan kepada kami 'abdur Rahman bi ziyad bin an'um bin abdur Rahman bin Rafi' dari Abdullah bin 'amr: Sesungguhnya rasulullah Saw. melewati dua majlis di masjidnya, lalu Rasulullah berkata; keduanya itu baik dan sala ssatu keduanya itu lebih utama dari sahabatnya. Adapun mereka berdo'a kepada Allah dan menyenangkan kepadaNya.

Maka jika Allah berkehendak mereka akan diberi. Dan jika Allah berkehendak mereka akan dicegah. Adapun mereka ada yang belajar ilmu fiqh dan mereka mengajarkan kepada orang yang bodoh. Maka mereka itulah yang lebih utama. Dan sesungguhnya aku di utus sebagai pengajar (pendidik). Abdullah bin 'amr berkata: kemudian rasulullah duduk bersama mereka”. (H.R. al-Darimiy)

c. Hadis Riwayat Ibnu Majah

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافِ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الزَّبْرِقَانَ عَنْ بَكْرِ بْنِ خُنَيْسٍ
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ
خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ مِنْ بَعْضِ حُجْرِهِ فَدَخَلَ
الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ بِحِلْقَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ وَيَدْعُونَ اللَّهَ
وَالْأُخْرَى يَتَعَلَّمُونَ وَيُعَلِّمُونَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ عَلَى
خَيْرٍ هَؤُلَاءِ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ وَيَدْعُونَ اللَّهَ فَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُمْ وَإِنْ شَاءَ
مَنْعَهُمْ وَهَؤُلَاءِ يَتَعَلَّمُونَ وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا فَجَلَسَ مَعَهُمْ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Hilal Ash Shawwafi berkata, telah menceritakan kepada kami Dawud bin Az Zibirqan dari Bakr bin Khunais dari Abdurrahman bin Ziyad dari Abdullah bin Yazid dari Abdullah bin 'Amru ia berkata; Pada suatu hari Rasulullah Saw keluar dari salah satu kamarnya dan masuk ke dalam masjid. Lalu beliau menjumpai dua halaqah, salah satunya sedang membaca Al Qur`an dan berdo'a kepada Allah, sedang yang lainnya melakukan proses belajar mengajar. Maka Nabi Saw. pun bersabda: "Masing-masing berada di atas

kebaikan, mereka membaca Al Qur`an dan berdo`a kepada Allah, jika Allah menghendaki maka akan memberinya dan jika tidak menghendakinya maka tidak akan memberinya. Dan mereka sedang belajar, sementara diriku di utus sebagai pengajar, " lalu beliau duduk bersama mereka". (H.R. Ibnu Majah).

2. *Murabbi*

Redaksi hadis yang menggunakan teks “*murabbi*” tidak terdapat di dalam kitab hadis. Namun isyarat tentang “*murabbi*” dijumpai di dalam Kitab *Shahih Bukhari*, sebagai berikut:

...وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ ». وَقَالَ أَبُو ذَرٍّ لَوْ وَضَعْتُمْ الصَّنَمَ صَامَةً عَلَى هَذِهِ وَأَشَارَ إِلَى قَفَاهُ - ثُمَّ ظَنَنْتُ أَنِّي أَنْفَذُ كَلِمَةً سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبْلَ أَنْ تُحْيِرُوا عَلِيَّ لِأَنْفَذْتُهَا . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (كُونُوا رَبَّائِيْنَ) حُلَمَاءَ حُكَمَاءَ فُقَهَاءَ . وَيُقَالُ الرَّبَّائِيُّ الَّذِي يُرَبِّي النَّاسَ بِصَغَارِ الْعِلْمِ قَبْلَ كِبَارِهِ .

Artinya:

Dan Nabi Saw. bersabda; barangsiapa yang menghendaki suatu kebaikan maka hendaknya memahami agama. Dan sesungguhnya memahami agama itu dengan cara mempelajarinya. Dan Abu Dzar berkata:”jika kamu hendak meletakkan pedang di sini-lalu dia menunjuk kepada bagian tengkuknya, dan kemudian saya mengira bahwa saya masih dapat mengatakan sebuah hadis yang saya dengarkan dari Rasulullah Saw sebelum kamu menebaskan pedangmu, maka saya akan melakukannya”, Ibnu Abbas berkata “jadilah seseorang rabbaniyyin yang menahan diri dan memahami.

Dikatakan bahwa rabbaniyyin adalah seseorang yang menghidupkan orang lain dengan aspek yang terkecil dari ilmu sebelum aspek yang lebih besar”. (H.R. Bukhari).

3. *Mu’addib*

Redaksi hadis yang mengandung isyarat tentang “*muaddib*” ditemukan di beberapa kitab dan riwayat, seperti; *al-Bukhari*, *Ibnu Majah*, *al-Turmudzi*, *al-Nasa’i*, dan *al-Darimi*. Dari beberapa jalur periwayatan, meskipun dari aspek matan ada beberapa perbedaan redaksi, namun secara substansi makna hadis pada prinsipnya sama. Oleh karena itu, dalam makalah ini hanya diambil beberapa sampel riwayat yang akan dijadikan sebagai kerangka acuan dalam mengkaji makna *muaddib* dalam persepektif hadis.

a. Hadis Riwayat Bukhari

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَالِحٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ
عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا
رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَأَعْتَقَهَا وَتَرَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ
وَأَيُّمَا عَبْدٍ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوْلِيهِ فَلَهُ أَجْرَانِ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Shalih dari Asy-Sya’biy dari Abu Burdah dari Abu Musa Al Asy’ariy berkata, Nabi bersabda: “Siapa saja dari seseorang yang memiliki seorang budak wanita lalu dididiknya dengan sebaik-baik pendidikan, kemudian dibebaskannya lalu dinikahnya maka baginya mendapat dua pahala, dan siapa saja dari seorang hamba yang menunaikan hak Allah dan hak tuannya maka baginya mendapat dua pahala.” (H.R. Bokhari).

b. Hadis Riwayat Ibnu Majah

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمَارَةَ أَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ التُّعْمَانَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَكْرِمُوا أَوْلَادَكُمْ وَأَحْسِنُوا أَدْبَهُمْ.

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami, al-Abbas bin al-Walid al-Dimasyqi, telah menceritakan pada kami Ali bin Ayyas, telah menceritakan kepada kami Said bin Umarah, telah diceritakan kepadaku al-Harits bin al-Nu’man, saya mendengar Anas bin Malik yang menceritakan dari Rasulullah Saw. berkata; Muliakanlah anak-anakmu dan perbaikilah didikan mereka”. (H.R. Ibnu Majah).

C. ANALISIS KUALITAS HADIS

Berdasarkan penelusuran Penulis terhadap beberapa sanad dan matan hadis di atas baik melalui kitab *al-Jarh wa al-Ta’dil*, maupun keterangan dari beberapa ulama hadis. Dari beberapa hadis tentang *term* guru yang dipilih, ada beberapa riwayat yang menjadi catatan beberapa ulama hadis.

Diantara hadis tersebut, yakni hadis tentang “*muallim*” yang diriwayatkan oleh *al-Turmudzi*. Menurut Abu Isa (*al-Turmudzi*) dalam *al-Sunannya*, bahwa hadis tersebut adalah hadis garib. Demikian pula hadis riwayat Bukhari tentang: (كُونُوا رَبَّائِيْنَ),

Hadits ini, tergolong hadis *mauquf*, karena hadis tersebut berupa perkataan yang disandarkan kepada sahabat Nabi saw. yaitu Ibnu Abbas, yang mana beliau adalah putra dari Abbas bin Abdul Mutthalib bin Hasyim, paman Rasulullah saw. (Syihabuddin Ibnu Hajar al-Atsqalaniy: tth).

Adapun hadis: *أَكْرَمُوا أَوْلَادَكُمْ وَأَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ* dalam riwayat

Ibnu Majah yang mengandung isyarat konsep tentang “*muaddib*”, oleh Az-Zawaid dalam *al-Isnad* terkait al-Harits bin an-Nu'man dilemahkan oleh Ibn Hatim, namun oleh Ibnu Hibban dikategorikan *al-Tsiqah*.

Berdasarkan analisis terhadap tingkat kualitas matan dan sanad hadis-hadis yang dikemukakan di dalam makalah ini, maka dalam pandangan Penulis dapat dijadikan sebagai pegangan (*hujjah*) dalam memberikan argumentasi-argumentasi sunnah tentang hakikat guru (pendidik) dalam perspektif Nabi saw, walaupun dalam beberapa riwayat tadi ada yang dianggap lemah, namun karena hadis ini bukan hadis yang masuk pada wilayah *ta'abbudiy*, maka patut dijadikan sebagai instrumen dalil yang memberikan motivasi bagi semua manusia sebagai makhluk individu maupun sosial untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pendidikan sebagai makhluk pendidikan (*animal educable*).

D. MAKNA MUFRADAT BEBERAPA KATA DALAM MATAN HADIS

Relevan dengan topik makalah ini, berikut dijelaskan beberapa kata yang terdapat di dalam beberapa hadis yang telah dikemukakan sebagai “kata kunci” untuk mengungkap hakikat guru dalam perspektif hadis. Beberapa kata tersebut yaitu:

1. *Mu'allim* (مُعَلِّم) dan *al-Khair* (الْحَيْر)

Mu'allim, berasal dari *fi'il madhi*, “*allama*”, *mudhari*'nya “*yu'allimu*” dan *mashdarnya* “*al-Ta'lim*”. Artinya, telah mengajar, sedang mengajar, dan pengajaran. *Muallim*, juga merupakan *isim fail* dari kata “*allama*”, yang artinya “orang yang mengajar”. Jika dilihat secara leksikal, *mu'allim* berakar dari kata dasar “*ilm*”.

Kata ilmu berasal dari bahasa Arab “علم” yang berarti pengetahuan, merupakan lawan kata *jahl* (جهل) yang berarti ketidaktahuan atau kebodohan (Ensiklopedi Islam: 1977; 2001). Menurut Ibnu Zakaria dalam *Mu’jam Maqayis al-Lughah* bahwa kata ilm mempunyai arti “bekas sesuatu yang dengannya dapat dibedakan sesuatu dari yang lainnya”. Sedangkan menurut al-Ashfahani dan Al-Anbari, ilmu adalah mengetahui dan memahami hakikat sesuatu.

Pengetahuan dan pemahaman setiap sesuatu (ilmu) dalam pandangan al-Asfahani: 1972), terkandung dimensi teoritis dan dimensi *amaliah* (praktis). Berdasarkan pandangan ini, maka dapat disimpulkan bahwa seorang guru dituntut untuk mampu menjelaskan hakikat ilmu pengetahuan yang diajarkannya, baik dimensi teoritis maupun praktisnya.

Inilah makna dan substansi pengajaran yang harus diajarkan dalam konteks hadis ini adalah: “الْحَيِّرُ” atau “مُعَلِّمِ النَّاسِ” (Mengajarkan manusia kebaikan). Makna “الْحَيِّرُ” (*al-Khair*), sebagaimana dikutip oleh Yulia Rahmi dari Tafsir Al-Qur’an Al-Aisar, dimaknai segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia dalam hidupnya di dunia dan di akhirat, baik meliputi aspek iman, Islam, amal shaleh, maupun karunia yang bersifat duniawi (harta benda).

Oleh karena itu, pernyataan Nabi yang mengatakan: “وَإِنَّمَا “بُعِثْتُ مُعَلِّمًا” adalah penegasan Nabi Saw. yang berkedudukan sebagai guru yang akan menjalankan tugas dan fungsi profetiknya memberikan ilmu pengetahuan yang bercorak “*al-Khair*” di

tengah-tengah umat manusia (مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ) melalui pendekatan teoritis maupun praktis (*amaliah* dan keteladanan).

2. *Rabbaniyyin* (رَبَّانِيَّيْنَ)

Rabbaniyyin (رَبَّانِيَّيْنَ) adalah, *isim fail* dari kata “*rabba*” dan masdarnya adalah “*tarbiyah*”. Jika ditinjau dari akar katanya, dapat dilihat pada tiga bentuk, yaitu: (1) *raba-yarbu-tarbiyah*, yang memiliki makna bertambah dan berkembang; (2) *rabiya-yarba-tarbiyah*, memiliki makna tumbuh dan menjadi besar; dan (3) *rabba-yarubbu-tarbiyah*, memiliki makna memperbaiki, menguasai, memelihara dan merawat, mengatur, dan menjaga kelestarian dan eksistensinya (Muhammad Nur Abd. Hafid Suwaed: 2012).

Al-Tarbiyah, secara terminologi adalah merupakan proses transformasi sesuatu sampai pada batas kesempurnaan, dan dilakukan secara bertahap. Atau dengan kata lain, *al-tarbiyah* adalah aktivitas penumbuhkembangan potensi-potensi anak secara bertahap dan terencana sampai pada batas kesempurnaan. Berdasarkan pengertian ini, maka al-Nahlawi menyimpulkan bahwa aktifitas *al-tarbiyah* memiliki beberapa unsur, yaitu: (1) ada proses yang memiliki tujuan, sasaran, dan target; (2) melakukan pengembangan fitrah manusia; (3) ada langkah-langkah sistematis dan terencana yang harus dilakukan dalam berbagai kegiatan pendidikan dan pengajaran; dan (4) proses *tarbiyah* harus mengikuti hukum-hukum syari’at yang ditetapkan oleh Allah (Abdurrahman al-Nahlawiy, tth.: 13).

Dari pengertian *al-tarbiyah* di atas, maka “*rabbaniyyin*” (رَبَّانِيَّيْنَ) dalam hadis adalah “*murabbi*” sebagai guru yang bertindak sebagai pendidik, yaitu orang-orang yang disertai peran tanggung jawab membesarkan, menumbuhkan, mengembangkan,

memelihara, mengasuh, mengawasi, dan membina anak, baik yang mencakup aspek jasmaniah maupun rohaniah.

Adapun kata “حُلَمَاءُ حُكَمَاءُ فَقَهَاءُ” adalah beberapa karakter yang harus dimiliki dan menyertai seorang *murabbi*, yakni mendidik dengan sabar, santun, bijak, dan berilmu serta berwawasan luas. *Al-Hilm* (حُلَمَاءُ), adalah karakter yang wajib dimiliki oleh setiap guru dengan kemampuan untuk bersifat lapang dada, banyak bersabar, dan mengendalikan dirinya dari sikap pemaarah dan menghardik tanpa sebab yang dapat ditolerir (Muhammad Athiyah al-Abrasy: 1984).

Adapun “حُكَمَاءُ”, adalah jamak dari kata “*hakim*”, artinya yang arif dan bijaksana (A. Munawwir: tth). Derivasi lain dari kata ini adalah kata “*al-hikmah*”. Di dalam kitab Tafsir al-Alusi dijelaskan bahwa penganugrahan atau pembelajaran “*al-hikmah*” adalah menjelaskannya dan memberi bimbingan untuk melaksanakannya, artinya menjelaskan dan memberi bimbingan untuk mengetahui, memahami, dan mengamalkannya.

Sedangkan “فُقَهَاءُ”, adalah bentuk jamak dari kata “*al-Faqih*”, yang artinya ahli fiqhi. *Fuqaha* dalam konteks ini, bukan saja ahli di bidang fiqhi (hukum-hukum syar’i) namun lebih dari itu seorang guru harus *faqih* (memiliki pemahaman) yang sangat luas dan mendalam terhadap berbagai dimensi ilmu, minimal bidang ilmu yang diajarkan. Memperdalam ilmu agama (*tafaqquh fiddiin*) para ulama biasanya menyandarkannya kepada firman Allah dalam Q.S. At Taubah 122. Oleh karena itu, seorang guru harus memiliki kompetensi “*faqih*” dalam makna hadis.

3. *Tadib dan Adab* (تَأْدِيبَهَا) dan (أَدْبَهُمْ)

Ta'dib (تَأْدِيب) adalah bentuk masdar dari kata “*addaba*”.

Addaba mengandung pengertian mendidik, melatih, memperbaiki, mendisiplin, dan memberikan tindakan (Al-Mu'jam al-Wasith, tth). Adab dalam kehidupan sehari-hari sering diartikan tata krama, sopan santun, akhlak, budi pekerti. Di beberapa kitab hadis dan kitab-kitab lainnya tentang agama Islam, pengertian adab identik dengan etiket atau tata cara yang baik dalam melakukan sesuatu pekerjaan, baik ibadah maupun muamalah. Oleh karena itu, ulama menggariskan adab-adab tertentu dalam melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan hadis.

Melihat defenisi “*adab/addaba*” di atas, maka *al-Ta'dib* (تَأْدِيب) adalah proses mendidik dan melatih yang lebih tertuju pada pembinaan dan penyempurnaan tata krama, sopan santun, budi pekerti, dan akhlak anak dalam berbagai aspeknya, baik berkaitan dengan ibadah maupun muamalah.

Adapun istilah *muaddib*, secara terminologi adalah seorang yang bertugas untuk menciptakan suasana belajar dan pembelajaran yang dapat menggerakkan peserta didik untuk berperilaku atau beradab sesuai norma-norma, tata susila, dan sopan santun yang berlaku dalam masyarakat serta sesuai dengan tuntunan syariat. *Muaddib* sebagai guru lebih ditekankan pada mendidik seseorang agar memiliki adab yang baik, bertingkah laku sopan, dan berbudi pekerti.

E. SYARAH HADIS DENGAN PENDEKATAN ANALISIS MAUDHU'I

1. Konsep Guru Profetik

Setelah mengkaji beberapa teks dan konteks hadis Nabi Saw. tentang *term* guru, maka dapat disimpulkan bahwa Nabi Muhammad Saw. memiliki perhatian dan menempatkan pendidikan dalam posisi yang sangat sentral dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, sebagai bagian dari usahanya untuk menjalankan misi profetik, beliau menekankan pentingnya pendidikan bagi peningkatan sumber daya manusia.

Nabi Muhammad Saw. merupakan seorang guru yang berhasil mendidik para sahabat menjadi-manusia-manusia sukses. Tidak hanya dalam kehidupan duniawi, tetapi juga dalam kehidupan ukhrawi. Nabi Muhammad saw sangat memperhatikan dunia pendidikan dan mendorong umatnya untuk terus belajar adalah pengejawantahan dari aktualisasi diri guru profetik yang melaksanakan tugas sebagai “مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ”.

Atas dasar itulah, Syafi'i Antonio (2010: 17) menyatakan bahwa, Rasulullah Saw adalah guru pembelajar dan guru peradaban dunia. Meski tumbuh dikalangan yang minim praktek baca tulis, Rasulullah adalah pembelajar yang cepat. Ia belajar dari pasar, belajar dari sahabat-sahabat, belajar dari peristiwa, belajar dari perjalanan dagang, dan belajar dari alam. Beliau sosok yang cerdas dan *knowledgeable*. Nabi selalu tampil sebagai sosok yang mengajarkan ilmu dan urgensinya untuk mencapai kesuksesan dunia-akhirat dengan “*holistik learning method*” berbasis keteladanan.

Guru pembelajar bukan saja sebagai pemaknaan peran “*muallim*” di dalamnya, akan tetapi juga terintegrasi peran “*murabbi*”. Seorang guru pembelajar adalah seorang yang berupaya untuk memperluas pemahaman dan kesadaran dirinya tentang hakikat dirinya sendiri (*self awereness*), dunia sekitar

(*cosmo awereness*), kesadaran tentang Sang Pencipta (*Teo awareness*), dan relasi antara ketiganya (*relationship awareness*) ke tingkat yang lebih dalam dan yang lebih tinggi.

Upaya secara kontinyu untuk menumbuhkembangkan potensi diri dan potensi orang lain (peserta didik) secara kontinyu dan bersifat integralistik di dalam tiga dimensi di atas, adalah dimensi “*murabbi*” yang harus ditunjukkan oleh guru pembelajar dengan ikhlas, santun, sabar, dan penuh kearifan. Inilah hakikat makna dari hadis: “*كُونُوا رَبَّاتِيْنَ (حُلَمَاءَ حُكَمَاءَ فَهَمَاءَ)*”.

Peran profetik yang ditampilkan oleh Nabi Muhammad Saw sebagai guru dalam konteks “*muaddib*”, ditunjukkan beliau dalam mendidik sahabat-sahabat, kaum dan ummatnya dengan penuh kemandirian, kedisiplinan, keuletan, dan kesabaran. Beliau terlibat secara langsung dalam kegiatan pendidikan. Rasulullah Saw mengajarkan berbagai hikmah kepada para sahabat. Dengan kepiawaiannya dalam mengajar (*mu'allim*), mendidik (*murabbi*), dan menggembleg mentalitas para sahabat-sahabat (*muaddib*), maka lahirlah shabat-sahabat awal yang disebut sebagai generasi Islam terbaik.

Berdasarkan konsep guru di atas, maka mendidik dalam Islam bukanlah sekadar mentransfer ilmu pengetahuan (*knowledge*) dan informasi, tetapi lebih dari itu, mendidik adalah proses transformasi nilai (*values*) dan kearifan (*wisdom*) kepada setiap peserta didik. Mentransfer ilmu pengetahuan dapat dilakukan dengan memberikan penjelasan, keterangan yang menarik, dan contoh-contoh kongkret dan sederhana, sehingga peserta didik bisa memahami teori-teori yang diajarkan dengan mudah dan cepat.

Adapun mentransfer nilai, tidak bisa dilakukan dengan menghafal konsep-konsep nilai itu saja, tetapi perlu mengalaminya secara langsung dengan melibatkan seluruh aspek yang ada pada diri peserta didik, baik itu aspek sikap (afektif), aspek pengetahuan

(kognitif), maupun aspek keterampilan (psikomotorik). Transfer nilai membutuhkan suatu proses yang melibatkan pengalaman dan pembiasaan. Sebuah nilai baru akan “hidup” dalam diri seorang peserta didik jika ia telah mengalami nilai-nilai yang diajarkan tersebut secara berulang-ulang dalam konteks kehidupan yang nyata.

Kerangka penumbuhkembangan potensi, pengetahuan, nilai, dan *skill* setiap manusia tersebut, maka dibutuhkan profil guru pembelajar yang bervisi profetik, yaitu guru yang tampil menjadi sosok *mu'allim*, *murabbi*, dan *mu'addib* secara integralistik untuk menghantarkan peserta didik ke arah kemandirian dan kesempurnaan.

2. Kompetensi Guru Profetik

Salah satu aspek yang sering kali menjadi perhatian *stakeholders* pendidikan dewasa ini adalah persoalan kompetensi guru. Kompetensi merupakan kemampuan yang harus dipupuk dan dikembangkan secara terus menerus melalui berbagai proses pembelajaran, pengalaman, menekuni profesi dengan sungguh-sungguh.

Merefleksi sosok Nabi Muhammad Saw. sebagai guru peradaban dan berhasil menampilkan dirinya sebagai sosok guru yang berhasil, maka sangat penting mengkaji kompetensi yang melekat pada diri Nabi, yang penulis menyebutnya sebagai “Kompetensi Profetik”. Kompetensi profetik, adalah kompetensi yang digali dari dimensi kapasitas dan kapabilitas serta karakter yang melekat pada diri Nabi SAW dalam melaksanakan tugas dan fungsi pendidikan keumatan.

Beberapa hadis Nabi Saw. yang bermakna guru, baik redaksi hadis yang menggunakan terma *mu'allim*, *murabbi*, maupun *muaddib*, memiliki isyarat-isyarat kemampuan yang melekat pada diri guru. Kemampuan yang terkandung di dalam hadis tersebut menjadi syarat mutlak yang harus dimiliki oleh

seorang guru, baik ia sebagai *mu'allim*, *murabbi*, maupun *muaddib*.

Kompetensi guru dalam terma "*mu'allim*", jika dianalisis dari redaksi hadis yang dikemukakan, guru harus memiliki ilmu pengetahuan yang diajarkan serta mampu untuk merekonstruksi bangunan ilmu secara sistematis dalam pemikiran peserta didik dalam bentuk ide, wawasan, kecakapan, dan sebagainya yang ada kaitannya dengan hakikat sesuatu.

Sosok "*mu'allim al-khaer*" (مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ), adalah guru yang cukup berkompotensi dalam bidangnya dan mampu mengamalkan ilmu-ilmunya. Dengan kompetensi ini, maka *mu'allim* sebagai pendidik dalam pendidikan Islam memiliki kedudukan yang utama dalam mencerdaskan kehidupan umat dari kejahiliyahan.

Guru dalam konteks "*murabbiy*" adalah sosok guru yang memiliki tanggung jawab menumbuhkembangkan dan memelihara aspek jasmani dan rohani anak agar tetap terus berkembang sesuai dengan fitrahnya. Oleh karena itu, seorang guru harus berupaya mencontoh sifat-sifat Tuhan dalam proses "*mentarbiyah*" anak. Di antara kompetensi *murabbiy* dalam perspektif hadis yang harus melekat pada diri seorang guru adalah; penyayang, penyabar, ikhlas dalam mengajarkan ilmunya, ramah, santun, dan tidak pemaarah, berwawasan luas, kompeten, dan bersikap profesional. Adapun kompetensi guru dalam terma "*muaddib*", adalah sosok guru yang memiliki kompetensi berakhlak mulia, berbudi pekerti, disiplin, terampil, dan sebagainya.

Cakupan beberapa dimensi kompotensi guru yang terkandung di dalam hadis-hadis, baik dalam term *mu'allim*, *murabbi*, maupun *muaddib* di atas, pada prinsipnya relevan dengan pemetaan kompetensi pendidik yang diatur di dalam Undang-undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005 dan Peraturan

Pemerintah No. 19 Tahun 2005. Rumusan kompetensi guru tersebut sangat sinkron dengan tuntutan kompetensi yang termuat di dalam hadis-hadis Nabi Saw. Kompetensi guru yang termuat di dalam hadis, oleh penulis menyebutnya dengan istilah “*SAFT Competency* (Kompetensi SAFT)”. Kompetensi SAFT adalah singkatan dari “*Shidiq, Amanah, Fathanah, dan Tabligh*” (M. Furqon Hidayatullah).

Shidiq adalah sebuah kenyataan yang benar yang tercermin dalam perkataan, perbuatan atau tindakan, dan keadaan batinnya. Dalam konteks kepemilikan kompetensi guru, artinya adalah seorang guru harus membangun sistem keyakinan untuk merealisasikan visi, misi, dan tujuan pendidikan. Selain itu, memiliki kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, jujur, berwibawa, dan menjadi teladan bagi peserta didik, serta berakhlak mulia.

Amanah, adalah sebuah kepercayaan yang harus diemban dalam mewujudkan sesuatu yang dilakukan dengan penuh komitmen, kompeten, kerja keras, dan konsisten. Artinya, guru harus memiliki rasa tanggung jawab, kemampuan mengembangkan potensi secara optimal, kemampuan mengamankan dan menjaga kepercayaan, serta membangun kemitraan. Sedangkan *fathanah*, adalah sebuah kecerdasan, kemahiran, atau penguasaan bidang tertentu yang mencakup kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Di antara karakteristik guru yang memiliki kompetensi *fathanan* ini adalah, arif dan bijaksana, berintegritas, memiliki kesadaran untuk belajar sepanjang hayat, sikap proaktif mengembangkan diri, beriman dan bertakwa, kematangan emosi, unggul, dan selalu bekerja dengan baik dan menunjukkan yang terbaik, serta memiliki daya saing.

Sedangkan kompetensi *tabligh*, adalah sebuah upaya merealisasikan pesan dan misi tertentu yang dilakukan dengan pendekatan dan metode tertentu. Relevansinya dengan kompetensi, guru yang memiliki kemampuan merealisasikan pesan atau misi

pendidikan dan pembelajaran, memiliki kemampuan berinteraksi secara efektif, dan kemampuan menerapkan pendekatan, metode, strategi, dan media pembelajaran secara tepat dan efektif.

Sketsa sinkronisasi term *mu'allim*, *murabbiy*, dan *muaddib* dengan kompetensi SAFT serta kompetensi guru menurut UU Guru No. 14 Tahun 2005 dan PP No. 19 Tahun 2005, dapat dilihat pada tabel berikut:

Profil Guru	SAFT Competence	Kompetensi Guru
<i>Mu'allim Murabbiy Muaddib</i>	<i>Shiddiq</i>	1. Kepribadian 2. Sosial 3. Pedagogik
	<i>Amanah</i>	1. Kepribadian 2. Sosial 3. Profesional
	<i>Fathanah</i>	1. Kepribadian 2. Sosial 3. Profesional 4. Kepribadian
	<i>Tablig</i>	1. Sosial 2. Pedagogik

F. PENUTUP

Berdasarkan kajian yang berkaitan dengan *term* guru dalam perspektif hadis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Guru dalam perspektif hadis ditemukan beberapa istilah, di antaranya; *mu'allim*, *murabbiy*, dan *mu'addib*. *Muallim*, adalah seorang yang memiliki peran dan tanggung jawab mentransformasi ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi manusia dalam hidupnya di dunia dan di akhirat. *Murabbi*, adalah orang-orang yang disertai peran tanggung jawab membesarkan, menumbuhkan, mengembangkan, memelihara, mengasuh, mengawasi, dan membina anak, baik yang

mencakup aspek jasmaniah maupun rohaniyah. Sedangkan *muaddib*, adalah seorang yang bertugas untuk menciptakan suasana belajar dan pembelajaran yang dapat menggerakkan peserta didik untuk berperilaku atau beradab sesuai norma-norma, tata susila, dan sopan santun yang berlaku dalam masyarakat serta sesuai dengan tuntunan syariat.

2. Pengertian guru secara terminologi dalam perspektif hadis, adalah seorang yang disertai tugas, peran, dan tanggung jawab melakukan proses transformasi dan internalisasi ilmu pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kepada setiap anak (peserta didik) melalui kegiatan *ta'lim*, *tarbiyah*, dan *ta'dib* secara integratif.
3. Guru dalam perspektif hadis harus memiliki kompetensi, sebagai berikut: *mu'allim al-khair*, *rabbaniyyin* yang *hukama* dan *fuqaha*, serta *muaddib* yang *ihsan*. Kompetensi ini, pada prinsipnya pengejawantahan dari kepribadian *shidiq*, *amanah*, *fathanah*, dan *tablig* yang melekat pada diri Nabi Saw. Kompetensi ini secara umum disebut “Kompetensi Profetik” dan *SAFT Comptence* secara khusus.

Daftar Pustaka

- Abrasy, Muhammad Athiyah, *al-Tarbiyyah al-Islamiyah*. Kairo: Dar al-Fikr, 1984.
- Al-Bukhary, bin Ismail, Muhammad, *Shahih al-Bukhary*, Juz I. Kairo: Matba'ah Salafiyah wa Maktabatuha, t.th.
- Al-Darimi, Abu Muhammad, Abdullah ibn 'Abd al-Rahman, *Sunan al-Darimi*, Juz. I. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1407.
- Al-Mu'jam al-Wasith, *Kamus Arab*. Jakarta: Matha Angkasa, t.th.

- Antonio, Syafi'i, Muhammad, *Ensiklopedia Leadership Manajemen Muhammad SAW: The Super Leader Super Manager*. Jilid 5; Jakarta: Tzkie Publishing, 2010.
- Asfahani, Al-Raghib, *Mu'jam Mufradat Alfadz al-Qur'an*. Dar al-Katib al-Arabi, 1972.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, Jakarta: Bulang Bintang, 1991.
- Asqalani, Ibn Hajar, Syihabuddin, *Fathul Barry*. Dar-al-Taybah, t.tp., t.th.
- Asqalani, Ibnu Hajar, Syihabuddin, *Tahzib al-Tahzib*, Juz III. Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996.
- Ensiklopedi Al-Qur'an, Kajian Kosakata dan Tafsirnya*. Jakarta: Yayasan Bimantara, 1997.
- Ensiklopedi Islam*, Jilid 2, Jakarta: Van Hoeve Ichtiar baru, 1977
- Hidayatullah, M. Furqon, *Guru Sejati: Membangun Insan Berkarakter Kuat dan Cerdas*. Surakarta: Yuma Pustaka, 2009.
- Ibnu Majah, Muhammad, ibn Yazid al-Qqazwini, Abu Abdillah, *Sunan Ibn Majah*, Juz. I. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Imarah, Muhammad, *al-'Amalul Kamilah*. Cairo: Dar al-Kutub, 1998.
- Muhamemin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Munawwir, A, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Kamus Lengkap*. Yogyakarta, tth.

- al-Nahlawiy, Abdurrahman, *Ushul al-Tarbiyah al-Islamiyah wa Asalibuha fi al-Bait wa al-Madrasah wa al-Mujtama*. Kairo: Dar al-Fikr, tth.
- Nizar, Samsul, *Dasar-Dasar Pemikiran Pendidikan Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Rahman, Fachtur, *Ikhtisar Mushtalahul Hadis*. Bandung: PT Ma'arif, 1997.
- Rahmat, Jalaluddin, *Islam Alternatif*. Bandung: Mizan, 1991.
- Rahmi, Yulia, *Makna Khair dalam Al-Qur'an*. Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, Vol.2
- Sulaiman, Noor, *Antologi Hadits*. Jakarta: GP Press, 2008.
- Suwaed, Abd. Hafid, Muhammad Nur, *Manhaj al-Tarbiyah al-Nabawiyah li-al-Tifl*. Beirut: Dar Ibn Katsir, 1433 H/2012 M.
- al-Suyuti, bin Abu Bakar, Abdurrahman, Jalaluddin, *Tadrib al-Rawiy fi Syarh Tarqin al-Nawawi*, Jilid II. Cet. II; Beirut Dar Ihya al-Sunnah al-Nabawiyah, 1979.
- al-Syaukani, Muhammad bin Ali, *Fathul Qadir*. Kairo: Musthafa al-Babiy al-Halabiy, 1964.
- al-Turmudzi, Isa, Abu 'Isa Muhammad ibn, *Sunan al-Turmuzi*, Juz. V. Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-'Arab, t.th.
- Ulwan Nashih, Abdullah, *al-Tarbiyah al-Aulad fi al-Islam*, Juz II. Kairo: Dar al-Fikr, 1988.
- Undang-undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005.

Wensinck, A.J., *al-Mu'jam al-Mufahras li alfadz al-Hadis al-Nabawiy*, Juz I, IV, V. Leiden: E.J. Brill, 1965.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990.

INTERKONEKSITAS STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) DAN SAINS

3

A. PENDAHULUAN

Diskursus integrasi-interkoneksi sejak kemunculannya sejak awal tahun 70-an hingga dewasa ini kian gencar diperbincangkan. Berbagai seminar dan diskusi telah banyak dilakukan dalam upaya menemukan formulasi yang tepat untuk menggeser kajian integrasi-interkoneksi ilmu ini dari sebuah konsep atau paradigma menuju implementasi-aplikatif di lembaga pendidikan Islam.

Upaya untuk melakukan integrasi-interkoneksi ilmu pengetahuan secara terus menerus dianggap urgen dan merupakan suatu keniscayaan sejarah, karena pada masa keemasan Islam tidak dikenal adanya dikotomi atau pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum. Cendekiawan-cendekiawan muslim ketika itu selain menguasai ilmu agama, juga menguasai ilmu umum (Jasa Ungguh Muliawan, 2005:7).

Realitas sekarang ini menunjukkan bahwa dikotomi ilmu pengetahuan telah memberi dampak yang sangat serius terhadap perkembangan peradaban manusia. Peradaban manusia yang semakin modern atas dukungan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menghilangkan sakralitas alam raya karena selalu ditundukkan oleh kedigdayaan iptek yang berporos pada rasionalitas.

Realitas alam yang oleh doktrin-doktrin agama selalu dikaitkan dengan selubung metafisika dan kebesaran Sang Pencipta, cenderung hanya dipahami semata-mata sebagai benda

otonom yang tidak ada kaitannya dengan Tuhan. Dunia materi dan non materi, agama dan sains, dipahami secara terpisah (dikotomik), sehingga kemajuan iptek tampak bebas nilai karena dipisahkan dari sentuhan nilai-nilai yang bersifat transendental-*ilahiyah*.

Dikotomi keilmuan ini juga berimplikasi luas terhadap dunia pendidikan. dalam praktik pendidikan terdapat lembaga pendidikan agama dan pendidikan umum. Pendidikan agama mengajarkan berbagai aspek yang berkaitan agama, sementara pendidikan umum mengajarkan berbagai aspek yang berhubungan dengan lingkungan alam, manusia dan fenomenanya. Di perguruan agama lebih berkembang *'ulum al-din* dari pada *'ulum al-dunya*. Dikotomi *islamic studies* (ilmu agama) dengan ilmu-ilmu umum (*science*) ini, pada akhirnya berdampak pada semakin tercerabutnya moralitas agama, terutama dalam pengembangan dan pendayagunaan sains modern. Situasi inilah yang mengilhami sejumlah intelektual muslim agar pola keilmuan yang parsialistik diganti dengan pola integralistik. Bahkan, tidak hanya berhenti pada “pengintegrasian” namun juga dibarengi dengan “interkoneksi”.

Paradigma integrasi dapat dipahami dalam bentuk hubungan keterpaduan antara elemen-elemen sains dan agama dalam sebuah realitas, sedangkan interkoneksi dapat dipahami sebagai sebuah bentuk hubungan saling mengisi dan melengkapi antara elemen-elemen sains dan agama. Interkoneksi ini dilakukan ketika tidak ditemukan ruang untuk melaksanakan integrasi antara sains dan agama dalam perspektif metodologi dalam kajian sains dan agama (Amril M, 2016: 33). Dengan demikian, interkoneksi pada prinsipnya adalah usaha memahami setiap bangunan keilmuan, baik keilmuan agama, sosial, humaniora, maupun kealaman tidak dapat berdiri sendiri tanpa kerja sama, saling tegur sapa, saling membutuhkan, saling koreksi, dan saling berhubungan antar disiplin keilmuan (Amin Abdullah: 2010).

Oleh karena itu, di dalam tulisan ini secara spesifik mengkaji dimensi interkoneksi studi Pendidikan Agama Islama (PAI) dan sains.

B. PARADIGMA INTERKONEKSITAS AGAMA DAN SAINS

Dalam perspektif dunia ilmu kontemporer saat ini, sudah muncul kesadaran bahwa agama dan sains tidak lagi dilihat sebagai dua entitas yang berseberangan, tetapi saling bersinggungan dalam upaya memahami dan membangun koherensi dan korespondensi pemahaman tentang realitas dan tatanan alam jagat raya.

Upaya untuk membangun adanya persinggungan, dialogis dan relasi antara agama dan sains sebagaimana yang diinginkan oleh sebagian para cendekiawan akhir-akhir ini, sesungguhnya bukan tanpa dasar-dasar metodologis yang kuat dan rasional, melainkan atas dasar teori-teori ilmu pengetahuan yang telah banyak diterima di kalangan para filosof ilmu pengetahuan akhir-akhir ini. Di antara pendapat mereka adalah bahwa secara metodologis antara produk pencarian akal budi manusia dan pesan-pesan agama memiliki tujuan yang sama. Karakteristik yang ada pada agama sebagian menjadi inspirator keberlangsungan penyelidikan ilmiah yang dilakukan oleh para saintis.

Atas dasar asumsi itulah sehingga beberapa dekade terakhir telah muncul sikap dan pandangan yang optimistis adanya persinggungan dan saling melengkapi antara agama dan sains. Saling kerjasama sains dan agama ini dimaksudkan sebagai upaya merekonstruksi pemahaman terhadap realitas yang dikaji dengan tujuan pencapaian pemahaman yang lebih komprehensif sehingga misi ilmu pengetahuan dan agama dapat memberi manfaat pada kehidupan manusia yang didasari oleh keyakinan ontologis yang kuat adanya Zat Yang Maha Pencipta dan Maha Kuasa.

Paradigma integrasi-interkoneksi, menjadi kata kunci sekaligus sebagai wujud formulasi keniscayaan relasi sains dan agama. Integrasi menghendaki adanya hubungan, penyatuan, sinkronisasi, saling menyapa atau kesejajaran antar tiap bidang keilmuan yang ada. Setiap bidang keilmuan tidak dapat berdiri sendiri, tanpa saling menyapa dengan bidang keilmuan yang lain. Sementara interkoneksi menghendaki adanya *intersection* (persinggungan) antar setiap bidang keilmuan tersebut (Imam Machali, 2014: 111). Integrasi dan interkoneksi ini, merupakan faktor penting untuk membuka ruang bagi agama dan sains atau akal dan wahyu agar saling bersinergi. Sinergitas keduanya akan dapat menjawab problem dikotomis keilmuan saat ini.

Secara paradigmatik, upaya interkoneksi antara sains dan agama tersebut, menurut John F. Haught (2004: 64) ada empat fase, yaitu: *Pertama*, paradigma konflik beranggapan bahwa sains dan agama memiliki hubungan yang saling bersilangan dengan agama. Keduanya memiliki proses saling menegasikan. *Kedua*, paradigma kontras berpandangan bahwa dua hal ini memiliki otonominya sendiri-sendiri. Ada wilayah agama dan ada wilayah sains. Konflik bisa terjadi ketika keduanya dilakukan proses dialog. *Ketiga*, paradigma kontak bahwa ada otonomi agama dan sains, namun ada dimensi tertentu yang keduanya saling bertemu. *Keempat*, paradigma konfirmasi menyatakan bahwa antara sains dan agama bisa saling mengisi. Ada riset yang dibangun di atas keyakinan agama dan sebaliknya keyakinan agama juga bisa dikembangkan karena produk sains.

Ian G. Babour mengemukakan rasionalitas keniscayaan integrasi-interkoneksi antara sains dan agama didasarkan pada argumentasi paradigmatik, sebagai berikut: *Pertama*, adanya keparalelan yang signifikan dalam aspek metode sains dan agama. Keparalelan ini setidaknya ditemukan adanya beberapa persamaan dalam wilayah interaksi pengalaman dan interpretasi, penggunaan model dan analogi. *Kedua*, kesamaan pada upaya pencarian sebuah

pandangan dunia yang terintegrasi yakni sebuah pandangan yang berbasis satu dunia (*a single word*) sebagaimana banyak dimungkinkan oleh para ilmuwan kontemporer saat ini. *Ketiga*, munculnya apa yang disebut dengan *a theology of nature*, yakni suatu pandangan bahwa alam jagat raya sebagai objek kajian sains sesungguhnya merupakan bagian dari interpretasi historisitas wahyu dan pengalaman agama umat manusia yang memang dapat dijangkau oleh kajian sains (Ian G. Barbour, 1971:6).

Di Indonesia, beberapa perguruan tinggi Islam telah memiliki paradigma masing-masing dalam membangun integrasi dan interkoneksi antara sains dan agama. UIN Syarif Hidayatullah mengembangkan paradigma integrasi ilmu. UIN Sunan Gunung Djati Bandung mengembangkan paradigma “roda keilmuan” sebagai simbol persentuhan antara sains dan agama, wahyu memandu ilmu. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengembangkan paradigma “jaring laba-laba” keilmuan teoantroposentrik-integralistik dengan pendekatan interdisipliner melalui integrasi dan interkoneksi sains dan agama. UIN Syekh Maulana Malik Ibrahim Malang dengan paradigma interdisipliner sains dan agama melalui konsep “pohon ilmu”. UIN Alauddin Makassar dengan paradigma “sel cemara” sebagai simbol integrasi dan interkoneksi sains dan ilmu agama.

Paradigma keilmuan yang ditampilkan oleh lima UIN di atas menunjukkan konsep dan label yang bervariasi, namun sesungguhnya ada muatan atau *core* yang sama dalam memandang relasi antara ilmu alam dan ilmu sosial-humaniora, yaitu keinginan untuk membangun interkoneksi atau interrelasi, dan sinergitas bidang ilmu-ilmu tersebut dengan agama. Selain itu, semuanya didasari oleh semangat yang sama untuk menjadikan al-Qur’an sebagai fondasi pengembangan ilmu (sains).

Uraian di atas menunjukkan bahwa cara pandang dunia khususnya dari para ilmuwan saat ini berada dalam cara pandang yang integrasi-interkoneksi, di mana sains dan agama lebih

dipahami sebagai saling mengisi dan berdialog. Oleh karena itu, sains dan agama sebagai dua entitas sesungguhnya tidak dapat dipisahkan. Dalam kehidupan, sains dan agama tidak dapat dikotak-kotakkan secara kategoris, karena dua bidang ini dalam kehidupan nyata tidak dapat dipisah dan dipilah apa lagi mengorbankan yang satu dengan yang lainnya. Keduanya berada dalam eksistensialitas manusia yang saling interrelasi sebagai wujud karakteristik internal manusia, yakni religius sekaligus rasional, fisik sekaligus spiritual, personal sekaligus sosial.

C. PERSPEKTIF NORMATIF-TEOLOGIS DAN FILOSOFIS INTERKONEKSITAS AGAMA DAN SAINS

1. Perspektif Normatif-Teologis

Perspektif normatif teologis adalah suatu cara pandang dalam memahami sesuatu berdasarkan perspektif wahyu, atau cara pandang sesuatu berdasarkan perspektif Tuhan dalam batas-batas yang dapat dipahami manusia. Perspektif ini membangun komitmen dan melihat sesuatu dengan sudut pandang yang ideal sebagaimana dikehendaki oleh Tuhan dalam firman-firman-Nya (Abuddin Nata, dkk., 2015: 49). Dengan demikian, dimensi normatif teologis dalam konteks ini adalah pijakan yang digunakan dalam memahami dan menganalisa adanya keniscayaan interkoneksi antara sains dan agama dalam sudut pandang ilmu pengetahuan.

Dalam perspektif Islam, integrasi dan interkoneksi keilmuan memiliki landasan normatif teologis yang sangat kuat. Landasannya, dapat dilihat, di antaranya pada Q.S. Al-‘Alaq [96]: 1-5). Tema utama ayat ini adalah pengajaran kepada Nabi Muhammad Saw. serta penjelasan tentang Allah dalam sifat dan perbuatan-Nya, dan bahwa Dia (Allah) adalah sumber ilmu pengetahuan. Allah mengajar manusia melalui dua cara, yakni

melalui pena yang harus dibaca manusia, dan melalui pengajaran langsung kepada manusia (Quraish Shihab, 2000: 391).

Q.S. Al-‘Alaq [96]:1-5 menegaskan bahwa Allah adalah sumber mutlak ilmu pengetahuan, dan pengetahuan terdiri atas pengetahuan langsung yakni wahyu dan pengetahuan yang diperoleh manusia dari hasil kajiannya sendiri melalui akal pikirannya sendiri. Pengetahuan wahyu berupa ajaran agama yang bersumber dari ayat *qailuayah*, dan pengetahuan akal berupa ilmu pengetahuan yang bersumber dari ayat *kauniyah*. Kedua sumber ilmu pengetahuan ini, harus dibaca dan dipelajari oleh manusia.

Dalam terminologi yang lain, Allah Swt. secara implisit menunjukkan kekuasaan-Nya melalui dua “sandi” besar, yaitu sandi *qauliyah* dan sandi *kauniyah*. Sandi *qauliyah* dapat diperoleh dengan mempelajari al-Qur’an, sedangkan sandi *kauniyah* dipelajari dengan mencermati fenomena, baik fenomena alam maupun fenomena sosial. Allah Swt memberikan ilmu pengetahuan dari kedua sandi besar ini yang keduanya saling menegaskan dan saling terkait satu sama lainnya.

Hasil pembacaan, pengkajian, dan penelitian manusia dari kedua sumber ilmu pengetahuan inilah yang kemudian melahirkan dua istilah kategori ilmu pengetahuan, yakni ilmu agama dan ilmu umum, agama dan sains dengan berbagai cabang-cabangnya. Ilmu-ilmu tersebut seluruhnya bersumber dari Allah Swt. Para ilmuan dari berbagai disiplin ilmu hanyalah “penemu” dan bukan pencipta ilmu, karena pencipta ilmu adalah Allah, Tuhan Yang Maha ‘Alim.

Allah Swt. memberikan ilmu pengetahuan dari kedua sandi besar ini yang keduanya saling menegaskan dan saling terkait satu sama lainnya. Hal ini membuktikan bahwa keseluruhan konstruksi temuan keilmuan (agama dan sains) yang bersumber dari kedua sandi besar (*qauliyah* dan *kauniyah*) saling menegaskan dan saling terkait, tersadurkan secara utuh dan menyatu, baik secara informatif, konfirmatif maupun saling korektif tanpa memutuskan mata rantai sumber fundamentalnya. Hal ini membuktikan bahwa

kemampuan manusia untuk memahami keduanya secara integral-interkonektif adalah sebuah keniscayaan. Allah tidak sekedar memahami ayat-ayat Allah berupaya *qauliyah*, tetapi juga untuk melihat (membaca) fenomena alam.

Alam adalah ayat Allah yang tidak tertuang dalam bentuk perkataan untuk dibaca dan dihafal. Tetapi alam adalah ayat Allah yang semestinya dieksplor dan dikaji sedalam-dalamnya untuk mendekatkan manusia pada tingkat kesadaran kemahakuasaan Allah swt. sehingga seluruh bentuk capaian ilmu pengetahuan yang dihasilkan, pengembangan dan pendaayagunaannya dalam kehidupan manusia “tidak bebas nilai”.

Dengan demikian, al-Qur’an yang merupakan dasar normatif teologis bagi pengembangan ilmu pengetahuan sesungguhnya telah mengusung ide “integrasi dan interkoneksi” antara agama dan sains. Hubungan keduanya, meskipun memiliki sisi yang berbeda namun keduanya tidak dapat dipisahkan.

2. Perspektif Filosofis

Secara filosofis, interkoneksi keilmuan (sains dan agama) memiliki dasar yang kuat, meskipun harus diakui bahwa dalam perkembangannya, antara sains dan agama saat ini masih ada yang menempatkan pada posisi berlawanan dan seakan sulit dipertemukan. Namun demikian, perbedaan dan persilangan tersebut masih dapat diatasi dengan menemukan basis yang sama di antara keduanya. Filsafat sebagai “*the mother of science*” dapat mempertemukan antara sains dan agama. Untuk mempertemukan keduanya dapat dilakukan melalui pendekatan filosofis, yaitu melihat dari sudut pandang ontologis, epistemologis, dan aksiologisnya.

Secara ontologis bahwa segala realitas wujud (eksistensi) pada dasarnya adalah satu. Kesatuan itu digambarkan sebagaimana matahari dan sinarnya. Oleh karena wujud merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, maka tentu agama dan sains juga

merupakan kesatuan (Mulla Sadra: 2004). Logika-filosofinya adalah *asma al-husna* “*al-‘Alim*”. Artinya, secara ontologis Tuhan dan Ilmu adalah identik. Kalau Allah adalah “Ilmu” itu sendiri bagaimana mungkin ilmu itu terpisah dari agama.

Basis ontologis integrasi-interkoneksi ilmu adalah bahwa sumber dari segala wujud ilmu adalah Allah yang *al-‘Alim*. Ilmu dalam konteks ini tentu bukanlah kreasi Tuhan, karena ilmu adalah bahagian dari Tuhan itu sendiri. Kalau ilmu merupakan kreasi Tuhan, dan atau terpisah dari Tuhan, berarti ada suatu masa Tuhan ada tetapi tidak ada ilmu, karena itu Tuhan dan ilmu adalah sesuatu yang menyatu. Ilmu Tuhan sudah dideskripsikan di alam semesta ini dan manusia diizinkan dan bahkan diperintahkan untuk mengkesplorasi (membacanya). Ayat-ayat *qauliyah* dan ayat-ayat *kauniyah*, keduanya merupakan ilmu Allah (Mulyadi Kartanegara, 2000:27). Ilmu agama implikasi dari kajian ayat-ayat *qauliyah* (*qur’aniyah*) dan sains sebagai implikasi kajian terhadap ayat *kauniyah*.

Dengan demikian, agama dan sains tidaklah bersifat eksklusif melainkan saling interkoneksi antara satu dengan yang lainnya. Penjelasan ini menunjukkan bahwa secara ontologis agama dan sains adalah *identical-integrated* atau *integratif-interdependentif*. Pemilahan atau pembedaan kedua jenis ilmu ini tidak menunjukkan bahwa ilmu *qauliyah/naqliyah* adalah ilmu Tuhan dan *kauniyah/’aqliyah* adalah ilmu sains yang mutlak berasal dari manusia, tetapi konsep *qauliyah/naqliyah* dan *kauniyah/’aqliyah* hanyalah merupakan konsep epistemologis.

Secara umum, epistemologi berkaitan dengan *theory of knowledge* dengan pertanyaan pokoknya apa yang dapat diketahui dan bagaimana cara mengetahuinya. Pertanyaan pertama berkaitan dengan sumber atau dari mana ilmu itu diperoleh dan pertanyaan kedua berkaitan dengan metodologi, atau bagaimana cara memperoleh pengetahuan itu (O’Connor and Carr, 1982: 2).

Dalam perspektif Islam, ada tiga model epistemologi kelimuan, yakni; *bayani* (analisis teks), *burhani* (rasionalisme), dan *irfani* (intuisi). Selain itu, para pemikir Islam juga membagi pengetahuan menjadi dua, yakni: *Pertama*, pengetahuan berdasarkan korespondensi atau representasi, disebut juga pengetahuan capaian atau *ilmu husuli*, dan *Kedua*, pengetahuan presensial atau *ilmu huduri* (Sayyed Hussein Nasr, 2003: 913).

Secara konsep epistemologi Islam ini, maka akan melahirkan konsep ilmu dan agama yang integral-interkonektif secara komplementer. Sumber kebenaran tidak hanya indra dan rasio melalui pengalaman empirik dan penalaran rasional, namun juga intuisi dan wahyu. Dengan demikian, konsepsi epistemologi ini juga berkorekuensi logis dalam memberikan bangunan aksiologis interkoneksi agama dan sains.

Perbincangan utama pada tataran aksiologis adalah kajian tentang tujuan-tujuan dan dimensi nilai dari pengembangan keilmuan dan aplikasinya dalam diri dan kehidupan secara sosial. Dalam konteks integratif-interkonektif keilmuan dalam Islam, secara aksiologis memandang nilai-nilai kebenaran, kebaikan, keindahan, dan keilahian secara simultan terkait satu sama lain dan dijadikan sebagai landasan dalam pengembangan ilmu.

Setiap aktivitas pengembangan ilmu menekankan pertimbangan nilai-nilai (kebenaran dan kebaikan), baik itu berasal dari pikiran logis manusia maupun yang bersumber dari wahyu. Integratif-interkonektif seperti ini akan mengantarkan para ilmuwan itu sendiri untuk mengembangkan dan mendayagunakan ilmu pengetahuan untuk kemanfaatan dan kemaslahatan bagi kehidupan secara bertanggungjawab, baik posisinya sebagai *'abid* (hamba) maupun sebagai *khalifah fi al-ardh*.

D. INTERKONEKSITAS STUDI ISLAM DAN SAINS DALAM KONTEKS PENDIDIKAN ISLAM

Menurut al-Kailani, jika dicermati kajian-kajian pendidikan Islam yang ada maka sebagian besar di antaranya tampak masih bercorak diskriptif, normatif, dan adoptif serta dalam bayang-bayang “*Barat sentris*” atau sebaliknya, “*Salaf sentris*” (Majid Irsan al-Kailani, 1988: 67). Walaupun pendidikan Islam masa lalu mempunyai pengalaman melakukan proses adopsi terhadap filsafat dan sains Yunani dengan terma-termannya sendiri. Tetapi pendidikan Islam menghadapi sains-sains Barat modern berada pada posisi yang tak menguntungkan secara psikologis maupun intelektual karena dominasi politik, agresi ekonomi dan hegemoni intelektual Barat.

Akibatnya, harapan untuk membawa semangat sains modern yang memiliki pandangan yang minus terhadap agama tidak terintegrasi dan terinkoneksi dengan baik pada sistem pendidikan Islam. Pada titik inilah kemudian terjadi dikotomisasi antara bidang agama dan sains modern di dunia pendidikan Islam. Implikasinya adalah menimbulkan kerugian di antara keduanya karena tidak adanya integrasi dan interkoneksi secara timbal balik, sehingga pendidikan Islam mengalami berbagai krisis, diantaranya krisis konseptual, kelembagaan metodologi atau pedagogik, dan krisis orientasi. Pendidikan Islam mengalami degradasi fungsional yang dinilai jauh lebih akut dibandingkan dengan hal serupa yang dialami oleh sistem pendidikan umum yang tidak secara lugas memasukkan dimensi keagamaan (Mahmud Arif, 2008: 230).

Kaitannya dengan interkoneksi agama dan sains, yang dibutuhkan pendidikan Islam saat ini adalah sistem pendidikan yang berbasis interkoneksi agama dan sains. Paradigma interkoneksi ini sudah waktunya dikembangkan pada abad modern ini sebagai proptotipe kebangkitan peradaban baru yang akan menggeser peradaban saat ini yang terdegradasi nilai. Dengan sistem pendidikan yang interkoneksi dimana kurikulum yang

diajarkan merupakan persentuhan secara dialogis secara utuh antara nilai wahyu dan sains. Dengan demikian, para alumni pendidikan Islam mampu menjabarkan kaedah-kaedah sains dan agama dalam bentuk cara berfikir dan tingkah laku (*akhlak*) secara terpadu (*integrated*) dan menyeluruh (holistik) di masyarakat dalam tatanan kehidupan yang beriptek dan berimtak.

Interkoneksitas antara agama dan sains dalam lembaga pendidikan Islam merupakan salah satu alternatif untuk membenahi problem dikotomis keilmuan dan berbagai implikasinya. Adanya perpaduan sekaligus keterkaitan antara berbagai disiplin ilmu tersebut diharapkan menjadi sebuah model pendidikan yang dapat mengatasi berbagai problem kehidupan modern.

Oleh karena itulah, salah satu tujuan awal adanya upaya konversi dari IAIN ke UIN beberapa dekade terakhir ini adalah sebagai langkah dan upaya solutif mengatasi problem dikotomis dan dualisme sistem pendidikan dengan melakukan interkoneksi antara Ilmu Pengetahuan Alama (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan Humaniora yang dikelola oleh Kemendikbud. dengan studi-studi Islam seperti, ushuluddin, syari'ah, adab, dakwah, dan tarbiyah yang dikembangkan oleh Kemenag (Sutrisno, 2015: 25).

Pada tingkat sekolah dan madrasah, interkoneksitas studi Islam (materi-materi PAI) dengan disiplin ilmu-ilmu lain (sains) secara praktis-implementatif harus menjadi visi-misi yang terjabarkan di dalam keseluruhan komponen pendidikan, baik komponen tujuan, isi/materi, proses, maupun evaluasi pendidikan dan pembelajaran. Sehingga, dengan interkoneksitas antara studi Islam (PAI) dan sains tersebut tidak lagi sebagai *single entity*, tidak pula keduanya sebagai *isolated entities*, tetapi keduanya sebagai *interconnected entites* (Sutrisno: 2015).

Interkoneksitas studi PAI dan sains ini, sangat relevan dilakukan sebagai upaya rekonstruksi pendidikan dan pembelajaran di lembaga pendidikan Islam yang non dikotomik.

Menurut Syaifuddin Sabda, dalam tataran praktis, proses interkoneksi studi PAI dan sains dapat dilakukan dalam tiga bentuk, yaitu: *Pertama*, dengan cara materi PAI diperkaya dengan informasi yang dimiliki oleh disiplin ilmu lain sehingga wawasan guru atau dosen serta peserta didik semakin luas. Semisal agama yang bersifat normatif perlu diperkaya dengan konsep ilmu alam, sosial, dan humaniora, begitu pula sebaliknya. *Kedua*, dengan cara memadukan atau menghubungkan konsep dan nilai-nilai agama dengan sains. Model pemaduannya dapat dilakukan baik dalam bentuk apologetik, islamisasi sains, ataupun dengan cara pembentukan sains Islami. *Ketiga*, dengan cara melakukan hubungan timbal balik, baik dengan pendekatan konfirmatif maupun korektif.

Reorientasi pendidikan dan pembelajaran yang berparadigma interkoneksi ini, sangat urgen untuk menghilangkan dikotomisasi antara agama dan sains dalam rangka membangun harmoni yang *par excellence* antara ruh spiritualitas agama dan sains modern. Selain itu, pendekatan interkoneksi studi PAI dalam pembelajaran PAI dengan ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial membawa pada pandangan yang komprehensif tentang implementasi paradigma integrasi-interkoneksi kepada ranah yang aplikatif, khususnya dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) baik di sekolah, madrasah, maupun di perguruan tinggi.

E. PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) BERBASIS INTERKONEKSI SAINS

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagai muatan pembelajaran di sekolah, madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi perlu memuat pendekatan dan paradigma interkoneksi, sehingga proses pembelajaran yang disampaikan oleh guru maupun dosen menjadi utuh, dan tidak saling memisahkan antara satu ilmu dengan ilmu yang lain. Pendidikan Agama Islam tidak lagi sekedar normatif tapi juga saintifik.

Relevan dengan paradigma pembelajaran PAI berbasis interkoneksi sains, Abdul Rahman Assegaf (2014) mengemukakan lima tingkatan interkoneksi dalam pembelajaran PAI, sebagai berikut:

1. Interkoneksitas tingkat filosofis

Tingkat filosofis dalam interkoneksi sains-sosial dalam pembelajaran PAI dimaksudkan bahwa setiap kajian harus diberi nilai fundamental dalam kaitannya dengan disiplin keilmuan lainnya dan dalam hubungannya dengan nilai-nilai humanistik. Mengajar materi Fiqh, misalnya, di samping makna fundamentalnya sebagai filosofi membangun hubungan antar manusia, alam, dan Tuhan dalam ajaran Islam, dalam pengajaran Fiqh harus juga ditanamkan pada peserta didik bahwa eksistensi Fiqh tidaklah berdiri sendiri, melainkan berkembang bersama disiplin keilmuan yang lainnya seperti, sosiologi, psikologi, kedokteran, dan lain sebagainya.

2. Interkoneksitas tingkat metode dan pendekatan riset (Studi)

Metodologi di sini adalah metodologi yang digunakan dalam pengembangan ilmu bersangkutan (PAI). Misalkan dalam perkuliahan Ilmu Pendidikan Islam (IPI), metodologi dan pendekatan yang digunakan adalah pengalaman empiris mahasiswa selama studi dengan jalan mengamati kegiatan lembaga pendidikan Islam. Sedangkan matakuliah Filsafat Pendidikan Islam (FPI) menerapkan pola berpikir deduktif, yang berangkat dari kebenaran yang ada dalam Islam, kemudian dilihat dari fenomena-fenomena yang ada dalam sosial, humaniora dan alam. Juga pola berpikir induktif, artinya berbagai kasus-kasus pendidikan ditarik hubungannya dengan norma-norma yang ada di dalam Islam.

3. Interkoneksi tingkat materi

Tingkat materi merupakan suatu proses bagaimana menginterkoneksi nilai-nilai kebenaran universal umumnya dengan kajian keislaman khususnya ke dalam sains-sosial seperti fisika, kimia, biologi, sosiologi, antropologi, hukum, politik, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Sebaliknya, mempertemukan ilmu-ilmu umum tersebut ke dalam kajian keislaman, dengan jalan memadukannya melalui epistemologi dan aksiologi (Pokja Akademik: 2006). Sebagai contoh, mengajar ilmu falak untuk proses isbat guna menentukan awal puasa atau hari raya haruslah didukung dan dikaitkan dengan ilmu astronomi. Mengajar fiqh puasa misalnya, perlu juga mengenalkan hubungannya dengan ilmu kesehatan dan psikologi.

4. Interkoneksi tingkat strategi

Jika tingkat materi menunjukkan pada konten isi atau bahan yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran, maka tingkat strategi merupakan tahapan pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan berbagai model, metode, dan strategi pembelajaran. Pembelajaran dengan model *active learning* dengan turunan berbagai macam metode, teknik, dan taktik pembelajaran adalah perlu dipilih dan dipraktikkan oleh guru-dosen pada saat proses pembelajaran berlangsung.

5. Interkoneksi tingkat evaluasi

Tingkat evaluasi dilakukan setelah seluruh proses pembelajaran PAI selesai, agar diketahui berapa besar keberhasilan dan kegagalan, keunggulan dan kelemahan, serta bagian mana yang perlu remedial. Tingkat evaluasi tidak bisa diabaikan karena proses pembelajaran tidak dapat diketahui hasilnya tanpa evaluasi. Evaluasi pembelajaran PAI pada akhirnya perlu dievaluasi untuk mengukur ketercapaian tujuan dari pembelajaran berbasis interkoneksi diinginkan.

Kelima tingkat interkoneksi ini dapat dilakukan secara simultan dan sinergis agar tiap level juga mengalami keterpaduan atau keterhubungan (interkoneksi). Interkoneksi keilmuan dilakukan pada pembelajaran PAI yang dikaitkan dengan sains-sosial atau sebaliknya pembelajaran sains-sosial yang berintegrasi dengan keilmuan Islam. Sehingga pada akhirnya dikotomi keilmuan yang cenderung dapat merusak keseimbangan peradaban bisa dihindarkan.

Pemahaman yang dihasilkan dari pembelajaran PAI interkoneksi akan menggiring peserta didik pada belajar secara totalitas, dan menjadikan PAI sebagai bagian dari kehidupan nyata (*real life*) yang dibutuhkan secara aktual dan kontekstual dalam kehidupan. Hal ini tidak akan terjadi jika pemahaman terhadap PAI secara isolatif atau terpisah dengan keilmuan lain, di mana kondisi ini jelas dapat menimbulkan kesan bahwa agama hanya berurusan dengan ketuhanan dan akhirat, sementara ilmu-ilmu modern berkaitan dengan manusia dan kehidupan di dunia. Kekhawatiran terhadap dampak pemisahan ilmu tersebut dapat dihindari melalui proses pembelajaran yang berbasis interkoneksi (Muslih Hadayat: 2000).

Eksistensi pembelajaran PAI maupun pembelajaran ilmu-ilmu lainnya dalam pusan Kurikulum 2013 saat ini, sesungguhnya menjadi peluang untuk melakukan penguatan pembelajaran berbasis interkoneksi. Alasannya, Kurikulum 2013 menempatkan afektif (sikap spiritual dan sosial) sebagai dasar aspek kognitif (pengetahuan) dan psikomotorik (keterampilan).

Bahkan secara prinsipil, Kurikulum 2013 secara eksplisit menempatkan domain afektif sebagai basis kompetensi lain misalnya, *knowledge*, *knowledge how*, *science* dan *skills*. Karakteristik dasar lain Kurikulum 2013 adalah berangkat dari sistem nilai, kompetensi, sikap, keterampilan pengetahuan, aktualisasi, internalisasi, refleksi, karakter dan perilaku yang

berujung pada sikap produktif, inovatif dan peduli serta bermoral (Nasiruddin, 2013:179).

Selain itu, penekanan proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik (*scientific approach*) serta perlunya penguatan materi pengayaan akan menjadi ruang pemuatan mata pelajaran PAI diperkaya dengan wawasan sains-sosial. Begitu pula sebaliknya, muatan materi pelajaran lain akan diinterkoneksi dengan nilai-nilai moral agama yang merupakan bagian penting dalam pendidikan agama itu sendiri. Dengan pengembangan pembelajaran PAI berbasis interkoneksi sains seperti ini, menjadikan PAI semakin fungsional dalam saling mendukung bagi pencapaian tujuan pendidikan.

F. PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan, maka kesimpulannya bahwa “tidak ada sains tanpa agama dan tidak ada agama tanpa sains”. Kesimpulan tersebut didukung dengan bukti-bukti ilmiah sebagai berikut:

1. Konstruksi ilmu pengetahuan yang menjadi objek studi PAI dan studi sains semuanya bersumber dari Allah Swt. sebagai hasil eksplorasi manusia melalui pembacaan dan pengkajiannya yang terdapat pada ayat-ayat *qauliyah* dan ayat-ayat *kauniyah*.
2. Ilmu Allah yang bersumber dari ayat-ayat *qauliyah* dan ayat-ayat *kauniyah* tidak bersifat eksklusif melainkan saling interkoneksi antara satu dengan yang lainnya. Dalam perspektif teologis-normatif dan filosofis, agama dan sains adalah *identical-integrated* atau *integratif-interdependentif*. Keduanya tidak dapat dipisahkan secara dikotomik.
3. Secara historis ulama-ulama terdahulu telah melakukan studi Islam (PAI) dengan kemampuan melakukan interkoneksi sains dan sosial non dikotomik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin. *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Abdullah, Amin. *Etika Tauhidik, Sebagai Dasar Kesatuan Epistemologi Keilmuan Umum dan Agama: Dari Paradigma Positivistik-Sekularistik ke Arah Teoposentrik-Integralistik*, dalam Jarot Wahyudim dkk., *Menyatukan Kembali Ilmu-ilmu Agama dan Umum: Upaya Mempertemukan Epistemologi Islam dan Umum*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2003.
- Amril M., *Epistemologi Integratif-Interkonektif Agama dan Sains*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Arif, Mahmud, *Pendidikan Islam Transformatif*. Yogyakarta: LKiS, 2008.
- Arsyad, Azhar. *Buah Cemara Integrasi dan Interkoneksi Sains dan Ilmu Agama*, Makalah Disampaikan pada Seminar Nasional Pengembangan Perguruan Tinggi Islam dalam Kerangka Integrasi Keilmuan. STAIN Datokarama Palu, tanggal 27 Agustus 2008.
- Assegaf, Abd. Rahman. *Integrasi Sain-Sosial dalam Pembejaraan Pendidikan Agama Islam*. Makalah pada Seminar Nasional tanggal 15-16 Oktober 2014 oleh PPs UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Barbour, Ian G. *Issues in Science and Religion*. New York: Harper Torchbooks, 1971.
- Haught, John F. *Science and Religion: From Conflict to Concervation*, terjemahan *Perjumpaan Sains dan Agama, Dari Konflik ke Dialog*. Bandung: Mizan kerjasama CRCS dan ICAS, 2004.

- Hidayat, Muslih. *Pendekatan Integratif-Interkonektif: Tinjauan Pradagigmatik dan Implementatif dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. Jurnal Ta'dieb Vol. XIX Nomr 02 Edisi Nopember 2012.
- Kailani, Irsan, Majid. *Falsafat at-Tarbiyah al-Islamiyyah*. Makkah: Maktabah al-Hadi, 1988.
- Kartanegara, Mulyadi. *Integrasi Ilmu dalam Perspektif Filsafat Islam*. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2000.
- Machali, Imam, *Implementasi Pendekatan Integrasi-Interkoneksi dalam Kajian Manajemen dan Kebijakan Islam*. Proseding Seminar Nasional tanggal 15-16 Oktober 2014. Yogyakarta: PPs UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Mulaiawa, Ungguh, Jasa. *Pendidikan Islam Integratif: Upaya Mengintegrasikan Kembali Dikotomi Ilmu*. Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Nasiruddin, *Integrasi Sains dan Agama dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI)*. Jurnal Literasi, Volumen IV Nomor 02 Desember 2013.
- Nasr, Hussein, Sayyed. *Ensiklopedi Tematis Fislafat Islam*. Bandung: Mizan, 2003.
- Nata, Abuddin, dkk. *Integrasi Ilmu Agama dan Ilmu Umum*. Cet. IV; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Nurman Said, dkk., *Sinergi Agama dan Sains; Ikhtiar Membangun Pusat Peradaban Islam*. Makassar: Alauddin Press, 2005.
- Riyanto, Fajar, Waryani. *Integrasi Interkoneksi Keilmuan*. Yogyakarta: Suka Press, 2013.
- O'Connor and Carr, *Introduction to the Theory of Knowledge*. Brighton: Harvester Press, 1982.

- Pokja Akademik, Kerangka Dasar Keilmuan dan Pengembangan Kurikulum UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta: Suka Press, 2006.
- Sabda, Syaifuddin. *Desain, Pengembangan dan Implementasi Model Kurikulum Terpadu Iptek dan Imtak*. Jakarta: Ciputat Press, 2006.
- Sadra, Mulla. *Al-Mazahir al-Ilahiyah fi Asrar al-Ulum al-Kamaliyyah*, diterjemahkan oleh Kurniawan, *Manifestasi-Manfistasi Ilahi: Sebuah Risalah Teosofi Islam*. Bandung: Pustaka Hidayah, 2004.
- Shihab, Quraish. *Tafsir al-Misbah, Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Volume 15. Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Suprayogo, Imam dan Rasmianto. *Perubahan Pendidikan Tinggi Islam; Refleksi Perubahan IAIN/STAIN Menjadi UIN*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Sutrisno, *Pendidikan Islam di Era Peradaban Modern*. Cet.I; Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Tim Penyusun. *Integrasi Keilmuan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Menuju Universitas Riset*. Jakarta: UIN Syahid, 2005.

DESAIN KURIKULUM BERPERSPEKTIF MULTIKULTURAL

4

A. PENDAHULUAN

Diskursus tentang pendidikan multikultural di Indonesia mulai mewacana sejak tahun 2000-an melalui simposium, workshop, serta berbagai tulisan di media massa. Wacana tersebut didasarkan pada fakta bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki kemajemukan. Kemajemukan tersebut tidak hanya karena jumlah etnis yang banyak, tetapi juga terdiri dari berbagai perbedaan khas budaya yang melekat pada setiap etnis, baik yang bersifat horizontal maupun vertikal (Said Agil Husin Al-Munawwar, 2006:130).

Perbedaan yang bersifat vertikal menyangkut perbedaan lapisan atas bawah baik bidang agama, sosial, ekonomi maupun politik dan pendidikan. Sedangkan perbedaan horizontal meliputi perbedaan kesatuan sosial seperti perbedaan bahasa daerah, tradisi dan adat istiadat, serta simbol-simbol lainnya yang melekat dalam setiap etnis.

Adanya tingkat kemajemukan (keragaman) yang tinggi pada dimensi vertikal dan horizontal inilah kemudian Indonesia menjadi negara yang cukup potensial memiliki problem tentang eksistensi sosial, suku, etnik, dan keagamaan yang beragam. Dari sejumlah problem tersebut diasumsikan oleh adanya pengelolaan yang kurang baik terhadap keberadaan multietnik, multibudaya, dan multiagama yang ada di Indonesia.

Tawaran pendidikan multikultural yang diwacanakan para pakar di Indonesia sejak tahun 2000-an dipandang sebagai salah

satu pendekatan solutif mengatasi problem “disintegrasi kultural” bangsa. Dengan pendekatan pendidikan multikulturalis diharapkan memiliki kontribusi untuk membangun kesadaran secara sistematis terhadap pentingnya kehidupan berdamai dan berdampingan secara sosial tanpa memandang perbedaan kultural (agama, etnik, suku, dan budaya).

Paradigma pendidikan multikultural adalah pendidikan yang berkeinginan untuk dapat memahami keberadaan masyarakat plural yang membutuhkan ikatan-ikatan keadaban (*the bound of civility*). *The bound of civility* berupa pergaulan antar kultur yang diikat dengan suatu *civility* (keadaban). Ikatan ini dibangun dari nilai-nilai universal manusia, sehingga dapat menerima budaya kelompok lain, etnik, gender, bahasa dan keberanekaan agama sebagai suatu bentuk keseimbangan dan membentuk satu kesatuan (Maslikhah, 2007:46).

Dimensi nilai-nilai universal manusia inilah seyogyanya diperhitungkan dan dipertimbangkan dalam penentuan filosofi, teori, visi, pengembangan dokumen, sosialisasi, model dan pelaksanaan kurikulum dalam rangka membangun pendidikan yang berperspektif dan berbasis multikulturalis. Oleh karena itu, makalah ini akan mengkaji “Desain Kurikulum Sekolah/Madrasah dalam Perspektif Multikultural”.

Kajian makalah ini, secara sistemik menyajikan perspektif konseptual desain kurikulum multikultural dengan terlib dahulu mengelaborasi realitas multikultur dalam *setting* sosial sebagai pendekatan paradigmatik dalam mendesain kurikulum multikultural. Makalah ini juga mengkaji secara konseptual kurikulum multikultral, yang meliputi; pengertian kurikulum multikultural, prinsip-prinsip desain kurikulum multikultural, pendekatan, dan tahapan desain kurikulum multikultural. Sebagai bagian inti, pembahasant entang desain kurikulum multikultural diuraikan secara konseptual teoritis tentang pengertian desain kurikulum dan komponen-konponen desain kurikulum

multikultural, yaitu; aspek perencanaan dan kompetensi, aspek materi, aspek proses, dan aspek evaluasi kurikulum multikultural.

B. PENDEKATAN MULTIKULTURAL DALAM KURIKULUM

Istilah multikultur berakar dari kata kultur. Pada umumnya, kultur diartikan sebatas pada budaya dan kebiasaan kelompok orang pada daerah tertentu (Ainul Yaqin, 2005:6). Secara etimologis, multikultur dibentuk dari kata “*multi*” berarti banyak, ragam, atau aneka. Sedangkan “*cultur*” berarti budaya. Dengan demikian, multikultur berarti multi budaya atau keragaman budaya.

Multikultur seringkali digunakan untuk menggambarkan beragamnya masyarakat, baik keberagaman agama, ras, bahasa, maupun budaya. Multikultural juga dimaknai sebagai eksistensi yang lebih dari satu itu berbeda-beda, heterogen, dan bahkan tidak dapat disamakan. Inti dan substansi dari multikultural adalah kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan, tanpa memerdulikan perbedaan budaya, etnik, gender, bahasa, dan agama (H. Abd. Rahman, dkk., 2011:18).

Pada aras inilah, dipandang penting meletakkan gagasan multikultural untuk penyempurnaan kurikulum pendidikan. Artinya, pendekatan multikulturalis dalam pengembangan kurikulum adalah suatu keharusan yang tak dapat diabaikan. Dengan pendekatan multikultural diharapkan kurikulum pendidikan mampu mengakomodir berbagai realita keragaman yang ada.

Pendekatan multikultural untuk kurikulum diartikan sebagai suatu prinsip yang menggunakan keragaman kebudayaan peserta didik dalam mengembangkan filosofi, misi, tujuan, dan komponen kurikulum, serta lingkungan belajar sehingga peserta didik dapat menggunakan kebudayaan pribadinya untuk memahami dan mengembangkan berbagai wawasan, konsep, keterampilan, nilai, sikap, dan moral yang diharapkan.

Pendekatan multikulturalis dalam kurikulum adalah penguatan kurikulum pendidikan yang memberikan penekanan terhadap proses transformasi dan internalisasi cara hidup yang saling menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat dengan tingkat pluralitas yang tinggi. Sehingga pendidikan, mampu menciptakan peserta didik yang cerdas dan berkarakter multikulturalis.

C. KAJIAN KONSEPTUAL KURIKULUM MULTIKULTURAL

1. Pengertian Kurikulum Multikultural

Kurikulum, merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan dalam suatu sistem pendidikan. Hubungan antara pendidikan dan kurikulum adalah hubungan antara tujuan dan isi pendidikan. Di dalam kurikulum tersimpul segala sesuatu yang harus dijadikan “*subject matter*” dan pedoman bagi pelaksanaan pendidikan yang dapat membawa ke arah tercapainya tujuan pendidikan.

Esensi kurikulum tidak hanya berisi serangkaian petunjuk teknis materi pembelajaran. Lebih dari itu, kurikulum merupakan sebuah program terencana, sistematis, dan menyeluruh yang menggambarkan kualitas pendidikan yang diharapkan oleh suatu bangsa. Selain dalam bentuk materi dan program, kurikulum juga berisi pemberian sejumlah pengalaman kepada peserta didik di bawah bimbingan sekolah.

Saylor dan Alexander dalam S. Nasution mengatakan kurikulum merupakan “*the total effort of the school to going about desired outcomes in school and out of school situations*” (S. Nasution, 2003:9). Dari pernyataan tersebut Saylor dan Alexander memaknai kurikulum sebagai usaha total sekolah untuk mencapai tujuan yang diinginkan, baik di dalam maupun di luar kelas. Dalam hal ini, berarti sekolah merumuskan pelbagai materi, program kegiatan pembelajaran, dan pengalaman belajar peserta didik yang

mendorong pertumbuhan dan perkembangan mereka sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, baik di dalam maupun di luar kelas.

Kurikulum berperspektif multikultural adalah sebuah desain kurikulum pendidikan yang komperhensif dan mendasar bagi semua peserta didik. Jenis kurikulum pendidikan ini, menentang *setting* pendidikan dan pembelajaran yang rasisme dan segala bentuk diskriminasi di sekolah dan di masyarakat dengan menerima serta mengafirmasi pluralis (etnik, ras, bahasa, agama, ekonomi, gender, dan lain sebagainya) yang terefleksi di antara peserta didik, komunitas mereka, dan guru-guru.

Paradigma kurikulum berperspektif multikultural didesain dalam rangka membangun dimensi demokratis, toleransi, kesetaraan, kesamaan, keadilan, dan pengakuan, penerimaan serta penghargaan setiap peserta didik kepada orang lain. Oleh karena itulah, pendidikan dengan wawasan multikultural dalam pandangan James A. Banks adalah “konsep pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta didik tanpa memandang gender dan kelas sosial, etnik, ras, agama, dan karakteristik kultural mereka untuk belajar” (A. Banks dan Cherry A McGee Banks: 1989).

James A. Banks, lebih lanjut mengemukakan bahwa kurikulum berperspektif multikultural adalah “konsep, idea atau falsafah sebagai suatu rangkaian kepercayaan (*self of believe*) dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis di dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan-kesempatan pendidikan dari individu, kelompok maupun Negara” (James A. Banks dan Cherry A. McGee Banks (ed): 2001).

Secara umum, kurikulum multikultur merupakan sebuah konsep program, materi, dan pengalaman belajar peserta didik yang dibuat dengan tujuan untuk menciptakan persamaan peluang pendidikan bagi semua peserta didik yang berbeda-beda ras, etnis, agama, kelas sosial, dan kelompok budaya. Tujuannya adalah

membantu peserta didik memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam berinteraksi, berkomunikasi, dan bersosialisasi dengan warga masyarakat dari kelompok yang beragam agar tercipta tatanan masyarakat demokratis, toleran, humanis, berkeadilan, dan berkeadaban.

2. Prinsip Desain Kurikulum Multikultural

Paradigma kurikulum berperspektif multikultural dituntut untuk berpegang pada prinsip-prinsip, sebagai berikut:

- a. Kurikulum multikultural harus menawarkan konten (isi materi) yang merepresentasikan pandangan dan perspektif banyak orang.
- b. Kurikulum multikultural harus didasarkan pada asumsi tidak ada penafsiran tunggal terhadap kebenaran sejarah.
- c. Kurikulum dicapai sesuai dengan penekanan analisis komparatif dengan sudut pandang kebudayaan yang berbeda-beda.
- d. Kurikulum multikultural harus mendukung prinsip-prinsip pokok dalam memberantas pandangan klises tentang ras, budaya, dan agama.
- e. Kurikulum yang multikultur mencerminkan keseimbangan antara pemahaman persamaan dan perbedaan budaya mendorong individu untuk mempertahankan dan memperluas wawasan budaya dan kebudayaannya (Yaya Suryana dan H.A. Rusdiana, 2015: 311).

Ngainum Naim dan Achmad Sauki, menjelaskan bahwa dalam pengembangannya, kurikulum dengan menggunakan pendekatan multikultural harus didasarkan pada prinsip, yaitu:

- a. Keragaman budaya menjadi dasar dalam menentukan filsafat, teori, model, dan hubungan sekolah dengan lingkungan sosial budaya setempat.

- b. Keragaman budaya menjadi dasar dalam pengembangan berbagai komponen kurikulum, seperti, tujuan, konten, proses, dan evaluasi.
- c. Budaya di lingkungan unit pendidikan adalah sumber belajar dan objek studi yang harus dijadikan bagian dari kegiatan belajar peserta didik, dan;
- d. Kurikulum berperan sebagai media dalam mengembangkan kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional (Ngainum Naim dan Achmad Sauki, 2008:198).

Dalam konteks desain kurikulum multikultural di sekolah/madrasah, maka beberapa prinsip tersebut di atas menjadi aspek kunci dalam perumusan basis filosofis, teori, model, komponen, implementasi, proses dan sistem evaluasi kurikulum multikultural.

3. Tahapan Desain Kurikulum Multikultural

Ada beberapa tahapan yang harus diperhatikan dalam desain kurikulum berbasis pendidikan multikultural di sekolah/madrasah, yaitu sebagai berikut:

- a. Merumuskan visi, misi, tujuan sekolah/madrasah, dan pengembangan diri yang mencerminkan kurikulum sekolah/madrasah yang berbasis multikultural.
- b. Mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar yang bermuatan multikultur dengan memerhatikan hal-hal berikut: (1) urgensi dengan kehidupan peserta didik; (2) keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran lain yang memuat multikultur; (3) relevansi dengan kebutuhan peserta didik dalam masyarakat yang multikultur; dan (4) keterpakaian atau kebermaknaan bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Mengidentifikasi materi pembelajaran yang bermuatan multikultur dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai

berikut: (1) keberagaman peserta didik; (2) karakteristik mata pelajaran; (3) relevansi dengan karakteristik daerah; (4) tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik; (5) kebermanfaatan bagi peserta didik; (6) aktualitas materi pembelajaran; dan (7) relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan.

- d. Mengembangkan kegiatan pembelajaran yang bermuatan multikultur. Kegiatan pembelajaran didesain untuk memberikan pengalaman belajar belajar yang melibatkan proses mental dan fisik peserta didik dengan menerapkan beberapa pendekatan interaksi dan metode pembelajaran yang relevan.
- e. Merumuskan indikator pencapaian kompetensi yang dapat diukur mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bermuatan multikultur.
- f. Menentukan sumber belajar yang bermuatan multikultur. Sumber belajar dimaksud, adalah rujukan, objek, dan/atau bahan yang bermuatan multikultur yang dapat didayagunakan untuk kegiatan pembelajaran. Penentuan sumber belajar tersebut didasarkan pada standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi.
- g. Menentukan jenis penilaian yang bermuatan multikultur. Penilaian ini merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan dalam bentuk tertulis ataupun lisan, pengamatan kinerja, portofolio, observasi, penilaian diri, dan sebagainya.

Tujuh tahapan desain kurikulum multikultural tersebut di atas, menjadi langkah strategis menkonstruksi kurikulum operasional bermuatan multikultur pada tiap jenjang pendidikan dan tingkat satuan pendidikan sekolah/madrasah.

D. DESAIN KURIKULUM MULTIKULTURAL

Istilah desain bermakna adanya keseluruhan, struktur, kerangka atau *outline*, dan urutan atau sistematika kegiatan (Benny A. Pribadi, 2009:58). Selain itu, kata desain juga diartikan sebagai proses perencanaan yang sistematis dilakukan sebelum tindakan pengembangan atau pelaksanaan sebuah kegiatan (P.L. Smith dan T.L. Ragan, 1993: 4). Berdasarkan pengertian desain ini, maka secara sederhana desain dapat diartikan sebagai sebuah model, struktur, pola, atau rancangan yang konseptual.

Mendesain kurikulum berarti menyusun rancangan atau model kurikulum sesuai dengan visi dan misi pendidikan yang diharapkan. Oleh karena itu, setiap konsep pendidikan memiliki desain kurikulum masing-masing. Implementasi atau realisasi dari sebuah kurikulum ditetapkan dalam pembelajaran.

Suatu desain kurikulum meliputi dan merupakan suatu proses pengembangan kurikulum yang diawali dari perencanaan, validasi, implementasi, dan evaluasi kurikulum. Oemar H. Malik (2009:194), mendefinisikan desain kurikulum sebagai rencana atau susunan dari unsur-unsur kurikulum yang terdiri atas, tujuan, isi, pengalaman belajar, dan evaluasi. Hal ini menunjukkan bahwa di setiap kegiatan desain kurikulum harus merujuk pada bangunan kurikulum yang meliputi empat aspek komponen atau elemen kurikulum yang meliputi; tujuan, materi atau isi, pembelajaran, dan evaluasi.

Sebagai pendidikan mengenai keragaman kebudayaan, maka desain kurikulum berperspektif multikulturalis adalah suatu rancangan dan formulasi kurikulum yang menjadikan nilai-nilai multikultural tersebut sebagai dasar dalam perencanaan,

pengembangan dokumen, implementasi, dan evaluasi kurikulum suatu lembaga baik di sekolah, madrasah, maupun pesantren (Abdullah Aly, 2011: 6).

Desain kurikulum berperspektif multikultural di sekolah/madrasah saat ini dalam pandangan penulis sangat relevan untuk konteks masyarakat abad 21 yang menghendaki keterbukaan, demokrasi, toleransi, keadilan, hak-hak asasi, dan sebagainya. Konteks pendidikan masyarakat abad 21 menghendaki bangunan pendidikan yang menghendaki penghormatan dan penghargaan setinggi-tingginya terhadap harkat dan martabat manusia.

Kaitannya dengan desain kurikulum, H.A.R. Tilaar (2000:89) mengemukakan tiga dimensi kurikulum yang harus menjadi fokus, yaitu; (1) kurikulum sebagai ide; (2) kurikulum sebagai dokumen; dan (3) dan kurikulum sebagai proses. Dalam konteks desain kurikulum multikultural, secara idealitas, realita multikultural menghendaki kurikulum mampu menjadi media pengembangan kebudayaan lokal serta kebudayaan nasional. Hal ini relevan dengan pandangan Murray Print, "*Curriculum is a construct of that culture*" (Murray Print, 1993: 15). Prinsip ini mutlak dikembangkan karena keragaman budaya adalah sumber tidak ternilai bagi perkembangan kebudayaan nasional. Peserta didik harus diajak memahami tentang kemajemukan suku, rasa, budaya, dan agama.

Desain kurikulum multikultur sebagai dokumen, mencakup pengembangan berbagai komponen kurikulum seperti tujuan, isi, pengalaman belajar, dan evaluasi. Sedangkan desain kurikulum sebagai proses, adalah desain yang memberikan aksentuasi kurikulum pada peran guru dalam interaksi pembelajaran.

Sementara itu, James A. Lynch (1986: 79), mengemukakan tiga aspek penting dalam desain kurikulum multikultural, yaitu: perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Aspek perencanaan, berkaitan dengan perumusan tujuan (kompetensi), aspek

implementasi berkaitan dengan penggunaan strategi pembelajaran, dan aspek evaluasi berkaitan dengan penilaian terhadap implementasi kurikulum. Sementara itu, Abdullah Aly, memfokuskan pada empat hal dalam membahas desain kurikulum multikultural, yaitu: kompetensi, materi, proses pembelajaran, dan evaluasi.

1. Desain Perencanaan dan Kompetensi

Pada aspek perencanaan, berkaitan dengan aspek kompetensi pendidikan multikultural yang diarahkan pada basis perumusan yang lebih rinci, baik dari segi orientasi pembelajaran maupun ranah yang akan dikembangkan dari peserta didik. James A. Lynch, merekomendasikan pentingnya memasukkan dua orientasi tujuan ke dalam perencanaan kurikulum pendidikan multikultural, yaitu: (1) penghargaan kepada orang lain (*respect for others*), dan (2) penghargaan kepada diri sendiri (*respect for self*)

Kedua orientasi kompetensi ini penting untuk dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan multikultural, mengingat pengetahuan tentang kelompok etnik kultural yang terbatas sering menimbulkan perbedaan yang negatif. Dalam kaitan ini, kurikulum pendidikan multikultural diharapkan dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan penghargaan terhadap keberadaan kelompok etnik dan kultural di masyarakat, agar tumbuh perspektif multikultural di kalangan peserta didik.

Sementara itu, pentingnya penghargaan terhadap diri sendiri terletak pada pemberian kesempatan terus-menerus kepada peserta didik dalam rangka mengembangkan pemahaman diri yang baik. Pengembangan diri ini mencakup, setidaknya, tiga hal. *Pertama*, kurikulum harus membantu peserta didik untuk mengembangkan identitas diri yang akurat. *Kedua*, kurikulum harus membantu peserta didik untuk mengembangkan konsep diri. *Ketiga*, kurikulum multikultural harus membantu peserta didik untuk mengembangkan pemahaman diri yang lebih baik. Dengan

pemahaman diri tersebut akan membantu peserta didik untuk menangani situasi etnik dan kultural secara lebih efektif.

Kompetensi pendidikan multikultural yang menentukan arah yang dikembangkan dari peserta didik, menurut James Lynch, mencakup tiga ranah pembelajaran (*domain of learning*), yaitu: pengetahuan (*cognitive*), keterampilan (*skill*), dan sikap (*affective*). Sementara itu, L.H. Ekstrand, mengemukakan tiga aspek, yaitu: kompetensi yang berkaitan dengan sikap (*attitude*), pengetahuan (*cognitive*), dan pembelajaran (*instruction*).

Konstruksi kompetensi yang akan dirumuskan, baik yang menjadi orientasi pembelajaran maupun menjadi ranah yang dikembangkan tersebut di atas, selanjutnya didokumentasikan dalam bentuk dokumen kurikulum yang siap diimplementasikan dalam proses pendidikan berperspektif multikultural.

2. Desain Materi Kurikulum Multikultural

Dari segi materi, kurikulum dapat didefinisikan sebagai *content*, isu, tema, topik, dan konsep-konsep yang akan disampaikan oleh pendidik kepada peserta didik. Desain kurikulum multikultural pada aspek materi (*content*) ini, menurut Gary Burnett, mengambil bentuk yang cukup sederhana yaitu dengan cara menambahkan isu-isu dan konsep-konsep multikultural pada kurikulum yang sudah ada. Konsep-konsep yang dapat dimasukkan ke dalam kurikulum multikultural adalah isu, tema, topik, dan konsep-konsep yang berkaitan dengan multikulturalis, seperti; rasisme, prasangka, diskriminasi, penindasan, ketidakadilan, ketidakberdayaan, stereotip, dan sebagainya.

Tujuan utama dari kurikulum multikultural ini adalah untuk memasukkan materi tentang kelompok kultural yang beragam dalam kurikulum dan program pendidikan, peserta didik memiliki pemahaman yang komprehensif tentang kekayaan keragaman pada setiap kelompok etnik. Desain kurikulum multikultural yang berorientasi pada aspek materi ini, menurut James A. Banks, dapat

dilakukan dengan mengintegrasikan materi multikultural (*content integration*) ke dalam kurikulum.

Desain kurikulum multikultural dengan pendekatan *content integration* ini, Banks memberikan dua tahap, yaitu: tahap penambahan (*additive level*) dan tahap perubahan (*transformative level*). Tahap penambahan (*additive level*), dilakukan dengan cara memperkenalkan konsep dan tema-tema baru yang terkait dengan multikulturalisme ke dalam kurikulum yang ada tanpa mengubah struktur kurikulum yang sudah ada. Sedangkan tahap perubahan (*transformative level*), desain kurikulum dilakukan dengan cara memasukkan konsep dan tema-tema yang berkaitan dengan multikulturalisme serta memasukkan beragam cara pandang dan perspektif ke dalam kurikulum. Tahap ini, berbeda dengan tahap *additive*, karena tahap desain model ini ada perubahan dalam tujuan, struktur, dan perspektif fundamental dari kurikulum.

Untuk memilih materi yang berperspektif multikultural, sekolah atau pendidik perlu menelaah secara kritis tentang materi dan buku-buku teks yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran, agar tidak terjadi berbagai macam bias. Hal ini penting untuk dilakukan karena ada kemungkinan bahwa materi dan buku-buku teks yang digunakan mengandung berbagai macam bias.

3. Desain Proses Pembelajaran Kurikulum Multikultural

Dimensi proses pembelajaran adalah salah satu komponen penting kurikulum multikultural. Menurut Nurul Asna, paling tidak ada empat hal yang harus diperhatikan guru dalam mengembangkan kurikulum sebagai proses, yaitu: (1) posisi peserta didik sebagai subjek dalam belajar, (2) cara belajar peserta didik yang ditentukan oleh latar belakang budayanya, (3) lingkungan budaya mayoritas masyarakat dan pribadi peserta didik adalah *entry behavior cultural* peserta didik, dan (4) lingkungan

budaya peserta didik adalah sumber belajar (Nurul Asna, 2003: 32).

Mark K. Smith, mengemukakan ada 3 (tiga) karakteristik bagi kurikulum yang berorientasi pada proses. *Pertama*, kurikulum yang menempatkan ruang kelas sebagai tempat berinteraksi antar pendidik dengan peserta didik dan antar peserta didik secara edukatif dan demokratis. *Kedua*, kurikulum memerlukan *setting* dan *lay-out* ruang kelas yang dinamis. *Ketiga*, kurikulum yang menempatkan peserta didik sebagai subjek dalam proses pembelajaran (Mark K. Smith, 2002:6). Pendapat lain dikemukakan oleh Ricardo L. Garcia (1997:35), menyebutkan tiga faktor dalam proses pembelajaran, yaitu: (1) lingkungan fisik, (b) lingkungan sosial, dan (c) gaya pembelajaran pendidik yang demokratis dengan, pendekatan strategi pembelajaran seperti dialog, simulasi, bermain peran, penanganan kasus dan lain sebagainya.

Berdasarkan pandangan para pakar kurikulum dan pembelajaran di atas, maka desain proses pembelajaran multikultural memerlukan *setting* dan *lay out* ruang kelas yang dinamis dan efektif menjadi laboratorium pembelajaran multikultural yang memungkinkan pendidik dan peserta didik dapat merumuskan secara bersama tentang tujuan dan materi pembelajaran. Selain itu, pendidik menempatkan peserta didik sebagai subjek dalam proses pembelajaran dengan gaya pembelajaran yang demokratis, terbuka, dan fleksibel.

4. Desain Evaluasi Kurikulum Multikultural

Evaluasi dalam kurikulum sangat penting dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Secara makro, aspek yang dievaluasi adalah implementasi kurikulum. Evaluasi dalam konteks ini adalah untuk menemukan kelemahan, bias, dan dampaknya terhadap implementasi kurikulum pendidikan multikultural (James Lynch, 1986: 102). Secara mikro, evaluasi

kurikulum pendidikan multikultural dilakukan untuk menguji keberhasilan capaian kompetensi pembelajaran pendidikan multikultural.

Capaian proses pembelajaran multikultural diorientasikan pada penghargaan terhadap diri (*respect for self*) dan orang lain (*respect for others*), baik dilihat dari dimensi kognitif, afektif, maupun psikomotoriknya.

Mengingat pembelajaran multikultural diorientasikan pada penghargaan terhadap diri (*respect for self*) dan orang lain (*respect for others*), maka desain evaluasi kurikulum multikultural juga diarahkan pada dua orientasi tersebut. Instrumen evaluasi yang dapat digunakan adalah “*achievement test*” (Jane R. Mercer, 1989: 209). *Achievement test* (tes prestasi) ini mencakup aspek akademik dan non akademik peserta didik, termasuk perilakunya.

Dalam aspek akademik, model tes prestasi dapat dipraktikkan dengan menggunakan studi kasus, *problem solving*, *role playing*, diskusi, dan sebagainya. Sementara itu, dalam aspek perilaku (non akademik), model tes prestasi dipraktikkan dengan menggunakan *performace techniques* (teknik kinerja). Teknik ini, diterapkan pendidik dengan cara memonitor dan mengamati proses interaksi dan komunikasi antar peserta didik terutama pada saat proses pembelajaran berlangsung. Standar ukuran yang digunakan adalah materi pembelajaran yang telah dipelajari berkenaan dengan topik, tema, dan konsep yang berkaitan dengan nilai-nilai multikultural.

Di pihak lain, James Lynch menambahkan, teknik observasi dan monitoring dapat dilakukan terhadap perilaku peserta didik terkait isu-isu multikultural, baik secara internal, maupun secara eksternal. Secara internal, observasi dan monitoring perilaku peserta didik terkait dengan isu-isu multikultural dilakukan oleh pendidik di sekolah/madrasah. Sementara itu, secara eksternal, monitoring dan observasi terhadap perilaku peserta didik dilakukan oleh orang tuanya di rumah

bekerjasama dengan pendidik di sekolah/madrasah. Instrumen yang dapat digunakan dengan teknik observasi dan monitoring ini adalah *check list* dan *anecdotal record*.

Secara konseptual, kegiatan evaluasi kurikulum dilakukan untuk menguji aspek perencanaan dan implementasi kurikulum. Evaluasi kurikulum mencakup evaluasi proses dan evaluasi produk yang berbasis autentik (*assessment authentic*). Dengan evaluasi secara sistematis dan berkesinambungan dapat dilihat perlunya perbaikan terhadap aspek perencanaan dan implementasi kurikulum yang belum bermuatan nilai-nilai multikultural.

E. PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendekatan multikulturalis dalam pengembangan kurikulum adalah suatu keharusan dalam rangka mengakomodir berbagai realita keragaman budaya peserta didik dengan dua orientasi tujuan, yaitu: (1) penghargaan kepada orang lain (*respect for others*), dan (2) penghargaan kepada diri sendiri (*respect for self*).
2. Desain kurikulum berperspektif multikulturalis adalah suatu rancangan dan formulasi kurikulum yang menjadikan nilai-nilai multikultural tersebut sebagai dasar dalam perencanaan, pengembangan dokumen, implementasi, dan evaluasi kurikulum suatu lembaga di sekolah/madrasah.
3. Secara konseptual, desain kurikulum sekolah/madrasah berperspektif multikultural merujuk pada bangunan kurikulum yang meliputi empat aspek komponen atau elemen kurikulum yang meliputi; kompetensi (tujuan), materi atau isi, proses pembelajaran, dan evaluasi dengan pendekatan *content integration* melalui model penambahan (*additive*), perubahan (*transformative*), kontribusi (*contribution*), dan *social action* (aksi sosial).

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman, dkk., *Panduan Integrasi Nilai-Nilai Multikultur dalam Pendidikan Agama Islam pada SMK dan SMA*. Jakarta: PT Kirana Cakra Buana Kerjasama Rahima, 2011.
- Alwasilah, Haidar, A., *Islam, Culture, and Education*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2014.
- Aly, Abdullah, *Pendidikan Islam Multikultural di Pesantren: Telaah terhadap Kurikulum Pondok Pesantren Modern Islam Assalam Surakarta*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Arifin, Zainal, *Pengembangan Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan Islam*. Cet. I; Yogyakarta: Diva Press, 2012.
- Asna, Nurul, “Meneguhkan Pendidikan Multikultural” dalam *Majalah Inovasi Kurikulum*, Edisi IV, Tahun 2003.
- Banks, A. James dan Cherry A McGee Banks, *Multicultural Education: Issues and Perspectives*. Boston: Allyn and Bacon, 1989.
- Banks, A. James dan Cherry A. McGee Banks (ed), *Handbook of Research on Multicultural Education*. San Francisco: Jessey-Bass, 2001.
- Burnett, Gary, *Varieties of Multicultural Education: An Introduction*. New York: ERIP Publication 1989.
- Ekstrand, L.H., “Multicultural Education” dalam Lawrence J. Saha, *International Encyclopedia of the Sociology of Education*. Malmo: Malmo School of Education, 1997.
- Garcia, L. Ricardo, *Teaching in a Pluralistic Society: Concepts, Models, Strategies*. New York: Harper & Row Publisher, 1982.

- Hamalik, Oemar, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2009.
- Hamalik, Oemar, *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Kniker, R. Charles, *You and Values Education*. Colombus Ohio: A.Bell & Howell Comany, 1997.
- Lynch, A. James, *Multicultural Education: Principles and Practice*. London: Routledge & Kegan Paul, 1986.
- Maslikhah, *Quo Vadis Pendidikan Multikultur: Rekonstruksi Sistem Pendidikan Berbasis Kebangsaan*. Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2007.
- Mercer, R. Jane, "Alternative Paradigms for Assessment in a Pluralistics Scoeti" dalam James A. Banks & Cherry A. McGee Banks, *Multicultural Education: Issues and Perspectives*. Boston London: Allyn and Bacon Press, 1989.
- Munawwar, Husin, Said Agil, *Fiqih Kehidupan antar Agama Menata Masyarakat Berbasis Multikultural, dalam Masa Depan Bangsa dan Radikalisme Agama*. Bandung: Gunung Djati Press, 2006.
- Naim, Ngainum dan Achmad Sauki, *Pendidikan Multikultural: Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Aruzz Media, 2008.
- Nasution, S., *Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Pribadi, A. Benny A., *Model Desain Sistem Pembelajaran*. Jakarta: Dian Rakyat, 2009.
- Print, Murray, *Curriculum Development and Design*. St. Leonard: Allen & Unwin Pty, 1993.

- Smith, K. Mark, *Curriculum Theory and Practice*. London: mRoutledge, 2002.
- Smith, P.L. dan T.L. Ragan, *Instructional Design*: Upper Saddle River. NJ. Merrill Prentice Hall, 1993.
- Suntiti, *Kurikulum Pendidikan Berbasis Multikultural*, Jurnal Edueksos, Vol. III No. 2, Juli-Desember 2014.
- Suryana, dan H.A. Rusdiana, *Pendidikan Multikultural: Konsep, Prinsip, dan Implementasi*. Jakarta: CV Pustaka Setia, 2015.
- Tilaar, H.A.R. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Yaqin, Ainul, *Pendidikan Multikultural: Cross Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*. Yogyakarta: Pilar Media, 2005.

NALAR SPIRITUAL PENDIDIKAN ISLAM: Refleksi Pemikiran Pendidikan KH. Abdurrahman Ambo Dalle dalam Memperkuat Peran Pendidikan Islam di Era Global

5

A. PENDAHULUAN

Globalisasi merupakan sebuah fenomena kompleks dan sebagai “efek domino” atas laju modernitas yang memiliki dampak sistemik terhadap semua dimensi kehidupan umat manusia (A.Suradi, 2017:247). Proses globalisasi dengan segala konfigurasinya hampir menyentuh seluruh tradisi agama yang mempunyai kekuatan norma, nilai, dan makna bagi kehidupan. Salah satu ciri dari era globalisasi adalah suatu dunia yang terbuka dengan kehidupan yang serba kompetitif yang bersifat multi dimensional. Era globalisasi, oleh Giddens disebut sebagai era kompetisi kualitas (Anthony Giddens, 1999:19).

Perubahan global ini melahirkan suatu gaya hidup dengan karakteristik adalah kehidupan yang penuh persaingan sehingga meminta masyarakat dan organisasi di dalamnya untuk membenahi diri mengikuti perubahan-perubahan cepat yang terjadi. Apabila stagnan terhadap perubahan-perubahan tersebut maka akan tertinggal dari arus perubahan itu

Di saat tantangan global sudah menjadi keniscayaan tidak terelakkan, di situlah banyak kalangan memandang bahwa dunia pendidikan sebagai “*centre of excellence*” diharapkan semakin

menunjukkan fungsi sebagai pencetak sumber daya manusia (SDM) berkualitas dengan kemampuan kompetitif, serta memiliki kekuatan mental-spiritual dalam menghadapi dampak negatif yang ditimbulkan globalisasi.

Menurut Mukhtar Bokhori, globalisasi akan mewarnai seluruh kehidupan di masa depan umat manusia dan akan melahirkan gaya hidup baru yang akan mengandung ekses-ekses tertentu seperti materialisme, sekularisme, hedonisme, pragmatisme, materialisme, individualisme, dan sebagainya (Muhktar Bukhori, 2001:28). Jika dikaitkan dengan peran dan posisi penting pendidikan dalam menyiapkan manusia modern yang tetap *survive* di era global, maka manusia harus diperkuat dengan landasan moral dan nilai-nilai spiritual dalam sistem pendidikan dalam kerangka memperkuat posisi “daya tahan” dan “daya ubah” pendidikan Islam di era global.

Tulisan ini akan mencoba mengkaji konsep pendidikan K.H. Abdurrahman Ambo Dalle, yakni salah satu konsep pendidikan yang fundamental, integral dan dianggap relevan membangun peradaban serta dapat dijadikan sebagai kerangka ataupun landasan pendidikan Islam di era global dewasa ini. Ia mencoba menggagas konsep pendidikan Islam yang sarat dengan nilai-nilai spiritualitas yang perlu dibangun dalam pendidikan Islam.

Sebagai tokoh intelektual Islam yang hidup sezaman dengan Muhammad Natsir dan Hamka, K.H. Abdurrahman Ambo Dalle, tampil sebagai ulama yang produktif menuangkan gagasan-gagasan pemikiran keagamaan dan pendidikan. Secara ideal, K.H. Abdurrahman Ambo Dalle menghendaki pendidikan Islam mampu mencetak manusia yang baik secara universal (*al-insân al-kâmil*). Suatu tujuan yang mengarah pada dua dimensi sekaligus yakni, sebagai *Abd Allâh* (hamba Allah), dan sebagai *Khalifah fi al-ardl* (wakil Allah di muka bumi).

Kajian dan eksplorasi pemikiran dari karya-karya monumental K.H. Abdurrahman Ambo Dalle sangat relevan dilakukan dalam rangka membangun perspektif pemikiran pendidikan Islam dalam konteks zamannya, lalu kemudian melakukan refleksi kritis-filosofis dalam merekonstruksi pemikiran pendidikan Islam masa kini tanpa menafikan mereka agar pendidikan Islam dapat *survive* dan *kompetible* tanpa kehilangan jati dirinya di era global dewasa ini.

B. BIOGRAFI SINGKAT K.H. ABDURRAHMAN AMBO DALLE

K.H. Abdurrahman Ambo Dalle lahir di Desa Ujung'e Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, pada hari Selasa siang tahun 1990. Ayahnya bernama Puang Ngati Daeng Patobo dan ibunya Puang Candara Dewi (Puang Cendaha) (Ahmad Rasyid A. Said, 2013:1). Di waktu kecil, ia diberi nama oleh kedua orang tuanya dengan nama Ambo Dalle. (*Ambo* dalam bahasa Bugis yang berarti Bapak, sedang *Dalle* berarti rezeki). Pemberian nama *Ambo Dalle* ini sebagai ekspektasi kiranya dalam kehidupannya senantiasa mendapat rezeki yang lapang dari Allah swt.

Proses pendidikan dilaluinya secara informal bermula belajar membaca al-Qur'an dari kedua orang tua dan bibinya. Setelah tamat mengaji kemudian dilanjutkan dengan belajar tajwid kepada Puang Caco, kakeknya sendiri serta bimbingan tahfidz, belajar ilmu nahwu, sharaf, fiqhi, dan tafsir oleh seorang ulama di Sengkang bernama H. Muhammad Ishak dan berhasil menghafal al-Qur'an 30 juz di usia 7 (tujuh) tahun. Melihat kemampuan dan kecerdasan Ambo Dalle, H. Muhammad Ishak kemudian menambahkan nama Abdurrahman di depan Ambo Dalle. Sejak itu lengkaplah namanya menjadi Abdurrahman Ambo Dalle (Ahmad Rasyid A. Said: 2013).

Abdurrahman Ambo Dalle menapaki jenjang pendidikan seiring dengan pertumbuhan jasmani dan perkembangan daya nalar pikirannya. Ia sangat ulet belajar, baik secara otodidak maupun berguru langsung kepada ulama-ulama terkemuka di daerahnya. Di antara guru atau ulama yang berjasa mendidik Ambo Dalle, adalah sejumlah guru atau ulama jebolan Mekah Arab Saudi yang ada di Wajo, diantaranya; Sayyid Muhammad al-Ahdaliy, Syaikh H. Syamsuddin, Syaikh H. Ambo Amme, Syekh Abd. Rasyid, Syekh Muhammad ak-Jawad, Sayyid Abdullah Dahlan, Sayyid Hasan al-Yamaniy, Syekh Alwi dan Syekh Muhammad As'ad.

Pendidikan formal iaawali di *Volk Scholl* dan kursus bahasa Belanda di HIS (*Holland Inlands School*), di samping tetap memperdalam ilmu-ilmu agama. Setamat di *Volk Scholl*, ia hijrah ke Makassar dan masuk di Sekolah Guru yang diselenggarakan oleh Syarikat Islam (H.M. Nasruddin Anshoriy Ch., 2009: 53). Dengan bekal ilmu dan wawasan *pedagogik-didaktika* yang diperoleh, ia jadikan modal untuk kembali ke Wajo (sengkang) memulai pengabdian di bidang pendidikan dengan merintis lembaga pendidikan agama Islam dengan metode sekolah.

Pada tahun 1935, ia berangkat ke Mekah untuk beribadah dan menuntut ilmu. Sepulang dari Mekah, kembali memimpin *Madrasah Arabiyah Islamiyah* (MAI) dan mendapat tawaran dari berbagai pihak untuk mendirikan MAI di daerah lain. Salah satu permintaan yang datang adalah dari pemerintah Swapraja Soppeng Riaja, di Mangkoso Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan.

Atas permintaan pemerintah swapraja Soppeng Riaja tersebut, tepat pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 1938 M/29 Syawal 1357 H. K.H. Abdurrahman Ambo Dalle hijrah bersama keluarganya ke Mangkoso dan pada hari itu pula ia memulai pengajian perdana dengan sistem *halaqah* di masjid Jami Mangkoso. Melihat pesatnya santri yang datang belajar di Mangkoso, tepat pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 1939 M/20

Zulkaidah 1357 H., *Anregurutta* Ambo Dalle secara resmi mengembangkan model pengajiannya dengan sistem pembelajaran berkurikulum madrasah, dengan membuka tiga tingkata, yaitu; tingkatan Tahdiriyah (3 tahun), Ibtidaiyah (3 tahun), dan Tsanawiyah (3 tahun). Lembaga tersebut diberi nama *Madrasah Arabiyah Islamiah* (MAI).

Keuletan K.H. Abdurrahman Ambo Dalle dalam mengembangkan MAI Mangkoso membuat lembaga pendidikan ini semakin berkembang dan permintaan untuk mendirikan cabang-cabang di daerah, baik di Provinsi Sulawesi Selatan maupun dari Provinsi lain, seperti dari Sulawesi Tengah, Kalimantan, Sumatra, dan lainnya. Dalam pertemuan sejumlah ulama pimpinan MAI di Watang Soppeng pada tanggal 7 Februari 1947 disepakati membentuk sebuah organisasi untuk mengorganisir perkembangan MAI. Organisasi baru ini diberi nama *Darud Dakwah Wal Irsyad* (DDI), di bawah pimpinan K.H. Abdurrahman Ambo Dalle dan berpusat di Mangkoso.

Sebelum tutup usia pada 29 Nopember 1996 di Makassar, K.H. Abdurrahman Ambo Dalle, selain sebagai pimpinan DDI, ia juga pernah menjadi anggota MPR RI dan penasihat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat. Beberapa penghargaan ia terima, diantaranya tanda kehormatan Bintang Mahaputra Nararya dari Presiden B.J. Habibie pada tahun 1999, Putra daerah berprestasi dari Pemda Tingkat II Kabupaten Wajo tahun 1998, dan sebagai Tokoh Pendidik Bidang Agama se-Indonesia Timur dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) tahun 1986.

C. KARYA-KARYA K.H. ABDURRAHMAN AMBO DALLE

Selain karya monumental berupa pendirian organisasi *Darud Dakwah Wal Irsyad* (DDI) yang mewadahi lembaga pendidikan pesantren dan madrasah serta perguruan tinggi yang tersebar di beberapa wilayah nusantara, K.H. Abdurrahman Ambo

Dalle juga menghasilkan karya dalam bentuk tulisan buku, di antaranya yaitu: (1) *Al-Qaul al-Shadiq fi Ma'rifah al-Khalik*, (2) *Hilya al-syabab fi 'Ilm al Akhlak*, (3) *Al-Nukhbat al-Mardiyah*, (4) *Irsyad al-Thullab*, (5) *Tanwirut al-Thalib*, (6) *Miftahul Fuhum fi al-Mi'yarif Ulum*, (7) *Irsyadul Salih*, (8) *Miftahul Mudzakarrah*, (9) *Maziyah Ahli Sunnah wa al-Jama'ah*, (10) *Syifa al-Afidah min al-Tasyaum wa al-Tiyarah*, (11) *Al-Risalah al-Bahiyyah fi Aqaid Islamiyah*, (12) *Wa Hikam al-shalah*, (13) Ilmu Tajwid, (14) *Al-Hidayah al-Jalliyah*, (15) *Al-Durus al-Fiqhiyyah*, (16) *Bughyat al-Muhtaj*, (17) *al-Sirah al-Nabawiyah*, (18) *al-Dabit al-Jalliyah*, (19) *Ahsan al-Uslub wa al-Siyaqah*, dan (20) *Sulo Mattappa*.

D. PEMIKIRAN PENDIDIKAN K.H. ABDURRAHMAN AMBO DALLE

Di Indonesia, ulama merupakan faktor dinamis yang telah membawa pengaruh penting dalam dinamika masyarakat Islam. Ulama merupakan tokoh penting dalam masyarakat Islam di Indonesia (Abdul Kadir Ahmad, 2008: 4). Menurut Gibb, seperti dikutip B.J. Boland, apabila ingin mengetahui dinamika Islam, maka harus melihat bukan kepada masyarakat pada level *grass root* melainkan kepada pimpinan Islam atau ulama (B.J. Boland, 1971:3). Pandangan ini, memberikan pengakuan begitu nyata peran dan fungsi ulama sebagai variabel penggerak dinamika sosial masyarakat muslim dalam berbagai bidang sosial keagamaan, termasuk dalam bidang pemikiran pendidikan Islam.

Dalam aspek pemikiran pendidikan, K.H. Abdurrahman Ambo Dalle, menghendaki pendidikan Islam mampu mencetak manusia yang baik secara universal (*al-insân al-kâmil*). Suatu tujuan yang mengarah pada dua dimensi sekaligus yakni, sebagai *Abd Allâh* (hamba Allah), dan sebagai *Khalifah fi al-Ardl* (wakil Allah di muka bumi). Menurut K.H. Abdurrahman Ambo Dalle, agama Islam mengenal adanya konsep jasmani dan rohani. Manusia memiliki kedua dimensi tersebut. Secara kasat mata,

manusia terdiri dari kulit, tulang, darah, sel-sel, dan lain sebagainya. Sedang dimensi rohani, manusia memiliki akal, hati, nafsu, dan rasa yang dikategorikan dimensi rohani (H. Abdurrahman Ambo Dalle: 1963).

Dari dua dimensi yang dimiliki manusia tersebut, harus diupayakan tumbuh dan berkembang secara seimbang. Objek pendidikan manusia adalah kedua dimensi manusia tersebut. Dengan menumbuhkembangkan kedua dimensi manusia itu, ia dapat fungsional menjadi hamba yang taat dan khalifah yang bertanggung jawab sebagai pengejawantahan hakikat tujuan diciptakannya manusia.

K.H. Abdurrahman Ambo Dalle secara tegas menyatakan bahwa menjadi sebuah kewajiban bagi manusia untuk *ta'abbud* kepada Allah. Sebagai seorang hamba, konsekuensinya adalah harus selalu patuh dan taat terhadap Allah swt. Menyembah Tuhan merupakan kewajiban setiap manusia dengan kepatuhan terhadap perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, dan ini memang telah menjadi fitrah manusia (H. Abdurrahman Ambo Dalle: 1976).

Bentuk pengabdian (*ta'bbud*), menurut K.H. Abdurrahman Ambo Dalle, diwujudkan dalam dua bentuk, yaitu pengabdian lahir dan pengabdian batin. Pengabdian lahir adalah memanfaatkan aspek jasmani yang diberikan oleh Allah swt. Pengabdian batin adalah segala bentuk pengabdian yang pengarahannya dan pelaksanaannya dilakukan oleh hati. Karena itu, setiap individu dituntut untuk selalu *tazkiyah al-nafs* dari hati, jiwa dan pikiran yang kotor.

Bentuk pengabdian lahir dan batin ini, menurut K.H. Abdurrahman Ambo Dalle, keduanya berorientasi pada pengabdian langsung pada Tuhan yang dilaksanakan secara individual dan pengabdian lahir dan batin yang ada kaitannya dengan Allah swt diantarai oleh sesuatu unsur, yaitu dengan *mu'amalah* dan *tafakkur* terhadap alam sebagai *wasilah* untuk *ma'rifah* kepada Allah swt. Oleh karena itu, realisasi dua bentuk

pengabdian ini, menurut K.H. Abdurrahman Ambo Dalle, tidaklah secara terpisah, akan tetapi secara bersama-sama. Ada keseimbangan antara hubungan vertikal kepada Allah dengan hubungan horizontal kepada manusia. Menjaga keseimbangan dunia dengan akhirat.

Dengan demikian, tujuan tertinggi pendidikan menurut K.H. Abdurrahman Ambo Dalle pada dasarnya sesuai dengan tujuan hidup manusia dan peranannya sebagai ciptaan Allah, yaitu: (1) menjadi hamba Allah yang bertakwa, (2) menghantarkan subjek didik menjadi *khalifah fi al-ardh*, dan (3) memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan hidup di dunia sampai di akhirat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, menurut K.H. Abdurrahman Ambo Dalle, pendidikan harus diarahkan mencapai pertumbuhan keseimbangan kepribadian manusia menyeluruh, melalui *tarbiyah al-nafs* (jiwa), hati, akal, perasaan, penghayatan, dan kecakapan. Karena itu, pendidikan manusia harus diperkuat dalam segala seginya, baik spiritual, akhlak, intelektual, jasmani, ilmiah, dan linguisitik, dan semuanya itu didasari motivasi ibadah (*ta'abbudiyah*). Karena di sinilah kunci utama sampai pada tujuan tertinggi "*ma'rifatullah dan ta'abbud ilallah*" (H. Abdurrahman Ambo Dalle: 1938).

Tujuan-tujuan pendidikan bagi K.H. Abdurrahman Ambo Dalle hanya dapat dicapai dengan ilmu pengetahuan. Menurutnya, untuk mendapatkan kesuksesan dunia dan kebahagiaan akhirat ialah dengan memiliki ilmu pengetahuan (H.M. Yusrie, 2012: 133). Pendekatan kepada Allah secara sempurna dan pendekatan kepada sesama manusia secara harmonis, serta kemampuan pengelolaan alam untuk kehidupan hanya dapat dikembangkan dengan ilmu pengetahuan.

Ilmu pengetahuan yang dibutuhkan manusia untuk mendapatkan kesuksesan dunia dan kebahagiaan akhirat, yaitu ilmu-ilmu agama dan ilmu non agama. Ilmu-ilmu agama obyeknya untuk memperbaiki hubungan antara manusia dengan sesamanya

dan memperbaiki hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Ilmu non agama, menjadi tujuan perantara yaitu untuk mendapatkan kesejahteraan di dunia seperti ilmu sains, teknik, kedokteran, ekonomi, dan sebagainya.

Berdasarkan pandangan keilmuan itu pula, di bidang pembelajaran dan pengaturan kurikulum, menurut K.H. Abdurrahman Ambo Dalle, dapat dibagi tiga kategori, yaitu: *Pertama*, mata pelajaran wajib seperti ilmu-ilmu agama Islam yang meliputi ulum al-Qur'an, Ulum al-Hadis, Tauhid, Fiqhi/Ushul Fiqh, Akhlak, Sejarah Islam, serta Bahasa Arab dan bahasa Indonesia. *Kedua*, mata pelajaran pilihan seperti ilmu-ilmu non agama dan keterampilan yang meliputi IPA, Matematika, Biologi, Kimia, Kedokteran, Sejarah, Sosiologi, Antropologi, Poiltik, Kesenian, Nasyid, Kaligrafi, dan Bahasa Inggris. *Ketiga*, mata pelajaran diutamakan, seperti ilmu guru atau ilmu tarbiyah dan keguruan yang meliputi ilmu pendidikan, ilmu jiwa, metode dan teori belajar dan mengajar serta ilmu dakwah dan retorika (H.M. Yusrie: 2012).

Paradigma keilmuan dan konteks formulasi materi kurikulum pendidikan K.H. Abdurrahman Ambo Dalle di atas, mengindikasikan kecenderungan dalam pendidikan yang mengutamakan tauhid, ibadah, syariah, dan *akhlak al-karimah* serta kesempurnaan hidup manusia di dunia dan di akhirat dengan bekal ilmu pengetahuan agama dan non agama.

Kurikulum inti pendidikan Islam harus memuat materi yang dapat mengantarkan subyek didik ke tujuan pendidikan tertinggi dan terakhir, yaitu: (1) *Ma'rifatullah* dan *ta'abbud ilallah*; (2) mampu berperan sebagai *khalifatullah fi al-ard*, yang hakikatnya juga sebagai ibadah kepada Allah; dan (3) memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan diakhirat. Tujuan tersebut dapat tercapai manakala seseorang memiliki kualitas tertentu, dengan variabel utama sebagaimana disebutkan di dalam al-Qur'an yaitu; manusia yang beriman (tauhid), amal saleh, takwa, dan *ulul albab*

(kemampuan ilmu pengetahuan, kemampuan zikir dan pikir yang kuat).

Perhatian K.H. Abdurrahman Ambo Dalle sangat besar terhadap ilmu pengetahuan dan mengajarkannya kepada generasi ke generasi. Menurutnya, belajar dan mengajar adalah suatu pekerjaan yang sangat mulia di sisi Allah swt. dan juga sangat mulia dalam perspektif manusia. Di samping itu, belajar dan mengajarkan ilmu pengetahuan adalah berfungsi sebagai ibadah dan salah satu jalan pengabdian kepada Allah swt.

Kedudukan guru adalah komponen penting dalam sistem pendidikan. Bagi K.H. Abdurrahman Ambo Dalle seorang guru harus orang yang melaksanakan ajaran agama dengan baik, berakhlak dan memiliki kemampuan mendidik, layak menangani tugas pendidikan, sehingga tujuan pendidikan yang diharapkan tercapai. Guru harus mampu mengenali kemampuan yang dimiliki anak didiknya, baik dalam aspek perkembangan kecakapan maupun keseriusannya dalam belajar, kehadiran dan akhlak budi pekertinya.

Metodologi, dalam konteks mengajar sangat berkaitan erat dengan tujuan penyampaian dimensi ilmu pengetahuan secara efektif. Secara umum, konteks metode pembelajaran K.H. Abdurrahman Ambo Dalle, yaitu pemahaman konsep. Secara praktis, metode ini digunakan dengan cara menjelaskan maksud teks dan konteks ilmu pengetahuan yang diajarkan dan memberikan ruang tanya jawab dan diskusi kepada anak didik sehingga merasa puas dan memahami materi pembelajaran.

Selain memakai metode tersebut di atas ia juga mengembangkan metode latihan dan pengalaman, metode keteladanan, pembiasaan, dan metode kisah. Metode ini bertujuan untuk membangkitkan motivasi psikologis, pengembangan jiwa serta moral spiritual. Karena akhlak mulia merupakan syarat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Jadi, sistem yang ditawarkan oleh K.H. Abdurrahman, telah mencakup aspek kognitif, afektif, dan

psikomotor yang didasarkan kepada kesadaran, ketelitian, dan tepat melaksanakan pembelajaran.

Dalam praktiknya, sistem pengelolaan pendidikan yang dikembangkan oleh K.H. Abdurrahman Ambo Dalle, mengombinasikan sistem pendidikan tradisional (sistem *halaqah*) dan sistem klasikal. Bagi sekolah dan madrasah ia menggunakan sistem kalsikal dan bagi santri yang tingkatannya sudah tinggi di samping mengikuti sistem kalsikal juga mengikuti sistem *halaqah*.

E. NALAR PENDIDIKAN K.H. ABDURRAHMAN AMBO DALLE

Memerhatikan beberapa pandangan konseptual K.H. Abdurrahman Ambo Dalle tentang pendidikan, bertumpu pada konsep pendidikan yang mengutamakan tauhid, syari'ah dan *akhlak al-karimah* yang bertujuan untuk mencapai kesempurnaan manusia di dunia dan di akhirat.

Implikasinya dalam pendidikan adalah, *Pertama*, pendidikan memungkinkan manusia mengerti Tuhannya secara benar, sehingga semua perbuatannya terbingkai ibadah yang dilakukan dengan penuh penghayatan akan keesaan-Nya. *Kedua*, pendidikan harus menggerakkan seluruh potensi manusia untuk memahami *Sunnahtullah* di bumi, menggantinya, dan memanfaatkannya untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi kehidupan (*rahmatan li al 'alamin*).

Nalar pendidikan yang dikembangkan K.H. Abdurrahman Ambo Dalle di atas, berorientasi kepada ide-ide pendidikan bercorak *theocentris* (berpusat kepada Tuhan), spiritualitas, dan humanis. Dengan demikian, konstruk pemikiran pendidikan K.H. Abdurrahman Ambo Dalle sesungguhnya bercorak filsafat pendidikan idealis.

Idealisme dalam filsafat adalah aliran pemikiran filsafat yang kental dengan corak metafisik. Idealisme memandang bahwa realitas itu tidak lain adalah ide-ide, akal, pikiran, atau jiwa, bukan

benda-benda materil (Teguh Wangsa Gandhi, 2011: 138). Menurut filsafat idealisme, pendidikan mengandung bertujuan untuk individual, masyarakat, dan tujuan yang berkaitan dengan Tuhan. Pendidikan, idealnya adalah sintesis tujuan yang bersifat individual dan tujuan yang bersifat sosial yang terejawantahkan dalam kehidupan yang berkaitan dengan Tuhan (Eka Yanuarti, 2016:153).

Relevan dengan nalar filosofis-idealisme K.H. Abdurrahman Ambo Dalle, Al-Ghazali juga merupakan salah satu penganut aliran idealisme menjelaskan tujuan pendidikan, yaitu tercapainya kesempurnaan manusia yang bermuara pada pendekatan diri kepada Allah dan kesempurnaan manusia yang bermuara pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Hal senada juga dikemukakan oleh Muhammad Fadhil al-Jamali, bahwa tujuan hakiki pendidikan sesungguhnya adalah “*ma’rifatullah* dan *taa’t* beribadah kepada-Nya” (Muhammad Fadhil al-Jamali: tth).

Untuk mencapai tujuan ideal pendidikan ini, diperlukan kemampuan memahami status kemakhlukannya, hubungan dengan sisolannya, dengan alam sekitarnya, dan memahami Allah zat pencipta-Nya. Inilah yang mendasari K.H. Abdurrahman Ambo Dalle, menghendaki bangunan materi dan kurikulum pendidikan tidak ada bebas nilai. Karena, secara epistemologis, menurut K.H. Abdurrahman Ambo Dalle, ilmu pengetahuan itu hakikatnya adalah bersumber dari Allah swt yang dapat diperoleh manusia baik dari hasil penalaran maupun intuisi, baik itu ilmu yang bersumber dari refrensi ayat *qauliyah* maupun dari ayat *kauniyah*.

Ilmu pengetahuan sebagai isi pendidikan, telah tertuang dan dipersiapkan oleh Allah swt lewat ayat-ayat-Nya (*qauliyah* dan *kauniyah*) sesuai dengan fitrah manusia. Artinya, memenuhi dorongan asasi manusia yaitu keingintahuan (*curiosity*) terhadap segala sesuatu. Menurut Ibnu Khaldum, ilmu pengetahuan dan pembelajaran adalah *tabi’i* (pembawaan) manusia karena adanya kesanggupan berpikir (Ibnu Khaldum: tth).

Secara teologis, mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang merupakan implementasi fitrah keingintahuan itu pada hakikatnya proses identifikasi diri dengan “*al-‘Alim*” (Allah Yang Maha Tahu) (Achmadi, 2015:127). Sehingga, kesadaran ilmiah akan terbangun secara integratif. Hanya saja, dalam konteks ini, K.H. Abdurrahman Ambo Dalle belum mempertegas konstruksi integrasi keilmuan yang harus dibangun dan dikembangkan dalam pendidikan. Namun, fondasi filosofisnya sudah diletakkan oleh K.H. Abdurrahman Ambo Dalle, baik secara filosofis, epistemologis, maupun aksiologisnya.

Secara epistemologi keilmuan K.H. Abdurrahman Ambo Dalle, relevan dalam pandangan epistemologi idealisme, yaitu keberadaan kualitas atau obyek-obyek pengetahuan yang diserap oleh indera, memiliki ketergantungan kepada adanya kesadaran yang utuh, sehingga manusia dapat menemukan kebenaran yang hakiki.

Oleh karena itu, secara aksiologis, transinternalisasi nilai dalam proses pendidikan dan pembelajaran tidak terbatas menjadi tanggung jawab pendidikan agama sebagai sebuah bidang studi, tetapi terintegrasi dalam seluruh bidang-bidang studi yang lain. Implikasinya, guru bidang studi non agama dalam sistem pendidikan Islam juga harus memiliki komitmen terhadap pendidikan keimanan dan nilai-nilai moral yang terkait dengan bidang-bidang studi tertentu. Sehingga dimensi nilai dalam memperoleh dan mengembangkan ilmu pengetahuan tidak terlepas dari nilai-nilai transendental yang berdampak *ta’abbud ilallah*, baik bersifat lahiriyah maupun batiniyah.

Dalam konteks orientasi pembelajaran, K.H. Abdurrahman Ambo Dalle berbeda dengan rumusan orientasi pendidikan yang dikembangkan oleh *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) di Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu; *learning to know, learning to do, learning to be*, dan *learning to live together*. Bagi K.H. Abdurrahman Ambo

Dalle, orientasi pendidikan sangat penting dan utama diarahkan pada “*learning to worship*”. *Learning to worship*, menyiratkan bahwa setiap individu-manusia dididik untuk memiliki kesadaran untuk mengabdikan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bukan sekadar dididik untuk berpengetahuan (*learning to know*), produktif-inovatif (*learning to do*), bisa mandiri dan percaya diri (*learning to be*), dan solidaritas sosial (*learning to live together*).

Secara filosofis, seorang pendidik harus menumbuhkembangkan potensi jasmaniah dan rohaniyah peserta didik yang memiliki kesadaran terhadap asal-mula, eksistensi, dan tujuan kehidupannya sebagai makhluk ciptaan Allah swt. melalui berbagai pendekatan dan metode mengajar yang mendorong peserta didik untuk memperluas cakrawala, berpikir-reflektif, memberikan keterampilan berpikir logis, mendorong kesadaran moral, dan pembentukan *akhlak al-karimah*.

F. GLOBALISASI DAN NALAR PENDIDIKAN ISLAM **K.H. ABDURRAHMAN AMBO DALLE**

Istilah globalisasi merupakan sebuah istilah yang dipakai oleh para pakar untuk menjelaskan realitas kehidupan di dunia saat ini terjadi secara saling memengaruhi dan saling berinteraksi satu sama lainnya. Robertson dalam Mochtar Buchori secara akurat mendefinisikan globalisasi itu sebagai “*the compression of the world into a single space and the intensification of consciousness of the world as a whole*,” (pemadatan dunia menjadi satu ruang tunggal dan terjadi peningkatan kesadaran tentang dunia ini sebagai satu kesatuan) (Muhktar Bukhori: 2001).

Anthony Giddens, mengilustrasikan globalisasi sebagai proses yang berjalan dengan kecepatan tinggi yang tidak seorang pun yang mampu mengendalikannya. Meminjam istilah Alvin Tofler, globalisasi merupakan “*future shock*” (kejutan masa depan) untuk menggambarkan situasi yang membuat manusia terlempar pada suatu kondisi di mana tekanan mampu mendistorsi semua

dimensi kehidupan manusia yang disebabkan hadirnya perubahan dalam waktu yang terlalu singkat dan cepat.

Bahkan, perubahan dunia kini tengah memasuki era revolusi industri 4.0 atau revolusi industri dunia ke empat dimana teknologi informasi telah menjadi basis dalam kehidupan manusia. Era industri 4.0, adalah sebuah era baru yang menekankan pada pola *digital economy*, *artificial intelligence*, *big data*, *robotic*, dan sebagainya. Era ini pula disebut sebagai era disrupsi (Renald Kasali, 2017:149).

Era globalisasi dan disrupsi menjadikan segala hal tanpa batas (*borderless*) dengan penggunaan daya komputasi dan data yang tidak terbatas, karena dipengaruhi oleh perkembangan internet dan teknologi digital yang masif sebagai tulang punggung pergerakan dan konektivitas manusia dan mesin. Robot dan komputer mengambil alih 50% pekerjaan otot dan otak manusia. Era ini juga akan mendisrupsi berbagai aktivitas manusia, termasuk di dalamnya dunia pendidikan.

Globalisasi menyebabkan perubahan sosial yang memunculkan nilai-nilai yang bersifat pragmatis, materialistis dan individualistik. Secara langsung, dunia pendidikan Islam di era ini menghadapi suatu tantangan yang begitu signifikan. Dalam implementasinya pendidikan Islam dihadapkan pada perkembangan zaman dan teknologi yang juga berdampak pada pergeseran dan posisi pendidikan Islam. Dalam konteks pendidikan Islam, era ini menjadi tantangan yang harus dihadapi dan dipecahkan sebaik mungkin baik pada kemampuan mempersiapkan manusia terdidik yang kompetible, maupun kemampuan *survive* serta kontributif secara signifikan dalam memenuhi tuntutan zaman sesuai kebutuhan masyarakat.

Meski era disrupsi dan revolusi industri 4.0 memberikan sejumlah dampak terhadap dunia pendidikan (Islam), namun peranannya tetap diharapkan untuk memperkuat karakter manusia untuk hidup di era tersebut. Posisi pendidikan Islam jelas perlu

dikembangkan, bukan saja memperkuat aspek nalar-rasionalitas *output*-nya, tetapi juga untuk spiritualitasnya. Alasannya adalah karena pendidikan Islam melambangkan semangat Islam secara umum, ia bercita-cita membangun manusia menuju pencapaian nilai-nilai kemanusiaan, peran pendidikan untuk menghubungkan antara realitas dan nilai-nilai secara komprehensif sehingga tidak melahirkan “manusia yang terbelah” (*split personality*) dalam menghadapi segala perubahan konteks zamannya.

Pendidikan harus dapat menjawab tuntutan masyarakat di era global dan revolusi industri 4.0 saat ini. Dalam perspektif Emile Durkheim, secara fungsional pendidikan harus menjalankan fungsi “*baby sitting*”. Artinya, pendidikan harus bisa menjalankan fungsi perawatan dan pemeliharaan serta pencegah generasi muda (*the healing place in the society*) dari kemungkinan mengidap patologi sosial modern (*anomie*) (Jeannae H. Ballantine, 2001:7). Analisa Durkheim ini sangat relevan dalam konteks saat ini, di mana generasi muda memerlukan alternatif pendidikan yang membekali sejumlah pengetahuan dan *skill*, plus tata nilai.

Pendidikan Islam, secara eksistensial dipandang tepat sebagai alternatif pendidikan abad millenial menampilkan konstruksi pendidikan yang sekedar memicu kecerdasan otak, tetapi sekaligus juga kecerdasan emosional dan spiritual bagi tumbuhnya kearifan sosial menghadapi konsekuensi logis era global dan era disrupsi. Penting bagi pendidikan Islam eksis di era global untuk bisa memberi jaminan tumbuhnya kearifan hidup. Dengan kearifan inilah yang menjadikan manusia hidup dengan *survive* dan tetap memiliki “daya tahan” dan “daya ber-Tuhan” di tengah-tengah derasnyanya arus gelombang kehidupan modern.

Pondasi filosofi pendidikan berbasis nalar *spirituality* yang ditawarkan K.H. Abdurrahman Ambo Dalle, sangat relevan dalam memperkuat dimensi nilai moral-spiritual sebagai sistem imun diri menghadapi kehidupan modern. Dimensi ini, bukan saja memperkuat daya ber-Tuhan, tetapi juga “daya tahan” menghadapi

derasnya dampak negatif globalisasi. Selain itu, daya *survival* pendidikan Islam didukung dengan kreativitas dan inovasi yang rasional dan edukatif dapat menggerakkan seluruh potensi manusia untuk memahami *sunnatullah* di bumi, menggantinya, dan memanfaatkannya dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi kehidupan manusia.

G. KESIMPULAN

Learning to worship, sebagai konsep *visible* yang diletakkan oleh K.H. Abdurrahman Ambo Dalle dalam membangun pendidikan (Islam) sangat relevan dijadikan sebagai bangunan kerangka filosofi pendidikan di era global saat ini. Tanpa menafikan dimensi rasionalitas dan kreativitas, dimensi spiritual dijadikan pilar utama dalam pemebentukan *insan kamil*. Spiritualitas memperkuat “daya tahan” dan “daya ber-Tuhan” menghadapi tantangan kehidupan, sedangkan dimensi rasionalitas dan kreativitas memperkuat kemampuan *survive* manusia untuk berkempetisi dalam meraih kesejahteraan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat menurut ukuran Islam.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, H., *Menalar Tasawuf Anregurutta Ambo Dalle: Tela'ah Terhadap Kitab Al-Qaul al-Sahdiq fi Ma'rifat al-Khalik*. Jakarta: Dialektika, 2013.
- Achmadi, *Ideologi Pendidikan Islam: Paradigma Humanisme Teosentris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Ahamd, Abdul Kadir, *Ulama Bugis*. Makassar: Indobiss Publishing, 2008.
- Ambo Dalle, H. Abdurrahman, *Al-Nukhbat al-Mardiyah*. Parepare: Al-Kahaeriyah, 1963.

- Ambo Dalle, H. Abdurrahman, *Al-Qaul al-Shadiq fi Ma'rifat al-Khalik*. Pare-pare: Al-Khaeriyah, 1976.
- Ambo Dalle, H. Abdurrahman, *Hilyah al-Syabab fi Ilmu al-Akhlak wa al-Adab*. Pare-pare: Al-Khaeriyah, 1389 H.
- Ambo Dalle, H. Abdurrahman, *Miftahul Ulum fi Mi'yar al-Ulum*. Pare-pare: Al-Khaeriyah, tt.
- Ambo Dalle, H. Abdurrahman, *Mursyid al-Thullab*. Parepare: Al-Khaeriyah, 1978.
- Anshoriy, H.M. Nasruddin, *Anregurutta Ambo Dalle: Maha Guru dari Bumi Bugis*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2009.
- Ballantine, Jeannae H., *The Sociology of Education: A Systematic Analysis* (New Jersey: Prentice Hall, 2001).
- Boland, B.J., *The Struggle of Islam In Modern Indonesia*. The Hague, Martinus Nijhoff, 1971.
- Bukhori, Muhktar, *Pendidikan Antisipatoris*. Cet. I; Jakarta: Kansius, 2001.
- Gandhi, Teguh, *Filsafat Pendidikan: Mazhab-Mazhab Filsafat Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2011.
- Giddens, Anthony, *Runaway World: How Globalization Is Reshaping Our Lives*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Jamali, Muhammad Fadhil, *Filsafat Pendidikan dalam Al-Qur'an*. Terj. Djudi al-Falasanya . Surabaya: Bina Ilmu, 2014.
- Kasali, Renald, *Disruption*. Jakarta: PT. Gramedia, 2017.
- Khaldun, Ibnu, *Muqaddimah*. Juz I; Dar al-Fikr, tth.
- Maqbul, K.H. Abdurrahman Ambo Dalle: *Studi Tokoh Dakwah dan Pendidikan Islam di Sulawesi Selatan*. Makassar: Fakrush UMI, 2010.

- Mursalin, *Pemikiran Tasawwuf Anregurutta Ambo Dalle: Telaah atas Kitab Al-Qaul al-Shadiq fi Ma'rifat al-Khalik*. Jurnal Fenomena, Vol. 7 No. 2 Tahun 2015.
- Rizal, Ahmad Syamsul, *Filsafat Pendidikan Islam Sebagai Landasan Membangun Sistem Pendidikan Islami*, Jurnal Ta'lim: Jurna Pendidikan Agama Islam, Volume 12 No. 1 Tahun 2014.
- Said, A. Ahmad Rasyid, *Anregurutta Ambo Dalle: Lentera dari Tanah Bugis*. Mangkoso: Al-Misykat, 2013.
- Suradi, A., “*Globalisasi dan Respon Pendidikan Agama Islam di Sekolah*”. Jurnal Mudarrisuna, Vol. 7 Juli-Desember 2017.
- Yanuarti, Eka, *Filsafat Pendidikan dalam Perspektif Filsafat Idealisme*, Belajea: Jurnal Pendidikan Islam, STAIN Curup Bengkulu, Voleme 2 Tahun 2016.
- Yusrie, H.M., *Corak Pemikiran Pendidikan Keagamaan K.H. Abdurrahman Ambo Dalle*. Jakarta: Rabbani Press, 2012.

REPOSISI GERAKAN DAKWAH KULTURAL PONDOK PESANTREN DALAM MENYEBARKAN NILAI-NILAI ISLAM WASATHIYAH

6

A. PENDAHULUAN

Sejak didirikan oleh para ulama, pondok pesantren mengembang misi pendidikan. Di dalam “rahim” pondok pesantren, para santri memperdalam ajaran agama (*tafaqquh fi al-din*) secara *kaffah*. Di samping itu, para ulama beserta santrinya juga melayani kebutuhan yang lebih luas dari masyarakat sesuai dengan misi yang diembannya, sehingga pondok pesantren pun tidak terlepas sebagai pusat dakwah Islamiyah.

Pondok pesantren, menjadi salah satu pilar penting dalam dunia pendidikan dan dakwah yang efektif sejak awal Islam berkembang di nusantara sampai saat ini. Peran dan kontribusi yang diberikan kepada masyarakat muslim di Indonesia sangat besar, baik dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) maupun dalam bidang penyebaran dan pemahaman ajaran Islam yang *rahmatan li al-‘alamin* melalui gerakan dakwah dan pendidikan.

Efektivitas penyebaran dakwah Islam yang bermuara dari pondok pesantren dalam *setting* sosio-historisnya, tidak terlepas dari peran para ulama dan santrinya yang menampilkan karakteristik Islam yang inklusif (*infitah*), moderat (*tawassuth*), persamaan (*musawah*), dan seimbang (*tawazun*) (Nunu Ahmad

An-Nahidl, 2006:17). Karena itu, pondok pesantren tampil dengan elegan dan sangat mudah diterima oleh komunitas masyarakat dalam gerakan dakwah keagamaan yang berbasis pada tradisi Islam *Ahlusunnah Wa al-Jama'ah* (selanjutnya; *Aswajah*) khas Indonesia (Islam Nusantara).

Namun demikian, seiring dengan perkembangan komunitas muslim serta kemajuan teknologi di era global dewasa ini, menghendaki perubahan paradigma dan pola aksi gerakan dakwah yang telah “mencultural” dilakukan dunia pesantren. Dunia pesantren dituntut memperkokoh gerakan dakwah dalam konteks modern tanpa kehilangan identitas *indigenous*-nya. Pondok pesantren, harus terus beradaptasi dan mereposisi gerakan pendidikan dan dakwahnya sesuai dengan *trend* perkembangan masyarakat modern dan mampu menghadap pelbagai tantangan, baik tantangan yang bersifat internal, eksternal, maupun global.

Sebagai lembaga penguatan keagamaan Islam *Aswajah*, pondok pesantren diharapkan tetap eksis dan *survive* menyebarkan nilai-nilai *Islam Wasathiyah* di tengah-tengah munculnya gerakan Islam eksklusif atas nama dakwah dan jihad. Ajaran dakwah, *amar makruf nahi mungkar*, dan jihad, dijadikan bahan legitimasi yang efektif bagi pihak atau kelompok tertentu untuk mendukung gerakan radikalisme dengan menampilkan “ayat-ayat konfrontatif” yang ditafsir secara eksklusif, tekstual-literalis. Bahkan, secara massif gerakan dakwah kelompok ini secara efektif mendayagunakan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta melibatkan proses psikologis dan kognitif tertentu sehingga mampu merubah *mindset* serta cara pandang dan sikap keberagamaan umat (Nurjannah, 2013: 195).

Oleh karena itu, reposisi gerakan dakwah kultural pondok pesantren sebagai kekuatan penyeimbang dalam meng-*counter* penyebaran paham keagamaan yang menyimpang dari prinsip, nilai, dan misi Islam *rahmatan li al-'alamin* secara moderat menjadi keharusan dalam rangka mempertegas peran dan

kontribusi pondok pesantren dalam membangun peradaban Islam di Nusantara dan perdamaian Dunia.

B. PONDOK PESANTREN: PERSPEKTIF EDUKASI DAN DAKWAH KULTURAL

Secara terminologis, istilah pesantren telah mengisyaratkan adanya interaksi yang harmonis antara Islam dengan budaya lokal (nusantara). Konon, pesantren merupakan serapan dari bahasa Sanskerta, “*sastrī*”, yang berarti orang yang pandai membaca kitab suci. “Pesantren” sendiri dimaknai sebagai tempat penganut agama Hindu dan Budha yang menyelenggarakan pembelajaran dalam rangka memahami kitab suci mereka. Dan, pada gilirannya, istilah tersebut lebih sering digunakan dan bahkan menjadi istilah khas lembaga pendidikan Islam Indonesia. Adapun kata “pondok” yang melekat pada pesantren dimaknai sebagai rumah, asrama, atau tempat tinggal sederhana yang ditempati santri menuntut ilmu (Babun Suharto, 2011: 11).

Secara umum, pondok pesantren adalah lembaga “*Iqomah al-din*” yang memiliki dua fungsi utama, yaitu; (1) sebagai pusat *tafaqquh fi al-din* (pengajaran, pemahaman, dan pendalaman ajaran Islam) berbasis kitab-kitab *turats* Islam, dan; (2) fungsi *indzar* (menyampaikan atau mendakwahkan ajaran Islam kepada masyarakat) (Hariya Toni, 2016: 19). Dari segi latar belakang historisnya, pondok pesantren tumbuh dan berkembang dengan sendirinya menjalankan kedua fungsi utama tersebut di dalam masyarakat di mana terdapat implikasi-implikasi sosio-kultural bahkan politik yang menggambarkan sikap ulama-ulama Islam sepanjang sejarah.

Sebagai lembaga pendidikan, pondok pesantren eksis membekali santrinya dengan berbagai ilmu pengetahuan agama yang *kaffah*, mengajarkan cara hidup berinteraksi dengan berbagai ragam budaya, dan bahkan belajar tentang perbedaan mazhab dan pemikiran. Selain itu, pendidikan pondok pesantren teruji

menginternalisasikan nilai-nilai keutamaan, seperti keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, dan kebebasan berpikir terkait keilmuan. Hal ini tentu menjadi modal kuat dan potensi dasar dalam menyiapkannya Da'i yang berwawasan Islam moderat.

Dalam menjalankan fungsi dakwah, pondok pesantren lebih memilih pendekatan dakwah kultural dibanding dakwah eksklusif. Dakwah kultural adalah aktivitas dakwah yang menekankan pendekatan "Islam kultural" (Sakareeya Bungo, 2012: 214). Dakwah kultural adalah kegiatan dakwah dengan memerhatikan potensi dan kecenderungan manusia sebagai makhluk budaya secara luas dalam rangka menghasilkan kultur baru yang bernuansa Islami atau kegiatan dakwah dengan memanfaatkan adat, tradisi, seni dan budaya lokal dalam proses menuju kehidupan Islami.

Pendekatan dakwah kultural pondok pesantren memberikan peluang dialog antara budaya dan keyakinan (*intercultur faith understanding*). Gerakan dakwah pesantren seperti ini, tentu memiliki konsentrasi dan cita-cita mempertahankan kesatuan dan keutuhan bangsa atas dasar *ukhuwah insaniyah*, *ukhuwah basyariah*, *ukhuwah Islamiyah* dan *wathaniyah*. Dan ini dipandang lebih penting dan sesuai dengan konteks ke-Indonesiaan yang memiliki kultur tampilan sistem keagamaan yang ramah dan moderat sekaligus sangat bersikap universal. Pesantren menolak segala bentuk kekerasan, intoleran, radikal dan ekstrim, terlebih dengan mengatas namakan agama dan gerakan dakwah. Spirit dakwah pesantren berusaha hadir dengan melindungi "siapa saja", dan mengembalikan pengertian Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*.

C. TANTANGAN DAN PELUANG GERAKAN DAKWAH PESANTREN DI ERA GLOBAL

Dalam konteks kekinian, pesantren diperhadapkan dengan dua arus besar yang berasal dari luar dan dalam Islam, yakni: “*Globalization*” dan “*Radikalism*”.

1. *Pondok Pesantren dan Tantangan Global*

Globalisasi meniscayakan terintegrasinya belahan dunia manapun. Sekat-sekat spasial antar wilayah menjadi terbuka dan tampak begitu transparan. Keterbukaan informasi ini akan berdampak pada tergerusnya eksistensi budaya lokal. Pesantren sebagai entitas yang bertugas melakukan konservasi terhadap kearifan lokal melalui basis gerakan kultural terguncang identitasnya untuk bisa memosisikan diri di tengah gencarnya paham dan budaya impor yang merusak (kemoderenan yang *mudhir* [*dharar*]).

Globalisasi kini hadir menjadi kekuatan yang terus meningkat, dan dapat menimbulkan aksi dan reaksi dalam kehidupan. Globalisasi melahirkan dunia yang terbuka untuk saling berhubungan, terutama dengan ditopang teknologi informasi yang semakin canggih. Topangan teknologi informasi dan komunikasi ini pada gilirannya sangat potensial mengubah segi-segi kehidupan, baik kehidupan material maupun kehidupan mental-spiritual.

Globalisasi merupakan sebuah fenomena kompleks dan sebagai efek domino atas laju modernitas yang memiliki dampak sistemik terhadap semua dimensi kehidupan umat manusia (A. Suradi, 2017: 247), termasuk dalam beragama dan berdakwah. Proses globalisasi dengan segala konfigurasinya yang imanen dan berdimensi global hampir menyentuh seluruh tradisi agama yang mempunyai kekuatan norma, nilai, dan makna bagi kehidupan kolektif. Dengan demikian, kehidupan beragama di era globalisasi tentu diperhadapkan pelbagai tantangan, di antaranya munculnya

ide-ide kosmopolitan yang menyimpang dari *frame* ke-Islaman yang *rahmatan li al-‘alamin* secara bebas dan terbuka.

Globalisasi menjadikan segala hal tanpa batas (*borderless*) dengan pendayagunaan daya komputasi dan data yang tidak terbatas. Kondisi ini sebagai dampak perkembangan internet dan teknologi digital yang masif sebagai tulang punggung pergerakan dan konektivitas manusia saat ini. Lompatan perubahan dunia di era global inilah yang disebut era revolusi industri 4.0 di mana teknologi informasi telah menjadi basis dalam kehidupan manusia. Era ini juga disebut sebagai “era disrupsi” (Renald Kasali: 2017). Sebuah era yang menekankan pada pola digital, *artificial intelligence*, *big data*, dan sebagainya. Hal ini, tentu memengaruhi bahkan akan “mendisrupsi” berbagai aktivitas manusia, termasuk di dalamnya aktivitas di bidang gerakan pendidikan dan dakwah para da’i pondok pesantren.

2. *Pondok Pesantren dan Tantangan Radikalisme*

Selain globalisasi, tantangan dari dalam berupa radikalisme tidak kalah berbahayanya. Radikalisme merupakan faham, wacana dan aktivisme yang berupaya mengubah sistem politik, ekonomi, sosial dan budaya yang ada secara radikal. Radikalisme juga menegaskan pemahaman yang dianggap bukan berasal dari Islam, termasuk tradisi dan terkesan sangat memaksakan. Wajah Islam yang tadinya tampak teduh dan *ihsan* berubah menjadi buram yang sarat dengan kekerasan. Parahnya, hal ini juga dilegitimasi dengan ayat-ayat yang tentu saja dimaknai secara subjektif dan tekstual oleh kelompok ini.

Bahkan, seiring dengan perkembangan politik nasional dan global beberapa dekade terakhir, sebagian pondok pesantren pun di Indonesia dipersepsi atau “dituduh” sebagai institusi pendidikan yang berkontribusi besar terhadap tumbuhnya faham dan gerakan garis keras yang radikal dan fundamentalis. Terdapat sejumlah pondok pesantren oleh “sementara pihak” diberi label sebagai

tempat penyemai pelaku teror dan radikal di Indonesia. Pondok pesantren tidak lagi sepenuhnya dianggap preferensi penguatan Islam *rahmatan li al-'alamin*, akan tetapi sudah dipersepsikan sebagai sumber penyemaian radikalisme “berjubah” gerakan dakwah dan jihad keagamaan yang *legitimite*.

Dalam konteks Indonesia, tentu tidak dengan semudah itu menganggap pondok pesantren sebagai tempat “perkecambahan radikalisme”. Terlebih lagi, pondok pesantren di Indonesia pada *setting* sejarahnya, umumnya didirikan oleh ulama-ulama Nusantara dan kaum muslim modernis yang kredibilitas dan integritas keagamaan dan kebangsaannya tidak diragukan.

Secara umum, gerakan radikalisme Islam tidak dapat dilepaskan dari konteks gerakan Islamisme global yang berorientasi untuk “mendiskreditkan” Islam (Ahmad Darmadji, 2011: 236). Meskipun secara faktual memang tidak dapat dihindari bahwa sebagian besar pelaku aksi radikalisme dan terorisme atas nama Islam di Indonesia adalah alumni madrasah atau pondok pesantren. Namun demikian, menganggap seluruh lembaga pendidikan jenis tersebut sebagai sumber ajaran radikalisme dan teoririsme juga merupakan kesalahan mendasar mengingat karekteristik dan pola pengembangan lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang amat beragam. Apalagi sejak awal lembaga pendidikan pondok pesantren telah menunjukkan dirinya sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang ikut memperkokoh bangunan Islam di Nusantara. Pondok pesantren juga telah menunjukkan perannya dalam menjaga stabilitas politik melalui pengakuan dan penerimaan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia secara final.

3. *Mentransformasi Tantangan Menjadi Peluang Gerakan Dakwah Wasathiyah*

Realitas tantangan eksternal dari konfigurasi globalisasi, serta tantangan internal gerakan radikalisme Islam, baik dari

internal pesantren maupun dari internal umat Islam itu sendiri sebagaimana diuraikan di atas, sesungguhnya dapat dijadikan peluang dakwah sekaligus mempertegas eksistensi pondok pesantren sebagai penyemai nilai-nilai *Islam Wasathiyah*, bukan Islam radikal sebagaimana yang dituduhkan oleh pihak atau kelompok tertentu.

Pada prinsipnya, globalisasi dalam perspektif Islam adalah sunatullah karena Islam adalah yang bersifat universal, yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad s.a.w sebagai rahmat bagi semesta (*rahmatan li al-'alamin*). Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai hasil budi daya manusia seyogyanya dipergunakan untuk kesejahteraan hidup umat manusia. Relevansinya dengan gerakan dakwah Islam, produk iptek tersebut seharusnya diadopsi oleh para da'i untuk dijadikan sebagai instrumen untuk “menviralkan” ajaran *Islam Wasathiyah* serta memperkokoh dan menjaga stamina kehidupan mental-spiritual umat.

Dengan demikian, kemajuan teknologi komunikasi dan informasi dengan segala bentuk inovasinya (*disruption innovation*), semestinya dijadikan sebagai peluang bagi dunia pondok pesantren untuk mentransformasi atau mereposisi gerakan dakwah “kultural-konvensional” menjadi gerakan dakwah “*cybernetic*” tanpa meninggalkan nilai-nilai kultural (dakwah kultural) yang diperankan selama ini. Mentransformasi gerakan dakwah berbasis *cybernetic* di era revolusi teknologi 4.0 saat ini sangat memungkinkan mengembangkan misi dan akses dakwah secara luas dan global.

D. REPOSISI GERAKAN DAKWAH PONDOK PESANTREN DI ERA GLOBAL

Tidaklah berlebihan jikalau menyebut pondok pesantren sebagai agen bagi berkembang suburnya Islam di Nusantara. Pondok pesantren yang di satu sisi mengajarkan syariat Islam

sebagai landasan berIslam secara benar, di sisi lain juga mengajarkan pentingnya budaya dan kearifan lokal sebagai modal sosial untuk mendakwahkan Islam. Pada akhirnya, usaha untuk "mengislamkan Nusantara" melalui dakwah kultural yang diajarkan dan dipraktikkan para da'i pondok pesantren serta usaha "menusantarakan Islam" melalui akulturasi Islam dengan kultur lokal menemui jalannya. Pondok pesantren sukses dalam gerakan pendidikan dan dakwahnya selama ini, oleh karena para da'i pondok pesantren mengajarkan dan mengajak nilai-nilai ke-Islaman dalam mesyarakat tanpa mengabaikan unsur lokalitas (budaya dan kearifan lokal).

1. Paradigma Dakwah Kultural Pesantren di Era Global

Melihat perkembangan teknologi yang semakin maju saat ini dan semakin eratnya manusia dengan dunia digital, ternyata turut berpengaruh terhadap cara penyampaian dakwah. Model, strategi, dan pendekatan dakwah bukan saja dilaksanakan secara konvensional melalui mimbar di dunia nyata, namun para da'i pesantren sangat urgen "menyentuh" basis dakwah melalui *cybermedia* di dunia maya. SDM da'i pondok pesantren sangat perlu bertransformasi dalam dakwah menyampaikan ajaran agama Islam dengan memanfaatkan teknologi.

Perubahan masyarakat yang fenomenal di era global dan revolusi digital, seharusnya diimbangi dengan adanya perubahan cara berdakwah yang dilakukan oleh para *da'i*. Dakwah tidak boleh jalan di tempat dan menggunakan cara-cara yang konvensional saja. *Performance* dakwah harus dinamis, progresif, dan penuh inovasi. Para da'i perlu menciptakan kreasi-kreasi baru yang ada adaptif dan lebih membumi serta dapat membawa kemaslahatan umat.

Dalam konteks dakwah pondok pesantren, reposisi dan transformasi gerakan dakwah sangat urgen dilakukan. Secara konseptual, paling tidak, ada empat hal yang bisa dilakukan

pondok pesantren dalam membangun gerakan dakwah kultural berbasis *Islam Wasathiyah* di era kontemporer saat ini, yakni: *Pertama*, menjadikan dakwah sebagai objek ilmu yang dapat diteliti dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. *Kedua*, mengubah paradigma ilmu dakwah menjadi ilmu komunikasi Islam dengan cara mensintesis teori-teori ilmu komunikasi dengan teori-teori dakwah yang bersumber dari ajaran dan nilai *Islam wasathiyah*. *Ketiga*, menyiapkan *da'i* yang mampu beradaptasi dengan perkembangan IPTEK. *Keempat*, memanfaatkan berbagai media komunikasi dan informasi yang banyak dipergunakan oleh masyarakat (Abdul Basit, 2013: 76).

Dakwah sebagai objek ilmu, “membaca” fenomena dan problem internal dan eksternal umat untuk dicermati, dikaji, dan dianalisa sebagai objek kajian dan keilmuan dakwah. Sehingga dakwah tidak hanya dianggap sebagai aktivitas “verbalis-retorik” yang tidak membutuhkan landasan keilmuan yang kuat. Oleh karena itu, perlu ada upaya penguatan riset-riset objek dakwah di pondok pesantren berbasis *trend* kebutuhan, penengah, dan solusi problem terhadap keumatan. Hal ini penting, karena pesatnya perkembangan aktivitas dakwah di masyarakat dewasa ini dipandang belum mampu memberikan nalar ilmiah dakwah yang dapat diterima secara efektif.

Relevan dengan konteks ini, maka membangun paradigma baru dakwah mutlak diperlukan. Moh. Ali Aziz (2012: 3), menyatakan bahwa dakwah perlu dilakukan *rebranding* dengan cara membangun landasan filosofis dari keilmuan dakwah dan memperkuat peran organisasi dakwah secara profesional. Perlunya *brand* baru disebabkan karena *term* dakwah dikenal di masyarakat sebagai *term* normatif, kurang *compatible* dengan era modern dan cenderung bersifat keakhiratan. Kalaupun dikenal, dakwah identik dengan ceramah atau *tabligh* (Moh. Ali Aziz, 2012: 3).

Sejalan dengan gagasan Moh. Ali Aziz di atas, mempertegas urgennya perubahan paradigma keilmuan dakwah

menuju komunikasi Islam. Perubahan paradigma keilmuan dakwah menuju komunikasi Islam, menurut Andi Faisal Bakti (2009: 9), dilakukan dengan cara mengadopsi bangunan teori yang ada di dalam ilmu komunikasi umum. Dalam konteks ini, ia membuat matrik tentang ilmu komunikasi Islam (ilmu dakwah) sebagai berikut:

Islamic Communication (Dakwah)	Secular Communication
Tabligh (tandzir, ta'aruf)	Information (SMCR, E-Convergence, Active Recipient)
Taghyir (nafs, qaum, ummah, tauhid)	Change (modernization, dependency, multiplicity)
Amar ma'ruf nahi munkar (amanu, amal shaleh, al-haq, al-sabr)	Development (Diffusion of Innovation, social marketing, participatory, self Help)
Akhlaq (al-maw'izah, al-hikmah, ahsanul mujadalah, al-karimah, la-fitnah, la-zhan, ta'awun, musyawarah/syura)	Ethics / wisdom

Matrik yang diformulasi oleh Faisal Bakti di atas menstressing bahwa teori-teori dakwah dapat dikembangkan dengan cara mengadopsi teori-teori yang berasal dari ilmu komunikasi yang telah kuat landasan teoritis ilmiahnya. Pendapat Faisal Bakti juga relevan dengan pendapat Hamid Mowlana (1996) yang menyatakan bahwa dakwah (*tabligh*) merupakan sebuah teori tentang komunikasi dan etika (*tabligh is a theory of communication and ethics*) (Hamid Mowlana, 1996: 116).

Dengan demikian, konteks dakwah yang dipresentasikan oleh para da'i pondok pesantren dapat berwujud sebagai komunikasi khas yang berbeda dengan komunikasi lainnya, terutama berkaitan dengan cara dan tujuan yang akan dicapai.

Untuk mendukung adanya perubahan paradigma dalam berdakwah ini, para da'i pondok pesantren perlu penguatan kapasitas dan kapabilitas wawasan, ilmu dan kemampuan penguasaan teknis (iptek) yang diperlukan dalam melakukan gerakan dakwah *wasathiyah*. Pondok pesantren harus mengikuti perkembangan teknologi informasi yang berkembang dengan sangat pesat dan menjadikannya sebagai instrumen dakwah. Para da'i tidak boleh gaptek (gagap teknologi), karena jika gaptek akan tertinggal dan bisa saja "terdisrupsi" dalam melakukan gerakan dakwah Islam.

2. Pesantren dalam Konteks Dakwah Cybernetic dan Da'i Virtual

Dalam era modern ini, perkembangan di bidang teknologi informasi sedemikian pesatnya sehingga kalau digambarkan secara grafis, kemajuan yang terjadi terlihat secara eksponensial dan tidak ada yang dapat menahan lajunya perkembangan teknologi informasi (Burhan Bungin, 2008: 143). Amat disayangkan manakala kemajuan teknologi informasi ini tidak dimanfaatkan untuk kepentingan dakwah. Apalagi dalam realitas sekarang ini, hampir sebagian besar masyarakat telah memiliki peralatan teknologi informasi, baik komputer, internet, *hand phone*, dan sebagainya. Ibaratnya, dunia masyarakat sekarang ini adalah dunia teknologi informasi.

Dari laporan berjudul "*Essential Insights Into Internet, Social Media, Mobile, and E-Commerce Use Around The World*" yang diterbitkan tanggal 30 Januari 2018, dari total populasi Indonesia sebanyak 265,4 juta jiwa, pengguna aktif media sosialnya mencapai 130 juta dengan penetrasi 49 persen. Secara

global, total pengguna Internet menembus angka empat miliar pengguna. Untuk pengguna media sosialnya, naik 13 persen dengan pengguna *year-on-year* mencapai 3,196 miliar.

Lajunya perkembangan teknologi informasi yang diiringi dengan semakin bertambahnya pengguna media sosial, khususnya di Indonesia harusnya disahuti dengan baik dan antusias dalam menyebarkan hal-hal yang baik. Penggunaan *cyber* media (media *online*) sebagai sarana dakwah dewasa ini harus menjadi alternatif dalam berdakwah oleh da'i (pengasuh dan santri) pondok pesantren. Pondok pesantren sangat penting membangun media dakwah *cybernetic* (media *cyber* dalam menyampaikan materi-materi dakwah, setiap da'i bisa saja memiliki akun di media sosial seperti; facebook, twitter, LINE, WhatsApp, Path atau media online lainnya seperti; Youtube, Instagram, Weblog, LinkedIn dan sebagainya).

Misbakhul Khoiri (2014), dalam risetnya menyimpulkan bahwa penggunaan media sosial sebagai media dakwah Islam cukup efektif. Hal ini berdasarkan tingginya jumlah respon dan antusiasme pengunjung laman media sosial KH. Abdullah Gymnastiar saat memberikan tausiah melalui *update* status di *facebook*. Fenomena yang sama juga tampak pada Ustad Abdul Somad dalam kurun dua tahun terakhir. Jumlah pengikutnya di *Facebook* mencapai lebih dari 1 juta orang, sementara di Instagram mencapai lebih dari 2 juta orang. Lewat tampilannya di media sosial, Somad mendapat julukan "Dai Sejuta View". Akun YouTubenya, Tafaqquh Video, dilihat lebih dari 50 juta kali.

Realitas ini menunjukkan bahwa peran media sosial (*cyber media*) sangat kuat peran dan pengaruhnya, bukan saja dalam mendongkrak popularitas da'i, tetapi juga dalam penyampaian nilai-nilai ajaran Islam. Hal ini didukung hasil riset Fadly Usman (2016) bahwa materi-materi dakwah Islam yang disampaikan melalui media *online* sangat efektif, khususnya bagi pengguna telepon pintar atau *smartphone*. Berdasarkan hasil penelitiannya,

bahwa sejak usia pelajar sampai dengan usia kerja telah memanfaatkan *smartphone* untuk mendapatkan informasi tentang dakwah Islam 46% dan sangat sering mencari literatur tentang pengetahuan agama melalui media *online* (Fadly Usman, 2016: 7).

Data dan fakta riset di atas semakin mempertegas urgennya pemanfaatan media *cyber* (sosial media) bagi kalangan aktivis dakwah, terutama lembaga pondok pesantren di era globalisasi ini. Tantangan aktivis dakwah di media sosial memang sangat banyak dan beragam, sadar atau tidak aktivis-aktivis dengan pemikiran liberal dan radikal sangat aktif dalam pemanfaatan media sosial ini. Tulisan-tulisannya aktif menghiasi forum-forum website, facebook, twitter, LINE, WhatsApp, Path atau media online lainnya seperti; Youtube, Instagram, Weblog, LinkedIn. Mereka rutin menyebarkan pemikiran liberal dan radikal pemahama yang menyimpang tentang Islam.

Maka dari itu, ketika kita tidak mengambil peran dan mengambil posisi di “ruang” ini, maka masyarakat akan terbangun dalam pemikiran-pemikiran yang jauh dari prinsip dasar ke Islamannya. Sementara, tingkat efektivitas penggunaan media online sebagai sarana dakwah Islam menunjukkan *trend* dewasa ini. Penggunaan *smartphone* merupakan hal yang umum dewasa ini, sehingga peluang dakwah melalui media online menjadi sangat terbuka. Salah satu hasil riset merilis bahwa 47% responden sangat sering menggunakan *smartphone* mereka untuk mencari informasi tentang masalah agama, bahkan 100% pemilik *smartphone* memiliki aplikasi untuk kegiatan ibadah seperti aplikasi pengingat waktu sholat (Athan, Islamic Finder), aplikasi qur’an dan terjemah, aplikasi penghitung untuk berdzikir, dan aplikasi-aplikasi lain seperti do’a sehari-hari, penunjuk arah kiblat, dan lain sebagainya.

Memosisikan pondok pesantren dalam medan dakwah *cybernetic* dan tampil dengan *performance* “da’i virtual” menjadi “keharusan” dalam rangka mengiringi kebutuhan masyarakat yang cenderung mencari ilmu pengetahuan agama dan materi dakwah di

media sosial. Gerakan dakwah pondok pesantren berbasis *cybernetic* diharapkan mampu menembus batas ruang dan waktu penyampaian dakwah secara luas dan efektif dalam menyampaikan pesan-pesan Islam *Wasathiyah* sekaligus menjadi gerakan dakwah penyeimbang dalam meng-*counter* penyebaran paham keagamaan yang menyimpang dari prinsip dan nilai-nilai Islam yang saat ini sangat banyak berseliwan di media *cyber*.

E. PENUTUP

Konsekuensi logis kemajuan iptek dan keluasan informasi berdampak banyak terhadap peningkatan problematika keumatan, derasnya arus pemikiran liberal dan radikal, berseliwarannya pemahaman keagamaan yang terdistorsif, dan sebagainya, mengharuskan pondok pesantren mengambil peran dan posisi penting dalam ruang dakwah "*cybernetic-teknologic*" dengan cara membangun lembaga/media dakwah *cyber* yang dikelola secara profesional dengan tetap mengedapankan prinsip dakwah *wasathiyah*, yaitu; dakwah *bi al-hikmah, bi al-mauidzah al-hasanah*, dan *bi al-mujadalah* secara *ihsan*. Dengan paradigma dan aksi dakwa *cybernetic*, pondok pesantren akan mendorong dinamika Islam dan memperkuat ketahanan nilai-nilai Islam *wasathiyah* dalam aktivitas dakwah yang akomodatif, responsif, dan solutif serta menjadi suluh yang tampil memainkan perannya, baik sebagai penyeimbang, penyaring maupun sebagai pemberi arah hidup yang serba kompleks berdasarkan ajaran Islam yang benar (*Aswajah*).

Daftar Pustaka

- Ahmad, Ahmad An-Nahidl, *Pesantren dan Dinamika Pesan Damai*. Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan. Volume 4, Nomor 3 Juli-September 2006.
- Arifin, H.M., *Kapita Selekta Pendidikan Islam dan umum*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Aziz, Moh. Ali, “*A Roadmap of Rebranding Da’wah*”. Makalah Dipresentasikan pada AICIS, Surabaya, 5-8 Nopember 2012.
- Basit, Abdul, “*Dakwah Cerdas di Era Modern*”. Jurnal Komunikasi Islam Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel. Volumen 03, Nomor 01, Tahun 2013.
- Bungin, Burhan, *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Bungo, Sakareeya, *Pendekatan Dakwah Kutural dalam Masyarakat Plural*. Jurnal Dakwah Tabligh, Volume 15 Nomor 01, Desember 2012.
- Darmadji, Ahmad, “*Pondok Pesantren dan Deradikalisasi di Indonesia*”, Jurnal Millah, Volume XI No. 1 Agustus 2011, h. 236.
- Darus, Baharuddin, “*Pengembangan Kajian Ekonomi Islami pada IAIN di Abad 21*”, dalam Syahrin Harahap (ed.), *Perguruan Tinggi Islam di Era Globalisasi* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998).
- Jamadu, Liberty, “*Dakwah dan Media Sosial, Rahasia Kesuksesan Ustaz Abdul Somad*”.
<https://www.suara.com/teknologi/2018/05/02/071500/dakwah-dan-media-sosial-rahasia-kesuksesan-ustaz-abdul-somad>.
Diakses tanggal, 01 Agustus 2018.
- Kasali, Renald, *Disruption*. Jakarta: PT Gramedia, 2017.

- Khaddad, S. dan H. Khashan, “*Islam and Terrorism*”. *Journal of Conflict Resolution*, Volume 46, Nomor 06, Tahun 2002.
- Khoiri, Misbakhul, *Dakwah Melalui Jejaring Sosial Facebook KH. Abdullah Gymnastiar (Studi Teori Efektivitas Oleh Stewart. L Tubbs dan Silvia Moss)*, Skripsi; Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.
- Mowlana, Hamid, *Global Communication in Transition the End of Diversity*. London: Sage Publication, 1996.
- Muhtarom, *Reproduksi Ulama di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Muslim, *Dakwah dengan Pendidikan Islam*. <http://guzmus93.blogspot.com/dakwah-dengan-pendidikan-islam.html>. Diakses tanggal 30 Juli 2018.
- Mustafa, Jejen, *Pesantren dan Radikalisme*, [http:// www.uinjkt.ac.id/id/pesantren-dan-radikalisme/](http://www.uinjkt.ac.id/id/pesantren-dan-radikalisme/). Diakses, tanggal 30 Juli 2018.
- Nurjannah, *Faktor Pemicu Munculnya Radikalisme Islam Atas Nama Dakwah*. *Jurnal Dakwah*, Volume XIV, Nomor 02 Tahun 2013.
- Nurrahman, “*Pesantren dan Dakwah Kultural*” <http://metrouniv.ac.id/?page=artikel>. Diakses, tanggal 31 Juli 2018.
- Pertiwi, Kusuma, Wahyunanda, “*Riset Ungkap Pola Pemakaian Medsos Orang Indonesia*”. <https://tekno.kompas.com/read/2018/03/01/10340027/riset-ungkap-pola-pemakaian-medsos-orang-indonesia>. diakses, tanggal 31 Juli 2018.
- Suharto, Babun, *Dari Pesantren untuk Umat*. Cet. 19; Surabaya: Imtiyaz, 2011.

- Suriadi, A., “*Globalisasi dan Respon Pendidikan Agama Islam di Sekolah*”. Jurnal Mudarrisuna, Vol. 7 Juli-Desember 2017, h. 247.
- Toni, Hariya, *Pesantren Sebagai Potensi Pengembangan Dakwah Islam*. Jurnal Dakwah dan Komunikasi STAIN Curup, Volume 1 Nomor 1, Tahun 2016.
- Usman, Fadly, “*Efektivitas Penggunaan Media Online sebagai Media dakwah*”. Jurnal Ekonomi dan Dakwah Islam (Al-Tsiqoh). Volume 01 Tahun 2016.

HISTORISITAS PENDIDIKAN ISLAM DI KOTA PALU

7

A. LATAR BELAKANG

Agama Islam masuk dilembah Palu berkisar pada tahun 1650 dibawa oleh Abdullah Raqiy atau Datuk Karama (Haliadi Sadi dan Syamsuri, 2016:1). Sejak Islam masuk di lembah Palu, tentu pendidikan Islam pun berlangsung mengikuti irama dan dinamika perkembangan Islam tersebut. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan Islam di Kota Palu, pada prinsipnya sama usianya dengan pertumbuhan dan perkembangan umat Islam di Kota Palu itu sendiri.

Secara sosiologis, di mana pun ada komunitas umat Islam, di situ ada aktivitas pendidikan Islam yang dilaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi tempat di mana Islam itu berkembang. Pengembangan Islam awal di Palu, dalam pandangan Haliadi Sadi dan Syamsuri diperkenalkan melalui pendekatan mitologis oleh Abdullah Raqiy atau Datuk Karama. Pasca Datuk Karama, agama Islam kemudian dikembangkan oleh *muballigh* asal Sulawesi Selatan dengan pendekatan ideologis. Selanjutnya, agama Islam dikembangkan melalui pendekatan ilmu pengetahuan pada perguruan Islam oleh Sayyid Idrus Aldjufri pada tahun 1930, menyusul Muhammadiyah, Darud Dakwah Wal-Irsyad (DDI), dan organisasi Islam lainnya.

Setting sosial pengembangan pendidikan Islam di Palu yang lahir seiring datangnya Islam dengan ragam pendekatan tersebut, pada mula pertumbuhan dan perkembangannya tampil

dalam bentuk yang sederhana, sampai dengan tahap yang sudah modern dan lengkap dewasa ini. Lembaga pendidikan Islam ini juga telah memainkan fungsi dan peranannya sesuai dengan tuntutan masyarakat dan zamannya (Samsul Nizar, 2011: 279).

Secara fungsional, lembaga pendidikan Islam ini merupakan salah satu sistem yang dimungkinkan berlangsungnya pendidikan masyarakat muslim secara berkesinambungan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam. Adanya kelembagaan dalam masyarakat ini pula dimaksudkan sebagai perwujudan tugas dan tanggung jawab kultural edukatif tokoh-tokoh muslim dalam proses pemberdayaan dan pembudayaan umat melalui aktivitas pendidikan Islam. Dengan demikian, perkembangan dan pertumbuhan pendidikan Islam tersebut antara lain ditandai oleh adanya lembaga-lembaga pendidikan Islam yang amat bervariasi, namun antara satu dan yang lainnya memiliki hubungan substansial dan fungsional.

Dinamika pertumbuhan dan perkembangan lembaga-lembaga pendidikan Islam tersebut selain dipengaruhi oleh faktor internal dari para pendiri atau corak organisasi yang mewadahnya, juga tidak lepas dari pengaruh eksternal yang bersifat global. Kedua pengaruh ini satu dan yang lainnya secara akumulatif berpadu menjadi satu dan menghasilkan bentuk dan corak dari lembaga pendidikan Islam yang bersangkutan.

Oleh karena itu, membicarakan wacana kelembagaan pendidikan Islam di Nusantara khususnya di Kota Palu, merupakan persoalan yang menarik untuk dikaji. Hal ini setidaknya disebabkan oleh empat faktor, yaitu: *Pertama*, lembaga pendidikan merupakan sarana yang strategis bagi proses terjadinya transformasi nilai dan budaya pada suatu komunitas sosial.

Dalam lintas sejarah, kehadiran lembaga pendidikan Islam telah memberikan andil yang sangat besar bagi pengembangan ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. *Kedua*, pelacakan eksistensi lembaga pendidikan Islam tidak bisa

dilepaskan dari proses masuknya Islam di Indonesia dan mengalami akulturasi budaya lokal (adat). *Ketiga*, kemunculan lembaga pendidikan Islam dalam sebuah komunitas, tidak mengalami ruang hampa, akan tetapi senantiasa dinamis, baik dari fungsi dan sistem pembelajarannya. *Keempat*, kehadiran lembaga pendidikan Islam, telah memberikan spektrum tersendiri dalam membuka wawasan dan dinamika intelektual umat Islam (Samsul Nizar: 2011).

Sejalan dengan makin berkembangnya pemikiran tentang pendidikan dan besarnya gelombang kesadaran umat Islam untuk menyiapkan wadah pendidikan anak-anak atau generasinya yang berbasis penguatan pondasi agama dan moralitas, maka didirikanlah berbagai macam lembaga pendidikan Islam mulai dari bentuk tradisional maupun dalam bentuk yang sudah modern, baik diselenggarakan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah.

Kota Palu, sejak awal penyebaran Islam sampai saat ini telah terjadi peristiwa pendidikan Islam dan memiliki banyak “mutiara” pendidik yang telah berjuang memerdekakan masyarakat Palu dari buta aksara, baik Al-Qur’an maupun latin. Para tokoh pendidikan tersebut menyebarkan pendidikan melalui berbagai cara seperti lembaga dakwah, lembaga pendidikan pesantren dan madrasah/sekolah. Untuk itu kajian ini bermaksud melacak akar pertumbuhan dan perkembangan, dinamika, dan peranan lembaga-lembaga pendidikan Islam di Kota Palu.

B. MASUK DAN BERKEMBANGNYA ISLAM DI INDONESIA

Wacana tentang masuknya Islam ke Indonesia, masih terdapat perdebatan dan perbedaan pandangan di kalangan ahli. Setidaknya, ada tiga masalah pokok yang menjadi perdebatan. Tempat asal kedatangan Islam, para pembawanya, dan waktu kedatangannya. Paling tidak, ada tiga teori yang dikembangkan para ahli mengenai masuknya Islam di Indonesia, yaitu; teori

Gujarat, teori Persia, dan teori Arabia (Aceng Abdul Aziz, et.al, 2007:1)

Mempertimbangkan ketiga teori tentang wacana masuknya Islam ke Indonesia di atas, mungkin dapat diambil kesimpulan bahwa Islam sudah diperkenalkan dan ada di Indonesia sejak abad VII Masehi atau abad I Hijriyah, namun perkembangan yang lebih massif baru terlihat pada abad XII-XVI. Pengembangan agama Islam di lembah Palu oleh sejarawan berkisar pada tahun 1650 dibawa oleh Abdullah Raqiy atau Datuk Karama (Haliadi Sadi: 2016).

Pengembangan Islam awal di Palu, dalam pandangan Haliadi Sadi dan Syamsuri diperkenalkan melalui pendekatan mitologis oleh Abdullah Raqiy atau Datuk Karama. Pasca Datuk Karama, agama Islam kemudian dikembangkan oleh *muballigh* asal Sulawesi Selatan dengan pendekatan ideologis. Selanjutnya, agama Islam dikembangkan melalui pendekatan ilmu pengetahuan pada perguruan Islam oleh Sayyid Idrus Aldjufri pada tahun 1930, menyusul Muhammadiyah, Darud Dakwah Wal-Irsyad (DDI), dan organisasi Islam lainnya.

C. PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM

Secara sosiologis, di mana pun ada komunitas umat Islam, di situ ada aktivitas pendidikan Islam yang dilaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi tempat di mana Islam itu berkembang. Dinamika pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam tersebut selain dipengaruhi oleh faktor internal dari para pendiri atau corak organisasi yang mewadahnya, juga tidak lepas dari pengaruh eksternal yang bersifat global. Kedua pengaruh ini satu dan yang lainnya secara akumulatif berpadu menjadi satu dan menghasilkan bentuk dan corak dari lembaga pendidikan Islam yang bersangkutan.

Oleh karena itu, pendidikan Islam di Nusantara khususnya di Kota Palu, merupakan persoalan yang menarik untuk dikaji. Menurut pandangan Samsul Nizar, hal ini penting disebabkan oleh empat faktor, yaitu: *Pertama*, lembaga pendidikan merupakan sarana strategis bagi proses terjadinya transformasi nilai dan budaya pada suatu komunitas sosial.

Dalam lintas sejarah, kehadiran lembaga pendidikan Islam telah memberikan andil yang sangat besar bagi pengembangan ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. *Kedua*, pelacakan eksistensi lembaga pendidikan Islam tidak bisa dilepaskan dari proses masuknya Islam di Indonesia dan mengalami akulturasi budaya lokal (adat). *Ketiga*, kemunculan lembaga pendidikan Islam dalam sebuah komunitas, tidak mengalami ruang hampa, akan tetapi senantiasa dinamis, baik dari fungsi dan sistem pembelajarannya. *Keempat*, kehadiran lembaga pendidikan Islam, telah memberikan spektrum tersendiri dalam membuka wawasan dan dinamika intelektual umat Islam (Samsul Nizar: 2011).

Dilihat dari bentuk dan sifat pendidikannya, lembaga pendidikan Islam tersebut ada yang bersifat informal, formal, dan non formal. Keseluruhan corak dan sifat lembaga pendidikan Islam tersebut, merupakan basis penyebaran sistem pendidikan Islam di Indonesia. Dalam *setting* perkembangannya, geliat pertumbuhan dan perkembangan lembaga pendidikan Islam tersebut di Indonesia disebabkan oleh dua hal, yaitu karena adanya pembaruan di Indonesia dan sebagai respons pendidikan Islam terhadap kebijakan pendidikan Hindia Belanda.

Madrasah di Indonesia, dalam konteks ini merupakan lembaga pendidikan yang dinamis. Interaksi madrasah dengan modernisasi yang berlangsung secara berkelanjutan mendorong munculnya model-model lembaga pendidikan Islam khas Indonesia. Di samping pondok pesantren dan madrasah dengan berbagai model, dewasa ini juga muncul konsep "Sekolah Islam"

yang secara formal berbeda dengan madrasah, baik yang diselenggarakan oleh perseorangan maupun oleh organisasi-organisasi Islam.

Lahirnya beberapa organisasi Islam di Indonesia tersebut, di samping sebagai pengejawantahan dari pada spirit keberagaman, juga didorong oleh timbulnya sikap patriotisme dan rasa nasionalisme serta sebagai respons terhadap kepincangan-kepincangan yang ada di kalangan masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim pada akhir abad ke-19 yang mengalami kemunduran total sebagai akibat eksploitasi politik pemerintah kolonial Belanda Zuhairini, 2005: 158).

Dengan kesadaran berorganisasi yang dijiwai oleh perasaan nasionalisme yang tinggi, menimbulkan perkembangan dan era baru di lapangan pendidikan dan pembelajaran agama Islam. Dan dengan demikian lahirlah Perguruan-perguruan Islam, yang ditopang oleh usaha-usaha swasta yang berkembang pesat sejak awal tahun 1990-an. Organisasi-organisasi Islam yang telah membangun Perguruan-perguruan Islam tersebut, diantaranya; Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Alkhairaat, Darud Dakwah Wal-Irsyad (DDI), Hidayatullah, Wahdah Islamiyah, dan lain sebagainya.

D. HISTORISITAS PENDIDIKAN ISLAM DI KOTA PALU DALAM PERSPEKTIF KELEMBAGAAN

Pendidikan Islam berlangsung beriringan dengan dinamika perkembangan Islam di Kota Palu. Secara historis, pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam di Kota Palu, dikelompokkan ke dalam tiga fase, yaitu: *Pertama*, fase pendidikan Islam bersifat informal-kultural. Fase ini dipetakan dalam dua fase, yaitu fase Datokarama (1650-1703), dan fase *muballigh* informal (1703-1930), *Kedua*, fase pendidikan Islam institutif-kultural (1920-1970-an), dan *Ketiga*, fase pendidikan Islam transformatif-kultural (1970-an sampai sekarang).

1. *Fase Pendidikan Islam Informal-Kultural*

Fase pendidikan Islam “*informal-kultural*”, adalah fase pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam bermula sejak masuknya Islam di Kota Palu sampai datangnya H.S. Idrus bin Salim Al-Jufri. Konteks pendidikan Islam pada fase ini berlangsung masih bersifat sederhana dan dilaksanakan secara informal. Materi pendidikan berkisar ajaran dasar Islam, seperti pengucapan dua kalimat syahadat, pengajaran rukuna iman dan rukun Islam, membaca al-Qur’an, pembelajaran tata cara ibadah, syari’ah, akhlak, tasawuf dan seterusnya, dengan tetap menghormati nilai dan tradisi kearifan lokal yang ada. Proses pendidikan ini dilaksanakan baik oleh Datokarama sebagai pembawa Islam pertama di Palu, maupun oleh para saudagar dan *muballigh* dari tanah Bugis dan Mandar dengan pendekatan kultural.

2. *Fase Pendidikan Islam Institutif-Kultural*

Fase pendidikan Islam “*institutif-kultural*”, adalah fase pendidikan Islam yang terus bertransformasi dari pengajian dan pembelajaran di rumah dan masjid berkembang membentuk institusi atau lembaga pendidikan yang dikelola dan dikembangkan oleh organisasi-organisasi masyarakat (ormas) Islam. Konteks pendidikan Islam pada fase ini tidak terlepas tumbuhnya kesadaran umat Islam mengembangkan pendidikan Islam yang melembaga dengan sistem penyelenggaraan pendidikan, baik formal maupun nonformal. Diantara lembaga pendidikan Islam berbasis ormas Islam yang sangat besar kontribusinya dalam khazanah pendidikan Islam awal di Kota Palu, yaitu: Perguruan Al-Irsyad (1920-an-1930), Perguruan Alkhairaat (1930), Perguruan Muhammadiyah (1967), dan Perguruan *Darud Dakwah Wal-Irsyad* (DDI) (1967).

Perguruan Al-Irsyad ini adalah lembaga pendidikan Islam formal yang paling pertama di Kota Palu yang didirikan oleh di antara kelompok jama’ah Arab Kota Palu sebelum kedatangan

H.S. Idrus Al-Jufri (Guru Tua) pada tahun 1930. Madrasah ini dalam pengembangannya tidak berlangsung lama oleh karena peserta didik dari penduduk lokal tidak ada yang berminat mengikuti pendidikan di lembaga tersebut. Sehingga, ketika Alkhairaat berdiri di Kota Palu oleh H.S. Idrus Aljufri, madrasah ini mengintegrasikan diri ke Perguruan Alkhairaat dan Madrasah Al-Irsyad ditutup. Madrasah ini diperkirakan berdiri pada pertengahan 2020-an.

Perguruan Alkhairaat di Palu secara resmi di buka pada tanggal 30 Juni 1930. Proses pendidikan pada masa awal operasionalisasi perguruan Alkhairaat dilakukan di salah satu rumah penduduk di (rumah Daeng Marotja) di Kampung Baru Ujuna, Kota Palu. Seiring perkembangan dan semakin antusiasnya masyarakat lembah Palu belajar agama Islam, pada tahun 1932 H.S. Idrus bin Salim Aljufri membangun gedung madsarah di belakang rumahnya sendiri. Sejak itulah Perguruan Alkhairaat melaksanakan gerakan pendidikan dalam bentuk formal dan nonformal. Proses pendidikan dan pembelajaran.

Perguruan Muhammadiyah di Kota Palu secara resmi mengembangkan pendidikan pada tahun 1967 dengan membuka Sekolah Menengah Pertanian Atas (SMPA) Muhammadiyah, SD Muhammadiyah (1965) di Masjid Al-Furqan Palu oleh Rusdi Toana, dkk. Meskipun Muhammadiyah sudah masuk di Donggala sejak tahun 1930-an.

Darud Dakwah Wal-Irsyad (DDI) masuk dan berkembang di Kota Palu sejak tahun 1960-an. Gerakan pendidikan belum terlembagakan secara formal, hanya berlangsung dalam pembinaan pendidikan secara nonformal oleh Muballigh dari Sulawesi Selatan, diantaranya: K.H. Abd. Halim Dg. Mattantu, K.H. Awaluddin, dan Abdurrahman Dg. Manessa. Atas dukungan saudagar Bugis di Palu (H. Ambo Sulo), pada tahun 1967 didirikan lembaga pendidikan formal DDI dalam bentuk Pendidikan Guru Agama (PGA) empat tahun.

3. Fase Pendidikan Islam Transformatif-Kultural

Fase pendidikan Islam “*transformatif-kultural*”, adalah fase transformasi pendidikan Islam dengan pengelolaan pendidikan yang merespon tuntutan pendidikan modern dan beradaptasi dengan sistem pengelolaan pendidikan nasional. Fase pendidikan Islam ini, ditandai dengan pengembangan pendidikan formal, bahkan beberapa lembaga pendidikan yang didirikan oleh ormas Islam (seperti; Madrasah Alkhairaat) dinegerikan oleh pemerintah dan mengadopsi sistem pengelolaan dan kurikulum pemerintah. Selain itu, fase ini juga telah dibangun beberapa Madrasah dan/atau Sekolah Islam dalam bentuk Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTs.N), dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN), Perguruan Tinggi Islam Negeri dan Swasta, serta Sekolah-sekolah umum berbasis Islam, seperti SDIT beberapa dekade terakhir ini.

Saat ini terdapat sejumlah lembaga pendidikan Islam yang bersifat formal yang berkembang di Kota Palu, sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 1
Banyaknya Madrasah Ibtidaiyah (MI) Berdasarkan Statusnya
di Kota Palu Tahun 2017/2018

No.	Wilayah Kecamatan	MIN	MIS	Jumlah
01.	Kecamatan Palu Barat		7	7
02.	Kecamatan Tatanga	1	2	3
03.	Kecamatan Ulujadi	-	-	-
04.	Kecamatan Palu Selatan	-	4	4
05.	Kecamatan Palu Timur	-	3	3
06.	Kecamatan	-	-	-

	Mantikulore			
07.	Kecamatan Palu Utara	-	1	1
08.	Kecamatan Tawaeli	1	1	2
	Jumlah	2	12	20

Sumber Data: Kantor Kemenag. Kota Palu, Agustus 2018.

Tabel 1 di atas menggambarkan bahwa jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) di Kota Palu total berjumlah 20 Madrasah Ibtidaiyah yang terdiri dari dua Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) dan 12 Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS). Melihat jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) dalam tabel tersebut masih relatif sangat terbatas.

Tabel 2

Banyaknya Madrasah Tsanawiyah (MTs) Berdasarkan Statusnya di Kota Palu Tahun 2017/2018

No.	Wilayah Kecamatan	MTs.N	MTs.S	Jumlah
01.	Kecamatan Palu Barat	-	4	4
02.	Kecamatan Tatanga	1	3	4
03.	Kecamatan Ulujadi	-	1	1
04.	Kecamatan Palu Selatan	1	2	3
05.	Kecamatan Palu Timur	1	2	3
06.	Kecamatan Mantikulore	-	5	5
07.	Kecamatan Palu Utara	1	1	2
08.	Kecamatan Tawaeli	-	2	2
	Jumlah	4	20	24

Sumber Data: Kantor Kemenag. Kota Palu, Agustus 2018.

Tabel 2 di atas menggambarkan bahwa jumlah Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTs.N) dan Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs.S) di Kota Palu total berjumlah 24 Madrasah Tsanawiyah yang terdiri dari 4 (empat) Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTs.N) dan 20 Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs.S).

Tabel 3

Banyaknya Madrasah Aliyah (MA) Berdasarkan Statusnya di Kota Palu Tahun 2018

No.	Wilayah Kecamatan	MAN	MAS	Jumlah
01.	Kecamatan Palu Barat	-	3	3
02.	Kecamatan Tatanga	1	1	2
03.	Kecamatan Ulujadi	-	-	-
04.	Kecamatan Palu Selatan	-	-	-
05.	Kecamatan Palu Timur	1	-	1
06.	Kecamatan Mantikulore	1	3	4
07.	Kecamatan Palu Utara	-	-	-
08.	Kecamatan Tawaeli		1	1
	Jumlah	3	8	11

Sumber Data: Kantor Kemenag. Kota Palu, Agustus 2018.

Tabel 3 di atas menggambarkan bahwa jumlah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) dan Madrasah Aliyah Swasta (MAS) di Kota Palu total berjumlah 11 Madrasah yang terdiri dari tiga Madrasah Aliyah Negeri (MAN) dan delapan Madrasah Aliyah

Swasta (MAS). Melihat jumlah Madrasah Aliyah tersebut di atas, baik Negeri maupun swasta masih relatif sangat terbatas.

Dari ketiga tabel yang menggambarkan jumlah madrasah di Kota Palu, baik Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, maupun Aliyah, negeri atau swasta masih perlu pengembangan kelembagaan. Peluang pengembangan kelembagaan tersebut dimungkinkan terutama di beberapa wilayah Kecamatan yang sama sekali madrasah yang dibangun, mengingat penduduk Kota Palu juga adalah penduduk yang terbanyak atau mayoritas.

E. CORAK KELEMBAGAAN PENDIDIKAN ISLAM DI KOTA PALU DALAM SETTING SOSIO-HISTORIS

Pendidikan Islam yang lahir seiring dengan datangnya Islam itu sendiri di lembah Palu, meskipun pada mulanya dalam bentuk yang sangat sederhana, hingga sampai melembaga cukup mewarnai keberagaman masyarakat Kota Palu dengan tetap menghargai budaya dan kearifan masyarakat. Perkembangan dan pertumbuhan pendidikan Islam tersebut antara lain ditandai oleh adanya lembaga-lembaga pendidikan Islam yang amat bervariasi, namun antara satu dan yang lainnya memiliki hubungan substansial dan fungsional.

Dinamika pertumbuhan dan perkembangan lembaga pendidikan Islam tersebut ini juga, selain dipengaruhi oleh faktor internal dari para pendiri atau corak organisasi yang mewadahnya, juga tidak lepas dari pengaruh eksternal yang bersifat global. Kedua pengaruh ini satu dan yang lainnya secara akumulatif berpadu menjadi satu dan menghasilkan bentuk dan corak dari lembaga pendidikan Islam yang mengultural tanpa mengabaikan adaptasi budaya dan kearifan lokal dan tuntutan pengelolaan pendidikan modern.

Pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam bermula sejak masuknya Islam di Kota Palu sampai datangnya H.S. Idrus bin Salim Al-Jufri dikategorikan sebagai periode pendidikan Islam

“*informal-kultural*”. Corak pendidikan Islam pada periode pendidikan Islam “*informal-kultural*” ini dapat dikategorikan bercorak tradisional dengan sistem pendidikan *halaqah* baik dalam mempelajari baca tulis Al-Qur’an maupun ajaran Islam lainnya. Pada periode ini, corak pendidikan belum mengadopsi sistem pendidikan pesantren sebagaimana yang telah mulai berkembang di pulau Sumatera dan Jawa.

Berbeda halnya pada periode pendidikan “*institutif-kultural*”, adalah periode pendidikan Islam yang terus bertransformasi dari pengajian dan pembelajaran di rumah dan masjid berkembang membentuk institusi atau lembaga pendidikan yang dikelola dan dikembangkan oleh organisasi-organisasi masyarakat (ormas) Islam. Konteks pendidikan Islam pada fase ini tidak terlepas tumbuhnya kesadaran umat Islam mengembangkan pendidikan Islam yang melembaga dengan sistem penyelenggaraan pendidikan, baik formal maupun nonformal.

Sejak pertumbuhan dan perkembangannya sampai saat ini corak kelembagaan pendidikan yang diselenggarakan oleh keseluruhan Perguruan Islam yang mengelola lembaga pendidikan Islam di Kota Palu memiliki corak masing-masing, mulai dari corak tradisional, semi modern, dan modern, baik dalam bentuk informal maupun formal. Kelembagaan pendidikan formal ada yang bercorak pondok pesantren, *madrasiy*, dan persekolahan.

F. PERANAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DI KOTA PALU

Proses pendidikan Islam pada masyarakat Kaili Kota Palu telah berlangsung beriringan masuk dan berkembangnya Islam di Palu. Proses pendidikan tersebut telah memiliki peranan yang sangat signifikan dalam menanamkan tauhid dan konsep ajaran agama yang *hanif* dan *tauhidi*. Berbeda dengan ajaran animisme

dan dinamisme yang dianut masyarakat suku Kaili di Palu sebelum masuknya ajaran Islam.

Dalam *setting* sosio-historis, pendidikan Islam di Kota Palu terus bertransformasi dimana pendidikan Islam dikembangkan dengan pengelolaan pendidikan yang merespon tuntutan pendidikan modern dan beradaptasi dengan sistem pengelolaan pendidikan nasional.

Transformasi kelembagaan pendidikan Islam ini, ditandai dengan pengembangan pendidikan formal, bahkan beberapa lembaga pendidikan yang didirikan oleh ormas Islam (seperti; Madrasah Alkhairaat) dinegerikan oleh pemerintah dan mengadopsi sistem pengelolaan dan kurikulum pemerintah. Selain itu, fase ini juga telah dibangun beberapa Madrasah dan/atau Sekolah Islam dalam bentuk Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTs.N), dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN), Perguruan Tinggi Islam Negeri dan Swasta, serta Sekolah-sekolah umum berbasis Islam, seperti SDIT beberapa dekade terakhir ini.

Artikulasi pengembangan pendidikan Islam dalam konteks transformatif tersebut di atas, sebagai wujud peran pendidikan Islam di Kota Palu dalam membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat Kota Palu dalam struktur pendidikan nasional. Karena sistem dan kelembagaan pendidikan Islam telah menjadi bagian dari pada sistem pendidikan nasional. Dengan demikian, pendidikan Islam di Kota Palu telah mengambil peran dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dalam dimensi pendidikan keagamaan.

G. PENUTUP

Kesimpulan penelitian ini adalah: (1) pendidikan Islam di lembah Palu tumbuh dan berkembang seiring masuk dan berkembangnya Islam di Kota palu sejak tahun 1650 (abad XVII); (2) Secara institutif, pendidikan Islam tumbuh dan berkembang

melalui jalur pendidikan informal, semi formal, formal, dan fromal yang diselenggarakan oleh organisasi masyarakat Islam (ormas), yayasan, dan pemerintah; (3) Pendidikan Islam yang lahir seiring dengan datangnya Islam itu sendiri di lembah Palu, meskipun pada mulanya dalam bentuk yang sangat sederhana, hingga sampai melembaga cukup mewarnai keberagaman masyarakat Kota Palu dengan tetap menghargai budaya dan kearifan masyarakat; (4) Pendidikan Islam di Kota Palu, telah memainkan fungsi dan perannya sesuai dengan tuntutan masyarakat dan zamannya, terutama dalam pembinaan kegamaan masyarakat yang *rahmatan li al-alamin*.

Sebagai implikasi pelaksanaan pengkajian ini, yaitu: (1) direkomendasikan untuk dilakukan penelitian pengembangan dan tindak lanjut terutama kajian dan riset lebih mendalam tentang jejak historis kelembagaan pendidikan Islam dan tokoh-tokoh pendidikan Islam lokal Palu yang banyak berjasa dalam membangun dan mengembangkan pendidikan Islam di Kota Palu, baik tokoh pendidikan Islam informal maupun tokoh pendidikan Islam formal; (2) disarankan perlunya penguatan dan pengayaan materi pembelajaran sejarah pendidikan Islam berbasis kontens sejarah pendidikan lokal pada mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam di setiap Program Studi Kependidikan Islam (PAI, PBA, MPI, dan Tadris) di lingkungan PTKIS/PTKIN yang ada di Kota Palu.

Daftar Pustaka

- Aceng Abdul Aziz, et.al., *Islam Ahlussunnah Waljama'ah di Indonesia*. Cet. II; Jakarta: Pustaka Ma'arif NU, 2007.
- Ahmad Rasyid, A. Said. , *Pondok Pesantren dalam Perspektif Sejarah dan Tata Nilai*. Makassar: Pustaka Pesantren 2000.

- Azra, Azyumardi, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad VII dan XIII*. Bandung: Mizan, 1998.
- Bogdan, C. Robert dan Sari Knopp Biklen, *Qualitative Research in Education; an Introduction to Theory and Methods*. Edisi III, Boston: Allyn and Bacon, 1998.
- Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2000.
- Lofland, John and Lyn H. Lofland, *Analyzing Social Settings: A Guide to Qualitative Observation and Analysis*. California: Wadsworth Publishing Company, 1984.
- Nizar, Samsul, *Sejarah dan Pergolakan Pemikiran Pendidikan Islam Potret Timur Tengah Era Awal dan Di Indonesia*. Ciputat: Quantum Teaching, 2005.
- Nizar, Samsul, *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Rama, Bahaking, *Sejarah Pendidikan dan Peradaban Islam dari Umayyah Hingga Kemerdekaan Indonesia*. Yogyakarta: Cakrawala, 2009.
- Robert K. Yin, *Case Studi Research Design and Methods*, diterjemahkan oleh M. Muzakkir, Djauzi, *Studi Kasus Desain dan Metode*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sadi, Haliadi dan Syamsuri, *Sejarah Islam di Lembah Palu*. Cet. I; Yogyakarta: Q-Media, 2016.
- Spardly, J.P., *Participant Observation*. New York: Holt Rinehart and Winston, 1980.
- Subhan, Arief, *Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia Abad Ke-20: Pergumulan Antara Modernisasi dan Identitas*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012.

Suyranegara, Ahmad Mansur, *Menemukan Sejarah: Wacana Pergerakan Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan, 1998.

Yunus, Mahmud, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1995.

Zuhairini, *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI ISLAM DI INDONESIA

8

A. PENDAHULUAN

Jaroslav Pelikan, salah seorang mantan Presiden *American of Arts and Sciences* pernah memberikan statemen bahwa “*A modern society is unthinkable without the university*” (Jaroslov Pelikan, 1992: 13). “Suatu masyarakat modern tidak akan terpikirkan tanpa adanya universitas (perguruan tinggi)”. Pandangan ini mengisyaratkan bahwa bagi setiap bangsa yang ingin maju, mau modern, dan berkembang harus memiliki lembaga perguruan tinggi.

Dewasa ini, menurut Edward Shills eksistensi lembaga pendidikan tinggi diharapkan lebih produktif mengembangkan sumber daya manusia yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, menggodok dan memasyarakatkan nilai, melakukan riset dan inovasi serta memiliki kemampuan memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakatnya (Edward Shills, 1996: 81).

Pandangan Jaroslav Pelikan dan Edward Shills di atas, paling tidak memberikan ilustrasi betapa besarnya peran dan fungsi pendidikan tinggi bagi masyarakat suatu bangsa. Secara umum, peran dan fungsi perguruan tinggi di era modern ini adalah mempersiapkan masyarakat yang memiliki sumber daya yang meliputi berbagai aspek, termasuk yang tidak kalah pentingnya adalah aspek moral.

Kehadiran perguruan tinggi Islam di Indonesia, tentu tidak terlepas dari adanya kesadaran para tokoh, ulama, dan cendekiawan muslim terhadap pentingnya mempersiapkan dan mendirikan lembaga pendidikan tinggi bagi masyarakat yang secara nyata memiliki basis massa yang riil dari umat Islam. Kehadiran pendidikan tinggi Islam diharapkan memenuhi ekspektasi umat Islam untuk tampil sebagai lembaga pendidikan alternatif dalam membangun sumber daya manusia yang memiliki daya saing *plus* sikap religius dan akhlak mulia. Di samping itu, menghadirkan lembaga pendidikan tinggi Islam sebagai bentuk “perlawanan intelektual-akademik” terhadap eksisnya lembaga pendidikan tinggi umum yang di-*backup* oleh kolonial Barat.

Pandangan ini, relevan dengan argumentasi Haidar Putra Daulay, bahwa eksistensi lembaga pendidikan tinggi Islam pada dasarnya didorong oleh dua faktor utama. *Pertama*, adalah faktor intern yaitu di Indonesia telah berdiri perguruan tinggi umum. *Kedua*, faktor ekstern yaitu respon atas kebutuhan masyarakat untuk merealisasikan kehidupan beragama di tanah air dan masuknya pengaruh ide-ide pembaruan pemikiran Islam ke Indonesia (Haidar Putra Daulay, 2007: 119).

Jika dianalisis dari konteks sosio-historis geliat motif kelahiran pendidikan tinggi Islam di atas, maka tumbuh dan berkembangnya lembaga pendidikan tinggi Islam di Indonesia paling tidak berkaitan erat dengan tiga hal, yaitu; (1) kebutuhan pendidikan yang lebih tinggi bagi anak-anak muslim lulusan sekolah tingkat menengah; (2) dominannya peran sosial-politik para lulusan perguruan tinggi “ala Barat”, baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri; dan (3) semakin tumbuhnya kesadaran dan peranan pendidikan tinggi dalam pengembangan sumber daya manusia yang religius, berkarakter, dan berdaya saing.

Dengan demikian, pendirian dan pertumbuhan lembaga-lembaga pendidikan tinggi Islam di Indonesia mesti dilihat dalam

konteks yang lebih luas. Tidak saja dalam konteks perkembangan internal umat Islam, tetapi juga dalam relasi-relasi eksternal, baik dengan kelompok lain dari bangsa Indonesia itu sendiri maupun dengan kaum kolonial. Oleh karena itu, makalah ini akan mengurai perspektif historisitas lahir dan berkembangnya perguruan tinggi Islam di Indonesia dan eksistensinya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

B. PERSPEKTIF HISTORIS LAHIR DAN BERKEMBANGNYA PENDIDIKAN TINGGI ISLAM DI INDONESIA

1. Sejarah dan Dinamika Awal Pendirian Pendidikan Tinggi Islam

Pada awalnya, pendidikan Islam di Indonesia berjalan secara sederhana melalui pengajian-pengajian yang bersifat informal atau nonformal di mushallah atau masjid di samping rumah kediaman ulama atau muballig. Setelah itu muncullah tempat-tempat pendidikan lainnya seperti; Daya, Meunasah, Surau, Pesantren, Madrasah, hingga Pendidikan Tinggi Agama Islam (PTAI).

Upaya umat Islam untuk mendirikan pendidikan tinggi Islam sesungguhnya telah dirintis sejak zaman kolonial Belanda. Gagasan tentang perlunya menyediakan pendidikan tinggi bagi anak-anak muslim mulai dikemukakan secara meluas pada tahun 1930-an dan mulai mengalami kristalisasi pada tahun 1938 yang digeliatkan oleh Dr. Satiman Wirjosandjojo. Gagasan heroistik Satiman ini kemudian dipublikasikan di dalam artikel yang ditulisnya di Pedoman Masyarakat (PM) No. 15 Tahun IV (1938) (H. Iskandar Engku dan Siti Zubaidah, 2014: 143).

Ide dasar tentang urgennya pendirian perguruan tinggi Islam yang ditulis oleh Satiman kemudian menjadi pemantik bagi tokoh dan cendekiawan muslim untuk menjadikannya sebagai cita-cita bersama. Hal ini terbutki ketika Kongres II Majelis Islam `Ala

Indonesia (MIAI) yang berlangsung tanggal 2-7 Mei 1939, di mana salah satu agendanya adalah tentang “Perguruan Tinggi Islam” (Enung K. Rukiati dan Fenti Hikmawati, 2006: 128).

Gagasan pendirian perguruan tinggi Islam terus hidup dan menampakkan perwujudannya pada tahun 1940, ketika Persatuan Guru-Guru Agama Islam (PGAI) mendirikan Sekolah Tinggi atau “*Islamic College*” pada tanggal 9 Desember 1940 di Padang Sumatera Barat, di bawah pimpinan Mahmud Yunus. Lembaga ini terdiri dari dua fakultas, yaitu Fakultas Syari’ah dan Fakultas Pendidikan serta Bahasa Arab dengan tujuan ingin mendidik generasi menjadi ulama, meskipun ditutup pada saat invasi Jepang tahun 1942 (Mahmud Yunus, 1995:117).

Meskipun tidak secara organik berhubungan, ikhtiar pendirian perguruan tinggi pada masa-masa sesudahnya, patut diduga terilhami oleh gagasan-gagasan awal ini yang kemudian meluas menjadi cita-cita berasama para praktisi dan pemerhati pendidikan Islam ketika itu.

Di Jakarta misalnya, gagasan untuk mendirikan lembaga pendidikan tinggi Islam pun “menggeliat”. Tepat pada tanggal 8 Juli 1945 M/27 Rajab 1364 H. didirikan Sekolah Tinggi Islam (STI) oleh tokoh-tokoh Masyumi. Tujuannya adalah untuk melahirkan alim-ulama yang intelek, yaitu mereka yang mempelajari ilmu pengetahuan agama Islam secara luas dan mendalam, serta mempunyai pengetahuan umum yang dibutuhkan masyarakat modern (Bahaking Rama, 2009:164). Namun, pada bulan Desember 1945, tatkala Jakarta diduduki dan dikuasai oleh Pasukan Sekutu di bawah pimpinan Jenderal Cristianson, maka untuk sementara STI Jakarta ini ditutup. Baru pada tanggal 10 April 1946 STI ini dibuka kembali di Yogyakarta seiring dipindahkannya Ibu Kota negara dari Jakarta ke Yogyakarta (Hasbullah:199).

Pemindahan STI Jakarta yang mengikuti pemindahan ibu kota Republik Indonesia di Yogyakarta, menjadi “era baru” dalam

mewujudkan ekspektasi umat Islam untuk menghadirkan perguruan tinggi Islam yang adaptif dan berdaya saing. Sehingga, pada November 1947 dibentuk Panitia Perbaikan STI, yang dalam sidangnya sepakat mendirikan Universitas Islam Indonesia (UII). Akhirnya, pada tanggal 10 Maret 1948, Sekolah Tinggi Islam (STI) dirubah menjadi University Islam Indonesia (UII) dengan empat Fakultas, yaitu Fakultas Agama, Fakultas, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Pendidikan di bawah pimpinan Abdul Kahar Muzakkir (Bahaking Rama, 2009:164).

Dari “rahim” University Islam Indonesia (UII) inilah kemudian yang melahirkan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI), baik Negeri (PTAIN) maupun Swasta (PTAIS) dalam wujud kelembagaan, Sekolah Tinggi (STAIN/STAI), Institut (IAIN/IAI), dan Universitas (UIN/UIS).

2. Transformasi Fakultas Agama UII menjadi PTAIN

Upaya memajukan dan memperkokoh eksistensi pendidikan tinggi Islam pasca pendirian UII (1948), tampaknya semakin matang dan terarah, karena di samping semakin kondusifnya iklim politik pasca kemerdekaan, *supporting* dari umat Islam dan pemerintah juga semakin kuat. Bahkan, dua tahun kemudian (1950) pemerintah mentransformasi Fakultas Agama UII menjadi Perguruan Tinggi gama Islam Negeri (PTAIN).

Kebijakan penegerian Fakultas Agama UII menjadi PTAIN berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 1950. Dalam konsedieran disebutkan bahwa PTAIN didirikan bertujuan memberikan pengajaran studi Islam tingkat tinggi, dan menjadi pusat pengembangan serta pendalaman ilmu pengetahuan agama Islam (H. Iskandar Engku dan Siti Zubaidah, 2014: 144). Berdasarkan PP tersebut, maka transformasi Fakultas Agama UII menjadi PTAIN resmi ditetapkan tanggal 26 September 1951 di bawah pimpinan Prof. K.H. R. Muhammad Adnan, dengan jumlah mahasiswa sebanyak 67 orang yang tersebar di tiga jurusan, yaitu;

Jurusan Tarbiyah, Jurusan, *Qadha* (Syari'ah), dan Jurusan Dakwah.

Dalam perkembangan selanjutnya, di mana UII sebagai lembaga pendidikan tinggi swasta terus berjalan, bahkan pendirian perguruan tinggi Islam swasta pun kian meluas. PTAIN Yogyakarta pun kian berkembang dan terus berbenah secara kelembagaan dalam meningkatkan kualitas pendidikannya.

3. Pendirian Akademik Dinas Ilmu Agama (ADIA)

Adanya kebutuhan tenaga fungsional bidang guru agama Islam yang sesuai dengan tuntutan kualifikasi akademik, profesionalitas, dan modernitas pada dekade 1950-an mendorong Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama) mendirikan Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) di Jakarta pada tanggal 1 Juni 1957 berdasarkan penetapan Menteri Agama R.I. No. 1 Tahun 1957 (Azyumardi Azra, 1998:124). Kepemimpinan ADIA ketika itu dipercayakan kepada Prof. Dr. H. Mahmud Yunus sebagai Dekan, dan Prof. H. Bustami A. Gani sebagai Wakil Dekan (H. Iskandar Engku dan Siti Zubaidah, 2014: 146).

ADIA ini didirikan dengan tujuan mendidik dan mempersiapkan pegawai negeri, guna mendapatkan ijazah pendidikan akademi dan semi akademi, sehingga menjadi guru agama, baik untuk sekolah umum, sekolah kejuruan, maupun sekolah agama. ADIA memiliki tiga jurusan, yaitu Jurusan Pendidikan Agama, Jurusan Bahasa Arab, dan Jurusan *Dakwah wal-Irsyad* yang juga dikenal dengan Jurusan Khusus Imam Tentara. Komposisi kurikulum ADIA tidak jauh berbeda dengan kurikulum PTAIN, dengan beberapa tambahan mata kuliah untuk kepentingan tenaga fungsional.

Terdapat dua ciri utama ADIA. *Pertama*, sesuai dengan mandatnya sebagai akademi dinas, mahasiswa yang mengikuti kuliah di ADIA terbatas pada mahasiswa tugas belajar. Mereka diseleksi dari pegawai atau guru agama di lingkungan Departemen

Agama yang berasal dari wakil-wakil daerah di seluruh Indonesia. *Kedua*, sesuai dengan mandatnya untuk mempersiapkan guru agama modern, tanggung jawab pengelolaan dan penyediaan anggaran ADIA berasal dari Jawatan Pendidikan Agama (Japenda) Departemen Agama, yang pada waktu itu memiliki tugas mengelola madrasah dan mempersiapkan guru agama Islam modern di sekolah umum.

4. Pengintegrasian PTAIN Yogyakarta dengan ADIA Jakarta

Dalam satu dekade, PTAIN memperlihatkan perkembangan menggembirakan. Jumlah mahasiswa PTAIN semakin banyak dan tuntutan cakupan pembelajaran pun semakin luas. Meningkatnya kuantitas mahasiswa dan meluasnya *area of studies* tersebut, mendorong perlunya perluasan dan penambahan, baik dari segi kapasitas kelembagaan, fakultas dan jurusan, maupun komposisi mata kuliah. Maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut serta untuk mendorong pengelolaan pendidikan tinggi Islam yang efektif dan fokus, maka pemerintah melalui Peraturan Presiden No. 11 Tahun 1960 tertanggal 19 Mei 1960 mengintegrasikan PTAIN Yogyakarta dengan ADIA Jakarta menjadi “*Al-Jami’ah Al-Hukumiyah Al-Islamiyah*”, berkedudukan di Yogyakarta (Steenbrink, 1986: 204).

Al-Jami’ah Al-Hukumiyah Al-Islamiyah ini secara resmi dibuka pada tanggal 24 Agustus 1960 di gedung kepatihan Yogyakarta oleh Menteri Agama RI kala itu K.H. Wahib Wahab, dengan Rektor pertamanya yaitu Prof. Mr. Sunaryo. Pada tahap awal, *Al-Jami’ah Al-Hukumiyah Al-Islamiyah* ini memiliki empat fakultas. Dua fakultas di Yogyakarta, yaitu Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Syari’ah dan dua fakultas di Jakarta, yaitu Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Adab. Dari sinilah kemudian “embrio” lahirnya IAIN Suanan Kalijaga Yogyakarta dan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Sesungguhnya, ada hal yang menarik untuk dianalisa dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1960 sebagai payung hukum pendirian PTAIN di Indonesia. Dalam diktum Peraturan Presiden tersebut pada pasal 1 (ayat 1) disebutkan; “Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri di Yogyakarta dan Akademi Dinas Ilmu Agama di Jakarta, digabungkan menjadi Institut Agama Islam Negeri dengan nama “*Al-Jami’ah Al-Hukumiyah Al-Islamiyah*” yang tempat dan kedudukannya di Yogyakarta” (Marwan Saridjo, 2010: 188).

Ada dua hal yang perlu digarisbawahi dari ketentuan pasal 1 di atas, *Pertama*, Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri yang dibentuk berasal dari gabungan PTAIN Yogyakarta dan ADIA Jakarta. PTAIN Yogyakarta berasal dari Fakultas Agama UII dan ADIA, sebuah akademi yang didirikan Departemen Agama untuk menyiapkan tenaga ahli guru agama. *Kedua*, nama resmi PTAIN yang tercantum dalam Peraturan Presiden, adalah *Al-Jami’ah Al-Hukumiyah Al-Islamiyah*.

Secara leksikal, *Al-Jami’ah* dapat diterjemahkan Universitas atau Institut. Tetapi mengapa kemudian terma yang dipilih dalam perkembangannya adalah “Institut” atau IAIN bukan Universitas ketika itu?. Hal ini tidak terlepas dari pendekatan dan cara pandang memahami beberapa butir konsiderans dan pasal yang tercantum di dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1960.

Pada pasal 2 (Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1960 di atas) disebutkan; “Institut Agama Islam Negeri, bermaksud (dimaksudkan) untuk memberi pengajaran tinggi dan menjadi pusat untuk mengembangkan dan memperdalam ilmu pengetahuan tentang Islam”. Demikian pula di dalam butir (c) disebutkan: “bahwa penyelenggaraan dan pembentukan *Al-Jami’ah Al-Hukumiyah Al-Islamiyah* bercorak khusus ini, sebaiknya ditugaskan kepada Menteri Agama”.

Berdasarkan pada pasal 2 dan butir (c) konsiderans Peraturan Presiden di atas, maka dapat diasumsikan secara kuat bahwa: *Pertama*, penyelenggaraan dan pembentukan *Al-Jami'ah* adalah bercorak khusus. Corak khusus dalam konteks ini adalah sebagai lembaga “*tafaqqahu fi al-dien*” (bercorak khusus untuk studi ilmu agama Islam). *Kedua*, fungsi utama pendirian *Al-Jami'ah* adalah untuk memberi pengajaran tinggi tentang agama Islam, bukan untuk memberi pengajaran tinggi di luar agama Islam. *Ketiga*, *Al-Jami'ah* sebagai kelembagaan yang menjadi pusat pengembangan dan memperdalam ilmu pengetahuan tentang agam Islam. *Keempat*, karena pusat pengembangan, tidak boleh direduksi oleh suatu program studi atau pemakaian istilah-istilah yang mengandung makna ganda yang dapat mereduksi fungsi dasarnya. *Kelima*, karena bercorak khusus sebagai pusat “*tafaqqahu fi al-dien*”, maka secara kelembagaan dikelola oleh Kementerian Agama RI.

Atas dasar itulah, menjadi alasan bahwa *Al-Jami'ah Al-Hukumiyah Al-Islamiyah* bercorak khusus untuk studi ilmu agama Islam atau disiplin ilmu yang sejenis, menjadi alasan tidak “*di-brand*” dengan Universitas, melainkan Institut. Dan dengan inilah *Al-Jami'ah Al-Hukumiyah Al-Islamiyah* kemudian populer disebut dengan “Institut Agama Islam Negeri” yang disingkat IAIN.

IAIN sebagai lembaga Pendidikan Tinggi Islam Negeri ini, ditetapkan melalui Ketetapan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 1960 tentang penyelenggaraan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan sebagai pelaksanaannya, dikeluarkanlah Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 1961 tentang penyelenggaraan IAIN (Haidar Putra Daulay, 2009: 24). Regulasi tentang penetapan dan penyelenggaraan IAIN di atas, pada dasarnya sebagai respon dan tindak lanjut terhadap Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1960 tentang pembentukan *Al-Jami'ah Al-Hukumiyah Al-Islamiyah* atau IAIN.

5. Pertumbuhan dan Pengembangan IAIN

Kurang lebih tiga tahun (1960-1963) *pasca* pengintegrasian PTAIN dengan ADIA menjadi *Al-Jami'ah Al-Hukumiyah Al-Islamiyah* atau IAIN, perkembangannya pun semakin pesat menyebabkan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 1963 yang mendorong didirikannya IAIN yang terpisah dari pusat (Yogyakarta). Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 1963 tersebut, maka Menteri Agama mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 49 Tahun 1963 tertanggal 25 Februari 1963 tentang pemisahan IAIN menjadi dua Institusi yang berdiri sendiri (otonom). *Pertama*, berpusat di Yogyakarta dengan nama IAIN Sunan Kalijaga. *Kedua*, berpusat di Jakarta dengan nama IAIN Syarif Hidayatullah (Bahaking Rama, 2009: 164). Dari kedua Kota inilah, IAIN sangat cepat berkembang ke daerah-daerah lain di Nusantara.

Pada awalnya, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mempunyai dua Fakultas, yaitu, yaitu Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Syari'ah. Dekan Fakultas Ushuluddin adalah Prof. Mukhtar Yahya dan Dekan Fakultas Syari'ah adalah Tg. M. Hasbi Asshiddiqy. Sedangkan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, juga mempunyai dua Fakultas, yaitu Fakultas Adab dan Fakultas Tarbiyah. Dekan Fakultas Adab adalah H. Bustami A. Gani dan Dekan Fakultas Tarbiyah adalah H. Mahmud Yunus.

Dalam rangka untuk kepentingan pengembangan sekaligus memenuhi kebutuhan umat Islam dalam layanan pendidikan tinggi di daerah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta diberi tugas mengkoordinir dan membina fakultas-fakultas hingga berdiri sendiri menjadi IAIN di wilayah timur, meliputi Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta diberi tugas mengkoordinir dan membina fakultas-fakultas hingga berdiri sendiri menjadi IAIN di wilayah barat, meliputi Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera.

Sampai dengan tahun 1973, tercatat telah berdiri sebanyak 14 buah IAIN dengan yang tersebar di Nusantara, sebagai berikut:

No.	Nama IAIN	Kota/Provinsi	Thn Peresmian
1.	IAIN Sunan Kalijaga	Yogyakarta	1960
2.	IAIN Syarif Hidayatullah	Jakarta	1963
3.	IAIN Ar-Raniry	Banda Aceh	1964
4.	IAIN Raden Fatah	Palembang	1964
5.	IAIN Antasari	Banjarmasin	1964
6.	IAIN Sunan Ampel	Surabaya	1965
7.	IAIN Alauddin	Ujung Pandang	1965
8.	IAIN Imam Bonjol	Padang	1966
9.	IAIN Sultan Thaha Syaifuddin	Jambi	1967
10.	IAIN Sunan Gunung Jati	Bandung	1968
11.	IAIN Raja Intan	Bandar Lampung	1968
12.	IAIN Walisongo	Semarang	1970
13.	IAIN Syarif Qosim	Pekan Baru	1970
14.	IAIN Sumetara Utara	Medan	1973

IAIN-IAIN tersebut di atas beroperasi dengan beberapa fakultas di lingkungannya serta tidak sedikit yang mempunyai fakultas cabang yang tersebar ke berbagai daerah, seperti halnya IAIN Alauddin Makassar. Di samping memiliki beberapa fakultas di wilayah Sulawesi Selatan, juga memiliki fakultas di beberapa kota di luar Provinsi Sulawesi Selatan di antaranya; di Palu, Ternate, Gorontalo, Palopo, Ambon, Kendari dan Manado. Demikian pula halnya dengan IAIN yang lain yang tersebar di seluruh Indonesia.

6. Otonomi “Fakultas Filial IAIN” menjadi STAIN

Dalam ukuran apa pun, pendirian 14 IAIN dalam rentang waktu satu dekade, jelas merupakan perkembangan yang sangat signifikan. Apalagi IAIN-IAIN tersebut memiliki kelas filial (cabang) di daerah-daerah hingga tahun 1997. Tentu saja dari aspek kuantitas kelembagaan dan mahasiswa mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi. Data tahun 1995/1996 menunjukkan bahwa jumlah mahasiswa IAIN secara keseluruhan sudah mencapai 92.376 orang. Kondisi ini menjadikan IAIN sebagai lembaga pendidikan tinggi yang diperhitungkan di Indonesia (Abuddin Nata: 240).

Melihat besarnya potensi IAIN dengan cabang-cabangnya di daerah, maka pemerintah memandang perlu melakukan restrukturisasi kelembagaan, yaitu semua fakultas cabang di daerah dijadikan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) dan secara administratif statusnya berdiri sendiri (otonom), tidak ada kaitan lagi dengan IAIN Induk. Kebijakan restrukturisasi ini diatur dan ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 1997. Sejak terbitnya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 tersebut, maka sejak tanggal 1 Juli 1997 diresmikan 33 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) di seluruh Indonesia. Dengan demikian, ketika itu (1997) telah berdiri 47 lembaga Pendidikan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) yang terdiri dari 33 STAIN dan 14 IAIN yang tersebar di seluruh Indonesia.

7. Transformasi IAIN menjadi UIN

Berawal tahun 1998, tiga IAIN (Jakarta, Yogyakarta, dan Bandung) membangun wacana dan mematangkan proposal perencanaantransformasinya menjadi Universitas Islam Negeri (UIN). Di antara alasan munculnya ide ini antara lain: *Pertama*, dengan berubahnya status Institut menjadi Universitas, dapat dikembangkan program studi dan fakultas non agama atau fakultas umum yang memungkinkan para lulusan IAIN/UIN memperoleh

akses yang lebih luas pada sektor lapangan kerja. *Kedua*, sebagai langka pengintegrasian pengetahuan agama dengan pengetahuan umum, yang selama ini bersifat dikotomik.

Perjuangan peralihan IAIN menjadi UIN tersebut di atas, baru membuahkan hasil pada tahun 2002 dengan keluarnya Surat Keputusan Presiden RI Nomor 031 tanggal 20 Mei 2002, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta resmi berubah dan ditetapkan menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dua tahun kemudian, menyusul IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, STAIN Malang, dan IAIN Sultan Syarif Qasim Riau, juga ketiganya berubah status menjadi UIN. Kemudian, pada tahun 2005, IAIN Alauddin Makassar dan IAIN Sunan Gunung Jati Bandung, juga berubah status menjadi UIN. Artinya, sejak tahun 2002-2005, ada enam UIN di Indonesia yang telah mengembangkan ilmu pengetahuan secara komprehensif dan universal.

Menurut Abd. Rahim Yunus, dengan perubahan IAIN menjadi UIN memberi peluang untuk program studi dan jurusan ilmu pengetahuan umum selain jurusan dan program studi agama yang sudah ada. Masuknya jurusan umum (saintek dan ilmu-ilmu kesehatan) tidak dimaksudkan meninggalkan visi IAIN sebagai perguruan tinggi Islam yang mencetak ilmuan muslim. Akan tetapi merupakan wujud dari pengintegrasian ilmu agama dengan ilmu umum ke dalam lingkup ilmu Islam (Abd. Rahim Yunus, 2009: 338).

Saat ini, Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKIN) telah memiliki 11 UIN. Artinya, sejak tahun 2002-2018, ada 11 UIN di Indonesia yang telah mengembangkan ilmu pengetahuan secara komprehensif dan universal. Di samping IAIN yang terus bertarnsformasi menjadi UIN, hal yang sama juga diikuti oleh beberapa STAIN merubah status menjadi IAIN, seperti halnya STAIN Datokarama Palu beralih status menjadi IAIN Palu pada ahir tahun 2003.

8. Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)

Meskipun Perguruan Tinggi Islam sudah cukup banyak, namun kualifikasinya belum sampai pada tarap internasional, sehingga fungsi pengembangan peradaban Islam, terutama yang memberikan perhatian yang besar terhadap Indonesia, dipandang belum maksimal. Bangsa ini juga belum memiliki institusi yang secara khusus berfungsi mengumpulkan, mengembangkan dan menampilkan kekayaan peradaban Islam secara universal dan global.

Atas dasar itu, maka sejak tahun 2016 didirikan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) atau *Indonesian International Islamic University* (IIIU), (Bahasa Arab: الجامعة الإسلامية العالمية بإندونيسيا) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia sebagai perguruan tinggi berstandar Internasional yang menjadi model pendidikan tinggi Islam terkemuka dalam bidang studi agama Islam, ilmu-ilmu sosial, humaniora dan sains teknologi.

Pendirian UIII juga tidak lepas dari keinginan untuk meningkatkan pengakuan masyarakat akademik Internasional atas peran Islam di Indonesia, dan menjadikan Indonesia menjadi salah-satu pusat peradaban Islam di dunia melalui jalur dan jenjang pendidikan tinggi yang memenuhi standar Internasional.

Sebagai lembaga Pendidikan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) berbasiskan universalisme Islam, paling tidak ada beberapa hal yang utama yang penting dijelaskan sehubungan dengan UIII ini. *Pertama*, konteks dan karakteristik Islam di Indonesia sebagai model peradaban Islam. *Kedua*, pendirian UIII sebagai pusat peradaban Islam melalui pendidikan; *ketiga*, kaitan UIII dengan integrasi ilmu, terutama cara pandang UIII berkaitan dengan epistemologi ilmu, model kajian yang berkaitan dengan Islam, dan model pengembangan kelembagaan; *ketiga*, UIII menjadi pusat kajian dan riset Internasional dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Dalam konteks pendidikan tinggi nasional, UIII menjadi pionir pembentukan *research university* bagi bidang keilmuan yang lain. UIII berkeinginan mengikuti jejak negara-negara maju dalam membangun institusi pendidikan tinggi unggulan untuk kajian yang berkaitan dengan Islam dan masyarakat muslim dalam perspektif ilmu pengetahuan yang sudah mapan seperti politik, sosiologi antropologi, ekonomi, hukum, sejarah dan pendidikan.

Sebagai lembaga yang dibangun di atas idealisme untuk mengembangkan studi tentang Islam dan masyarakat muslim, serta peningkatan kemanfaatan ilmu pengetahuan bagi masyarakat dunia, UIII selalu menjaga idealismenya untuk terus berkembang dan meningkatkan dampak kehadiran sarjana-sarjananya bagi masyarakat dunia. Saat ini, pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) terus berlanjut dengan kucuran dana sebesar Rp. 1,5 Triliun di atas lahan sekitar 127 hektar di kawasan Kota Depok, Jawa Barat, dan diperkirakan mulai berfungsi pada tahun 2019 mendatang.

9. Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta

Sebagaimana telah dibahas bahwa cikal bakal lahirnya Perguruan Tinggi Agama Islam, baik berstatus Negeri maupun Swasta adalah berawal dari University Islam Indonesia (UII). Fakultas Agama yang ada di UII, atas kebijakan pemerintah dijadikan PTAIN. Sementara Perguruan Tinggi Islam Indonesia (PTII) yang didirikan oleh sejumlah pimpinan Islam dan ulama di Solo (Surakarta) pada 22 Januari 1950 terintegrasi dengan UII Tanggal 20 Februari 1951.

Selain UII, dan PTAIN, *Al-Jami'ah*/IAIN, STAIN, dan UIN, beriringan dengan itu, tokoh, ulama, dan cendekiawan muslim pun tetap mendirikan dan mengembangkan perguruan tinggi Islam, baik berbentuk Universitas, Institut, maupun Sekolah Tinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan Islam dan/atau Ormas Islam. Di antara universitas itu adalah Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) di Medan, Universtas

Islam Bandung (UNISBA) di Bandung, Universitas Islam Jakarta (UIJ) di Jakarta, Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Makassar, Universitas Islam Makassar (UIM) di Makassar, Universitas Muhammadiyah, Universitas Nahdlatul Ulama, Universitas Alwashliyah, Universitas Alkhairaat, Sekolah Tinggi Nahdlatul Ulama (STAINU), STAI DDI, dan lain-lain.

Sebagai lembaga pendidikan swasta, PTAIS-PTAIS dalam perjalanannya tetap menjadi perhatian pemerintah. Bahkan, beberapa ketentuan, regulasi, dan peraturan-peraturan yang dulu sifatnya sentralistik, diubah untuk diserahkan kepada daerah, melalui Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam (KOPERTAIS) di wilayah masing-masing. Adapun fakultas-fakultas umum yang ada pada Universitas dikoordinir oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTIS) yang ada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Tinggi.

Pertumbuhan dan perkembangan Pendidikan Tinggi Agama Islam Swasta, berdasarkan data sampai saat ini berjumlah 763 perguruan tinggi dalam berbagai bentuk kelembagaan, yaitu mulai dari Universitas (Fakultas Agama Islam), Institut, maupun Sekolah Tinggi. Adapun jumlah Fakultas Agama Islam pada Universitas sebanyak 100, Institut sebanyak 56, dan Sekolah Tinggi sebanyak 607. Dari keseluruhan jumlah (763) perguruan tinggi Islam swasta ini, dikoordinir oleh 13 Wilayah Kopertais.

C. EKSISTENSI PENDIDIKAN TINGGI ISLAM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, sebagaimana halnya Pendidikan Tinggi Islam sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan pendidikan nasional. Melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, negara telah memberikan kerangka yang jelas kepada Pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan nasional yang sesuai dengan amanat Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Meskipun demikian, masih memerlukan pengaturan agar pendidikan tinggi dapat lebih berfungsi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora untuk pemberdayaan dan pembudayaan bangsa. Di antara regulasi pokok yang mengatur penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Dengan Undang-Undang ini pula, pendidikan tinggi diharapkan mampu menjalankan peran strategis dalam memajukan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.

Eksistensi lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan di dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012, tertuang pada pasal 30 (ayat 1, 2, dan 3) sebagai berikut: *(1) Pemerintah atau Masyarakat dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi keagamaan. (2) Pendidikan tinggi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, akademi dan dapat berbentuk ma'had aly, pasraman, seminari, dan bentuk lain yang sejenis. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan tinggi keagamaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Berdasarkan diktum pada pasal di atas, maka PTKIN sebagai salah satu jenis layanan pendidikan tinggi keagamaan di Indonesia, secara legal formal diakui eksistensinya, di mana penyelenggaraannya diserahkan kepada Kementerian Agama. Hal ini sebagaimana dijelaskan pada Pasal 7 ayat (4), yaitu: *“Dalam hal penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan, tanggung jawab, tugas, dan wewenang dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama”*.

Meskipun penyelenggaraannya diserahkan kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, namun PTKIN dalam hal-hal tertentu sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi ini tetap berada pada koordinasi dan pengawasan Kementerian yang menangani Pendidikan Tinggi. Diantaranya,

terutama dalam aspek pelaporan, evaluasi, dan pengawasan terhadap standar pengelolaan dan akreditasi perguruan tinggi.

Dengan demikian, eksistensi PTKIN dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi secara yuridis diakui menjadi bagian integral dalam sistem penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagai sub sistem pendidikan nasional. Namun demikian, secara substansial dalam Undang-Undang Nomor 12 tersebut juga terdapat tantangan baru bagi PTKIN dalam mempertahankan eksistensinya.

Secara substansial Undang-Undang ini juga diasumsikan mengarah kepada globalisasi, liberalisasi, internasionalisasi, pro-pasar, swastanisasi, dan bahkan komersialisasi pendidikan Nasional. Oleh karena itu, PTKIN sebagai elemen dari ragam model pendidikan tinggi di Indonesia dianggap terkena imbas yang sama bahkan menjadi tantangan tersendiri untuk dapat bersaing dengan perguruan tinggi umum, bahkan perguruan tinggi Asing yang kelak ada di Indonesia.

Terdapat beberapa pasal yang mengindikasikan perlunya PTKIN mampu beradaptasi dan bersaing dalam mempertahankan eksistensinya. Diantaranya, pasal 50 tentang kerjasama Internasional, pasal 64 tentang otonomi pengelolaan perguruan tinggi, dan pasal 90 tentang perguruan tinggi luar negeri. Pasal yang mengatur peluang dan tuntutan kerjasama Internasional menunjukkan keharusan bagi PTKIN “bermain” pada ranah Internasionalisasi dan globalisasi perguruan tinggi. Adanya hak otonomi pengelolaan perguruan tinggi menuntut adanya kemandirian bagi PTKIN, apalagi ditengarai sebagai bentuk pelepasan tanggung jawab negara dalam pembiayaan pendidikan tinggi yang ditandai dengan dua pola pengelolaan keuangan perguruan tinggi, yakni Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Hukum. Sedangkan pasal 90 UU Dikti, dipandang memberikan potensi masyarakat akan lebih memilih perguruan tinggi Asing yang lebih terjangkau secara ekonomis dan lebih menjanjikan mutu secara kualitas. Tentunya PTN dan PTKIN akan potensial

semakin terbelakang. Kondisi ini, menunjukkan betapa pentingnya mengembangkan perguruan tinggi, khususnya bagi PTKIN yang unggul, berkualitas, dan berdaya saing global.

D. PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara sosio-historis, bahwa lahirnya IAIN adalah “metamorfosis” sejak adanya ide dan *action* pendirian Pesantren Luhur (1938), *Islamic College* (1940), STI (1945), UII (1948), PTII (1950), PTAIN (1951), ADIA (1957), dan pada akhirnya final menjadi *Al-Jami'ah* (1960) yang kemudian lebih populer disebut IAIN. Berdirinya *Al-Jami'ah*/IAIN di tahun 1960 inilah menjadi era baru pertumbuhan dan perkembangan Perguruan Tinggi Islam, baik berstatus Negeri maupun Swasta dalam bentuk Sekolah Tinggi, Institut, dan Universitas sampai saat ini. Selain itu, saat ini pemerintah telah membangun Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) yang kelak menjadi ikon Perguruan Tinggi Islam bertaraf Internasional.
2. Eksistensi Perguruan Tinggi Islam dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi secara yuridis diakui menjadi bagian integral dalam sistem penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagai sub sistem pendidikan nasional. Dalam hal penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan Islam, tanggung jawab, tugas, dan wewenang dilaksanakan oleh Menteri Agama RI dan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, Azyumardi, *Esei-Esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos, 1998.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, *Pendidikan di Indonesia 1900-1974*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Boland, B.J., *Pergumulan Islam di Indonesia*. Jakarta: Grafiti Pers, 1995.
- Daulay, Putra, Haidar, *Dinamika Pendidikan Islam di Asia Tenggara*. Cet. I; Jakarta: Rieneka Cipta, 2009.
- Daulay, Putra, Haidar, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*. Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2007.
- Departemen Agama RI, *Perguruan Tinggi Agama Islam di Indonesia: Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*. Jakarta: 2003.
- Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, http://diktis.kemenag.go.id/bansos/cari_nspt.php. Diakses, tanggal 10 Februari 2018.
- Engku, Iskandar H. dan Siti Zubaidah, *Sejarah Pendidikan Islami*. Cet.II; Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2014.
- Nata, Abuddin, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*. Cet.I; Jakarta: PT Grasindo, 2001.
- Pairin, *Sejarah Pendidikan Perguruan Tinggi Agama Islam di Indonesia*, ejournal.iainkendari.ac.id/shautut-tarbiyah/article/view/79/69. Diakses, tanggal 8 Februari 2018.

- Pelikan, Jaroslav, *The Idea of The University: A Reexamination*. New Haven: Yale University Press, 1992.
- Rama, Bahaking, *Sejarah Pendidikan dan Peradaban Islam dari Masa Umayyah Hingga Kemerdekaan Indonesia*. Yogyakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Rukiati, Enung K. dan Fenti Hikmawati, *Sejarah Pendidikan di Indonesia*. Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Saridjo, Marwan, *Pendidikan Islam dari Masa ke Masa: Tinjauan Kebijakan Publik Terhadap Pendidikan Islam di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Yayasan Ngali Aksara, 2010.
- Shills, Edward, “*Modernization and Higher Education*”, dalam Mayron Weiner (ed.), *Modernization: The Dynamics of Growth*. New York: Basic Books, 1996.
- Sirozi, Muhammad, *Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: INIS, 2004.
- Steenbrink, Karel. A, *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*. Jakarta: LP3ES, 1986.
- Tilaar, H.A.R., *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam Perpektif Abad 21*. Jakarta: Tera Indonesia, 1999.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- Yunus, Abd. Rahim, *Integrasi Ilmu Agama Ke Dalam Ilmu umum dalam Konteks Pendidikan Nasional*, dalam Marwan Suridjo (Peny.), *Mereka Bicara Pendidikan Islam: Sebuah Bunga Rampai*. Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Yunus, Mahmud, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1995.

TENTANG PENULIS



ARIFUDDIN M. ARIF, lahir di Soni, 07 Nopember 1975. Kesehariannya berprofesi sebagai Dosen pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palu. Sebelum diangkat sebagai Dosen di IAIN Palu (Tahun 2007), Penulis adalah salah seorang Dosen Tetap Yayasan Alkhairaat yang ditempatkan di Fakultas Agama Islam. Selama di Fakultas Agama Islam UNISA Palu, Penulis pernah diberi kepercayaan sebagai Ketua Program Studi PGSDI/MI tahun 2005. Sekretaris Jurusan Tarbiyah tahun 2007, dan Ketua Jurusan Tarbiyah FAI UNISA tahun 2009-2014.

Maret 2014-2018 diamanahi sebagai Ketua Jurusan/Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) FTIK IAIN Palu. Saat ini, selain aktif sebagai akademisi, juga aktif sebagai *Writer*, *Trainer*, dan *Speaker* (WTS) di bidang pendidikan, pembelajaran, dan pengembangan SDM. Sejak tahun 2016 sampai sekarang (2019), aktif sebagai Tim Fasilitator dan Konsultan Program Palu Kana Mapande di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu. Direktur Eksekutif Education Development Center (EnDeCe) Sulteng ini juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Penulis Profesional Indonesia Kota Palu.

Dari sejumlah pengalaman, kepakaran, dan aktivitas yang konsen di bidang pendidikan, pembelajaran, dan kebudayaan inilah, ia dipercaya sebagai Tim Penyusun Kurikulum

Pembelajaran Jam Tambahan Agama Islam pada Peserta Didik Kelas V SD di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu (2017), Tim Penulis Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Kota Palu (2018), dan Tim Penulis Buku Panduan dan Bahan Pembelajaran Mitigasi Bencana Alam Berbasis Kearifan Lokal Terintegrasi dalam Kurikulum 2013 (2019). Dengan moto hidup “*Bertumbuh Penuh Gaya, Hidup Penuh Karya, Kaya dengan Karya*” menjadikan Ia produktif dalam menulis dan aktif sebagai Writerpreneur.

Buku yang telah terbit dan terpublikasi Ia tulis hingga saat ini (2019) sebanyak 20 Judul, di antaranya: Pengantar Ilmu Pendidikan Islam (Kultura, Jakarta: 2008), *Education for Generation: Grand Desain Pendidikan Menuju Generasi Emas Indonesia* (EnDeCe Palu: 2013), Lima Rukun Pembelajaran Kurikulum 2013 (EnDeCe Palu, 2013), Sarjana Terlarang (Hakim Publishing, Bandung: 2015), Ensiklopedi Tokoh Pendidikan Islam di Nusantara (Hakim Publishing, Bandung: 2016), Khazanah Budaya Kaili, Pengantar Sejarah Sosial Pendidikan Islam di Kota Palu (Oman Publishing, Bandung: 2019).